

اسوق قرآن العظیم دان دلتفکر جاف
کر جاون تانہ پیر اس فرہنجین این
مک سلطان بیکسرة منتری ۲۰ این ایت

dit Raatnat huer toe eypress,
felyk verwaardigd met eonde
herbage, en bevestigd en Voorts
met het Ryks segel van
Bima in hinnen handbeker.

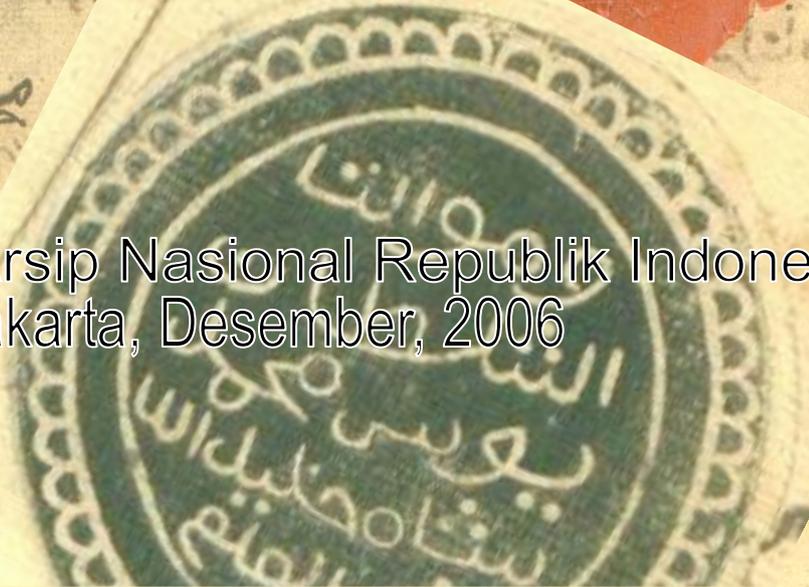
CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP



De Gouverneur
van Celebes en Onderhoorigheden,
Bicaala



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Desember, 2006



CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP

Sambutan

Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya".

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Perjalanan sejarah Nusa Tenggara Barat hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dalam khasanah arsip yang telah tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dapat diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai rekaman fenomena dan peristiwa sejarah yang menggambarkan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Maklumat Sultan Bima, M. Salahuddin tanggal 22 November 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kerajaan Bima adalah Daerah Istimewa bagian dari negara Republik Indonesia, adalah salah satu pernyataan penting yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fenomena alam yang terjadi Nusa Tenggara Barat adalah meletusnya **Gunung Tambora tanggal 5 April 1815** yang guncangannya dirasakan di seluruh Maluku, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, bahkan akibatnya dirasakan hampir ke seluruh dunia. Meletusnya gunung Tambora ini

mengakibatkan lenyapnya dua kerajaan, yaitu Tambora dan Papekat serta mengakibatkan lebih dari 10.000 orang tewas.

Dalam paruh kedua abad XIX, tepatnya pada tanggal 9 Nopember 1857 terjadilah peristiwa penting yang dikenal dengan penandatanganan **Plakat Panjang** antara Sultan Bima dengan Pemerintah Hindia Belanda yang berisi 37 pasal.

Nusa Tenggara Barat juga dibentuk dalam tradisi dan suasana kebatinan Indonesia sebagai bangsa pejuang. **Perang Undru** di Taliwang Sumbawa tahun 1906, **Perang Baham** di Lunyuk Sumbawa tahun 1907, Perang Dena Bima tahun 1907, **Perang Donggo Bima** tahun 1907 – 1909, dan **Perang Ngali Bima** tahun 1908 adalah bukti bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah bangsa pejuang dalam mempertahankan kaulatan.

Nusa Tenggara Barat selain mempunyai peran penting dalam lintasan sejarah Indonesia, juga memiliki latar budaya dan adat istiadat yang mengakar pada tradisi Islami. Pendidikan dengan latar belakang budaya dan tradisi Islam sudah mulai berkembang sejak pada masa pemerintahan **Raja Abdul Kahir** (1620–1640) dan dikenal sebagai Sultan Bima I. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi kerajaan, dan dianut oleh masyarakat tidak hanya di Bima tetapi juga di seluruh Nusa Tenggara Barat. Walaupun demikian, tradisi kehidupan bergotong royong antar umat beragama dapat terlihat harmonis di Nusa Tenggara Barat.

Letak geografis Nusa Tenggara Barat yang berada antara pulau Bali dan perairan Lautan Indonesia memiliki alam yang menakjubkan menjadikan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu aset bangsa Indonesia dan menjadi tujuan wisata budaya unggulan selain Bali.

Pengungkapan sejarah Nusa Tenggara Barat dengan memperlihatkan fakta dan data yang terekam dalam arsip adalah merupakan tugas mulia yang bertujuan mengukuhkan kembali kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu tujuan dari program **Citra Daerah** yang sekarang sedang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadikan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2006

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul_____	i
Sambutan Kepala ANRI_____	ii
Daftar Isi_____	vi
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	1
B. Letak Geografis _____	5
C. Periode Kerajaan_____	6
D. Periode Awal Perkembangan Islam_____	8
E. Periode Kolonialisme _____	9
F. Periode Perrgerakan Nasional_____	15
G. Periode Pendudukan Jepang_____	18
H. Periode Kemerdekaan RI _____	20
I. Nusa Tenggara Barat dalam Khasanah Arsip_____	24
J. Daftar Pustaka_____	27
CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP _____	28
A. Geografis_____	29
B. Pemerintahan_____	36
C. Politik_____	54
C. Perekonomian_____	73
D. Pendidikan_____	86
E. Kebudayaan_____	92
F. Transportasi_____	102
G. Pertanian_____	111
H. Bangunan_____	122
I. Bencana Alam_____	139
J. Panorama Alam_____	146
DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN _____	148
PENUTUP _____	165

Pendahuluan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjalanan Bangsa Indonesia bergerak dinamis seiring dengan tumbuhnya tata kehidupan dan sikap hidup baru dalam masyarakat. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia sedang menghadapi pengaruh globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas wilayah dan negara, yang dapat menjadi masalah krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi politik saat ini, telah menunjukkan kepada kita munculnya fenomena kebangsaan yaitu ditandai dengan mudarnya semangat kebangsaan dan identitas nasional. Bahkan, akhir-akhir ini telah berkembang menjadi persoalan konflik internal yang mengarah pada tahap disintegrasi bangsa. Situasi krisis ini bisa muncul karena kurangnya pemahaman yang obyektif akan peran Daerah dalam membangun pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penerapan kebijakan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi sosial bagi kehidupan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam

menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat secara konsisten melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penekanan pada perlunya profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Diperlukan berbagai sumber data akurat dan bukti-bukti yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yang salah satunya diperoleh melalui arsip.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi yang memiliki sejarah perjalanan panjang dan tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadi sebuah mata rantai sejarah lokal dengan karakteristik yang sangat kuat dalam ikut membentuk negara kebangsaan (*nation state*). Realita sejarah ini perlu diungkap kembali melalui rekonstruksi sejarah dengan memanfaatkan arsip sebagai sumber informasi utama.

Pengungkapan kehidupan Nusa Tenggara Barat pada masa lampau melalui arsip, pada hakekatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara optimal. Melalui arsip ini, kita dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan bangsa pada masa lampau, sebagai pelajaran berharga bagi perjalanan generasi yang akan datang.

Pengungkapan kehidupan Nusa Tenggara Barat pada masa lampau juga merupakan upaya nyata untuk membendung degradasi solidaritas dan rasa kebangsaan dalam masyarakat yang cenderung memprihatinkan. Hal itu akan tercapai apabila Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama belajar dari kegagalan masa lampau dan meningkatkan keberhasilan masing-masing. Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal akan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kemajuan daerahnya.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupaya berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah salah satunya melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu dengan menyerahkan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun kerja 2006 ini salah satu daerah yang menjadi sasaran program Citra Daerah ANRI adalah penyerahan Arsip Citra Daerah kepada Pemerintah Nusa Tenggara Barat.

Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip diharapkan dapat mengawali tumbuhnya kembali rasa kebangsaan. Melalui materi yang ditampilkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa NKRI yang dinikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI

perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintahan Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar pelestarian arsip statis di daerah terus berkembang pada masa-masa berikutnya.

Arsip Nusa Tenggara Barat yang diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 17 sampai dengan abad 20, yakni sejak zaman VOC, Hindia Belanda sampai dengan masa Republik tentang berbagai interaksi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat periode tersebut, yang diharapkan dapat menjadi stimulan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat memacu peningkatan upaya perluasan Khasanah arsip statis Propinsi Nusa Tenggara Barat.

B. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta pulau-pulau kecil di wilayah perairannya. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi 8° - 9°5' Lintang Selatan dan 115°45'-199°5' Bujur Timur. Ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram

Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Lombok di sebelah barat, dan Selat Sape di sebelah timur. Provinsi ini mempunyai daratan seluas 20.153,15 Km dan secara administratif mencakup 7 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumabawa Barat (hasil pemekaran wilayah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003) Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Sedangkan 2 kota adalah Kota Mataram dan Kota Bima.

Pada Masa Kolonial seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ini masuk dalam wilayah *Residentie van Timor en Onderhoorigheden* (Timor dan sekitarnya) yang Merupakan bagian dari wilayah *Gouvernement van de Groote Oost*). Menyusul Proklamasi Kemerdekaan RI, wilayah ini menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 19 Agustus 1945.

C. PERIODE KERAJAAN

Analisis yang dilakukan terhadap benda-benda prasejarah (purbakala) yang diketemukan (seperti nekara, kompleks lesung batu, kompleks sarkofagus, periuk berhias, golok, dan kapak), menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya telah dihuni oleh orang-orang yang berasal dari kawasan Asia

Tenggara. Penduduk asli di wilayah ini dinamakan **orang Sasak**, yang sebagian besar tinggal di Pulau Lombok. Sementara itu, di Pulau Sumbawa terdapat juga penduduk asli yang terdiri atas dua kelompok, yaitu **Suku Bangsa Sumbawa (*Samawa*)** dan Bima. Namun, dengan terjadinya gelombang pendatang dari Bali, Makassar, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara Timur, penduduk asli tersebut memasuki wilayah pertanian dan kemudian tinggal di pedalaman.

Keberadaan wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang menguasai semua kerajaan baik yang berada di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Dalam Kitab *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca tahun 1365, tertulis Lombok Barat bernama Lombok Mirah dan Lombok Timur bernama Sasak Adi, Taliwang, Dampo (Dompu), Sape, Sanghyang Api, Bhima (Bima), Seram (Seran) dan Hutan Kedali (Utan).

Kerajaan tertua di Provinsi Nusa Tenggara Barat bernama *Kerajaan Desa Lae* yang terletak di Desa Lae. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan tersebut pada akhirnya terpecah-pecah menyusul dengan meletusnya Gunung Rinjani yang menyebabkan penduduk di kerajaan tersebut menyebar ke seluruh Pulau Lombok. Setelah peristiwa tersebut muncullah kerajaan-kerajaan baru yaitu *Kerajaan Suwung*, yang dibangun oleh *Betara Indra*, Kerajaan Lombok dengan rajanya

Raden Mapahit dan *Kerajaan Perigi* dengan rajanya *Prabu Inopati*. Sementara itu, di Pulau Sumbawa juga berdiri *Kerajaan Dompus* yang diperintah *Prabu Dadelata* disamping kerajaan-kerajaan Utan, Seran, Bima, Tambora, Sanggar, dan Papekat.

Runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15, memberikan kesempatan bagi kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk berdiri sendiri. Kerajaan Bima dengan rajanya bernama **Ruma Mawaa (Sang Aji Bima)** dan Kerajaan Sumba dengan rajanya bernama **Raja Sumba** yang bergelar *Hanggula Ratu Jawa* merupakan dua kerajaan besar di wilayah Nusa Tenggara Barat diantara 7 (tujuh) kerajaan yang ada yang kemudian mandiri dari Majapahit.

D. PERIODE AWAL PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

Pada awal pemerintahan raja-raja di Nusa Tenggara Barat, pengaruh Agama Hindu sangat kuat. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ekspansi Kerajaan Majapahit ke wilayah itu. Namun dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit menjadikan pengaruh Agama Hindu mulai berkurang seiring dengan mulainya pengaruh Agama Islam di kalangan masyarakat pesisir. Munculnya Kerajaan Demak di Jawa Tengah membawa pengaruh besar pada meluasnya ajaran Agama Islam

di Nusa Tenggara Barat. Pengaruh Agama Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat ini pada umumnya dibawa oleh orang Melayu.

Pengaruh Agama Islam di Bima ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan **Raja I Maliingkaang Daeng-Mannyonriq** (1570–1636) dari Makassar, yang kemudian dikenal dengan nama **Karaeng Matoaya** yang memegang peranan penting dalam penyebaran Agama Islam di wilayah itu. Pengaruh Agama Islam dalam Kerajaan Bima ini mulai muncul sejak pemerintahan **Raja Manuru Sarehi** sekitar tahun 1605 dan mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan **Raja Abdul Kahir** (1620–1640).

Raja Abdul Kahir disebut juga sebagai Sultan Bima I, karena beliau adalah raja yang pertama kali yang memeluk Agama Islam di Bima, sehingga dianggap sebagai pemisah dengan raja Bima sebelumnya yang menganut Agama Hindu. **Agama Islam kemudian menjadi agama resmi raja-raja di Nusa Tenggara Barat.**

E. PERIODE KOLONIAL

Bangsa Eropa yang datang pertama kali ke tanah Nusa Tenggara adalah Portugis yang mendarat di Pulau Solor dan Timor tahun 1605. Pada saat yang sama bangsa Belanda juga datang ke Pulau Hitu dan Ambon di Maluku, dan akhirnya *Ter Ver* kapal Belanda pertama juga berlabuh di Kupang tahun 1611. Kedatangan bangsa Belanda mengakibatkan perselisihan

yang panjang antara bangsa Portugis dan Belanda di Nusa Tenggara. Bangsa Belanda memberikan bantuan kepada raja-raja lokal yang memberontak kepada bangsa Portugis. Belanda kemudian memperluas pengaruhnya di Nusa Tenggara, dengan melakukan berbagai perjanjian dengan raja-raja kecil di sekitar Pulau Sumbawa.

Penetrasi pemerintahan Kolonial Belanda yang begitu kuat di Indonesia semakin lama semakin membawa dampak nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu akibat yang sangat luas, di bagian Timur Indonesia adalah surutnya supremasi kekuasaan ***Kerajaan Gowa*** di Makassar pada akhir abad ke-17. Kaum bangsawan Gowa yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Kolonial menyingkir dari Makassar dan membangun kantong-kantong perlawanan di Nusa Tenggara Barat. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, pemerintah Kolonial mulai mengkonsentrasikan kekuasaan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hal ini diperkuat lagi dengan munculnya Lombok sebagai lalu lintas perdagangan internasional, sehingga keinginan Belanda untuk menguasai Nusa Tenggara Barat secara langsung semakin nyata.

Menghadapi situasi yang demikian itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengutus ***Stephen van Hegen*** untuk melihat dari dekat situasi di Bima tahun 1660. Kedatangan orang Belanda tersebut mempengaruhi keadaan politik dan ekonomi di daerah ini. Pada tahun 1669, Kerajaan Bima dibawah

Pemerintahan **Sultan Ambela Abdul Khair Sirajuddin** (1640–1682), atau Sultan Bima ke-2, mengadakan ikatan perdamaian dan persahabatan dengan Pemerintah Kolonial isinya antara lain berisi :

1. Kesultanan Bima dan Dompu tidak akan menyerang Makassar;
2. Untuk mempertahankan perdamaian, hanya anggota Kompeni yang boleh mengunjungi wilayah Bima;
3. Bima dan Makassar tidak akan mengadakan kontak sama sekali;
4. Para pedagang asing dari Eropa, India, Jawa, Malaya, Arab, Aceh, dan Champa tidak boleh mengadakan perdagangan dengan Bima, kecuali mendapat ijin khusus dari Kompeni;
5. Apabila hendak melakukan penyebaran Agama Kristen harus minta ijin kepada Kesultanan Bima dan Dompu.

Dengan perjanjian tersebut Sultan Bima dan Dompu harus mengakui keberadaan Kolonial Belanda. Sejak saat itu, Belanda berusaha mengkonsolidasi pengawasannya dengan cara memblokir pelabuhan Bima untuk mencegah datangnya bantuan dari Makassar atau dari negara asing lainnya. Usaha itu dilakukan agar pelabuhan yang berada di Bima dan juga di Pulau Lombok yang dianggap strategis tidak jatuh ke tangan Inggris.

Supremasi kekuasaan Belanda yang sangat kuat tersebut, menyebabkan raja dan masyarakat di wilayah tersebut tidak

dapat leluasa bergerak. Keadaan itu menjadi lebih parah lagi dengan meletusnya Gunung Tambora pada 5 April 1815, yang menggoncangkan seluruh kawasan tersebut dan akibatnya bisa dirasakan di seluruh Maluku, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Meletusnya gunung Tambora ini mengakibatkan lenyapnya dua kerajaan, yaitu Tambora dan Papekat. Lebih dari 10.000 orang tewas. Lenyapnya kedua kerajaan tersebut yang bersamaan dengan hancurnya lingkungan di sekitarnya berakibat pula pada kehancuran pranata sosial, penderitaan, dan kemiskinan masyarakat secara umum yang berkepanjangan.

Dalam rangka memperbaiki keadaan tersebut, Sultan Bima ke-11, **Sultan Abdullah** (1854–1868), mengakui eksistensi pemerintahan Belanda secara formal pada tanggal 19 Nopember 1857, melalui sebuah Perjanjian **Plakat Panjang**. Demikian juga dengan raja-raja di Sumbawa. Walaupun masih dapat menjalankan pemerintahan, tetapi kedaulatan dan kedudukan para raja serta perangkat pemerintahannya tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Segala keputusan yang akan dijalankan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wakil Pemerintah Belanda di wilayah tersebut.

Perjanjian Plakat Panjang tersebut berisi tiga hal penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kesultanan Bima ditetapkan sebagai bagian dari Hindia Belanda;

2. Dilarang mempunyai hubungan dengan kekuasaan asing lainnya tanpa ijin Pemerintah Hindia Belanda;
3. Pihak Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangan atas pajak dan memikul semua hak dan kewajiban pemerintahan.

Pada akhir abad ke-19 Pemerintah Kolonial Belanda memasukkan ***Residentie Timor en Onderhoorigheden*** (Karesidenan Timor dan sekitarnya) dan ***Residentie Celebes en Onderhoorig-heden*** (Karesidenan Sulawesi dan sekitarnya) ke dalam satu wilayah yang disebut ***De Gouvernement van Groote Oost*** (Pemerintahan Timur Besar). Pada waktu itu, ***Residentie van Timor en Onderhoorigheden*** terdiri atas Timor, Flores dan Sumba. Sedangkan Sumbawa masuk ke dalam wilayah ***Residentie Celebes en Onderhoorigheden***. Sementara itu Lombok masuk ke dalam wilayah ***Residentie Bali en Lombok*** (Karesidenan Bali dan Lombok). Hal itu terjadi, ketika perlawanan masyarakat dan Kerajaan Mataram di Lombok dapat diredakan Belanda tahun 1894.

Setelah perang selesai Belanda menetapkan suatu bentuk pemerintahan yang baru di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan ***Staatsblad*** No. 181 Tahun 1895, tanggal 31 Agustus 1895, Pulau Lombok dijadikan satu wilayah ***afdeling*** tersendiri ibukotanya Ampenan. Dalam perkembangannya disebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal No. 19

tanggal 27 Agustus 1898, Lombok dibagi menjadi tiga *onderafdeling*, yaitu Lombok Barat, Tengah dan Timur.

Pada tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Decentralisatiewet* (Undang-Undang Desentralisasi) yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Pada saat pembagian wilayah administratif di Nusa Tenggara Barat berlangsung, muncul gerakan-gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di wilayah itu. Perlawanan rakyat itu merupakan reaksi terhadap kehendak Belanda yang memaksakan rakyat untuk membayar pajak yang sangat membebani rakyat. Pada akhirnya terjadilah perang antara pihak rakyat setempat dengan Belanda. Adapun peperangan yang pernah dikobarkan rakyat di wilayah tersebut adalah **Perang Undru** di Taliwang Sumbawa tahun 1906, **Perang Baham** di Lunyuk Sumbawa tahun 1907, Perang Dena Bima tahun 1907, **Perang Donggo Bima** tahun 1907 – 1909, dan **Perang Ngali Bima** tahun 1908. Namun demikian, perlawanan-perlawanan rakyat yang tidak seimbang tersebut berhasil dipatahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan persenjataannya yang lebih lengkap.

Keberhasilan aksi militer yang dilancarkan di wilayah tersebut, menyebabkan Sumbawa pada tahun 1909 dimasukkan ke dalam *Residentie Timor en Onderhoorigheden*. Berdasarkan **Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda**

No. 48 Tahun 1909, tanggal 11 Februari 1909 sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1909 dalam *Besluit* tersebut dinyatakan bahwa Pulau Sumbawa dan bagian Barat Flores (Manggarai) yang masuk dalam *Afdeling* Bima dipisahkan dari *Residentie Celebes en Onderhoorigheden* dan menjadi bagian dari *Residentie Timor en Onderhoorigheden*. Perjanjian ini ditandatangani di Bima oleh *Bestuurder* Bima, Ibrahim dan pihak Belanda, **Alexander Johan Baron Quarles de Quarles**. Disamping itu, **Alexander Johan Baron Quarles de Quarles** menandatangani juga perjanjian di Sumbawa dengan *Bestuurde* Sumbawa, **Mohammad Djalaloeddin**. Sementara itu, di Dompu dilaksanakan perjanjian pula antara *Gezaghebber* sipil dari Bima **Albert Adolf Banse** dengan *Bestuurde* Dompu **Siradjoeddin**.

Dengan perjanjian tersebut *Residentie van Timor en Onderhoorigheden* terdiri atas tiga *Afdeling*, yaitu *Afdeling* Timor dan pulau sekitarnya, *Afdeling* Bima, *Afdeling* Sumba dan *Afdeling* Flores. Ketiga *Afdeling* terdiri atas lima belas *onderafdeling* yang tersebar di banyak pulau. Otoritas di pulau-pulau itu dipegang oleh pemimpin lokal, yang bergelar Radja.

F. PERIODE PERGERAKAN NASIONAL

Perkembangan organisasi politik di Nusa Tenggara Barat bersamaan dengan perkembangan gerakan nasional di pulau

Jawa. Pada awal abad ke-20, di Jawa mulai terbentuk organisasi politik modern, yang membawa pengaruh sampai di Nusa Tenggara Barat. Gerakan Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 sebagai organisasi modern di masa itu, telah tumbuh dan berkembang dalam mempropagandakan tujuannya.

Pada tahun 1916, Pemerintah Kolonial Belanda membagi *Residentie Timor en Onderhoorigheden* menjadi lima *afdelingen*. Pembagian ini di dasarkan pada Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 331 Tahun 1916 Tgl. 13 April 1916. Adapun lima ***Afdelingen*** tersebut adalah :

1. *Afdeling* Timor Selatan dengan pulau-pulau disekitarnya;
2. *Afdeling* Timor Utara dan Tengah di bagi dalam lima *onderafdeling*;
3. *Afdeling* Flores dibagi dalam tujuh *onderafdeling*;
4. *Afdeling* Sumba dibagi dalam empat *onderafdeling*;
5. *Afdeling* Sumbawa dibagi dalam tiga *onderafdeling*.

Sementara itu, upaya untuk mendirikan pergerakan nasional terus meningkat. Keadaan ini membuat **Raden Mas Soetatmo** dan **Prang Wedono** dengan ide pendirian Cabang Budi Utomo di Bali Selatan tahun 1918.

Tahun 1920, terjadi lagi perubahan pembagian wilayah Nusa Tenggara Barat, menjadi empat *afdelingen*, yaitu Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba, yang secara keseluruhan membawahi enam belas *onderafdeling*. Dengan pembaharuan tersebut, kedudukan *Asisten Residen Afdeling* Timor berada di

Kupang, Flores di Ende, Sumbawa di Bima dan Sumba di Waingapu.

Dalam konferensi Budi Utomo Cabang Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Pebruari 1922, dibahas mengenai gagasan sebuah persatuan daerah Kepulauan Sunda Kecil dengan Bali dan Lombok. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu karena dihalangi oleh Residen Bali, yang secara tersirat menghalangi pengaruh kaum nasionalis dan memisahkan Bali dari Jawa.

Tahun 1936, di Bima terbentuk perkumpulan **Angkatan Demokrasi Loehoer (ADIL)** yang dipimpin oleh **Moehammad Noer Soelaiman**. Tujuan organisasi ini adalah penghapusan kelas dan perbedaan lapisan dalam masyarakat Bima dan pendirian masyarakat bernegara berdasarkan asas demokrasi.

Tahun 1937 di Bima dibentuk pula Cabang Muhammadiyah yang dipelopori oleh Idris **M. Jafar, A.D. Talu** dan **M. Hasan**. Organisasi ini berhubungan erat dengan Muhammadiyah di Yogyakarta, dengan fokus perhatian pada usaha-usaha pendidikan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan dari organisasi Muhammadiyah, tahun 1938 di Bima dibentuk **Perhimpunan Islam Bima (PIB)** yang dipelopori oleh **H. Sulaiman** dan **H. Usman Abidin**. Dalam perkembangannya, organisasi tersebut kemudian berintegrasi ke dalam **Nahdlatul Ulama (NU)** Cabang Bima. Organisasi ini

merupakan Cabang dari NU yang didirikan oleh **Kyai Haji Wahab Chasbullah** dengan dukungan **Kyai Haji Hasjim Asjari**, dengan tujuan untuk membela kaum muslimin tradisional.

G. PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itulah Jepang mulai masuk ke Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan pelatihan pemuda dengan dikerahkannya para pemuda untuk menjadi ***Seinendan***, ***Keibodan*** dan ***Heiho*** pada tanggal 17 Juli 1942. Hal ini dilakukan oleh Jepang untuk keperluan pertahanan dan keamanan dalam menghadapi tentara Sekutu yang mulai menyerang wilayah Nusa Tenggara Barat sekitar bulan April 1943 di bawah pimpinan serdadu Australia. Disamping itu, rakyat setempat dikerahkan sebagai ***romusha*** di pusat-pusat pembangunan pertahanan Jepang dengan dalih untuk memenangkan ***Perang Asia Timur Raya***, dan di perusahaan pemintalan dalam rangka menggiatkan produksi kapas. Semua itu dijalani oleh rakyat dengan keadaan terpaksa, karena mereka tidak ada jalan lain, kecuali bekerja sama dengan Jepang untuk membantu dalam **Perang Asia Timur Raya**.

Masuknya Jepang memacu keberanian rakyat untuk menyebarkan perlawanan kepada Belanda. Belanda mundur ke

Sumbawa Besar dan selanjutnya ke Lombok. Peperangan tersebut didukung oleh **Sultan Muhammad Salahuddin**, Raja ke-14 dari Kerajaan Bima. Selanjutnya, **Sultan Sumbawa, Mohammad Kaharoeddin**, memerintahkan untuk menangkapi sisa pasukan Belanda yang masih berada di Sumbawa. Mereka ditahan oleh Sultan Sumbawa dan diserahkan kepada tentara Jepang, yang selanjutnya membawa para tawanan ke Makassar.

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, wilayah administratif yang semula disebut *Afdeling* diubah namanya menjadi *Ken*. Karesidenan Timor dan daerah sekitarnya dimasukkan dalam *Syoo Sunda Syu* (Wilayah Sunda Kecil), yang diatur oleh *Minsefu Cokan* (Armada Selatan ke-2) di Singaraja, Bali, dan dibagi ke dalam empat *ken*, yaitu Timor Ken, Flores Ken, Sumba Ken dan Sumbawa Ken. Setiap *Ken* dipimpin oleh *Ken Kan Kanrikan*. Setiap Ken terdiri dari beberapa *Binken* (*onderafdeling*) yang dipimpin oleh *Bunken Kanrikan*, di bawahnya adalah *Gunco* atau *Soco*, yang kebanyakan adalah raja.

Pada tahun 1944, Jepang merubah struktur administrasi pemerintahan di bagian Timur Hindia Belanda, dengan memisahkan Timor dan daerah sekitarnya dari *De Groote Oost* untuk dibentuk menjadi wilayah sendiri yaitu **Provinsi Sunda Kecil**. Dengan demikian wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi bagian dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil.

Upaya pertahanan dan keamanan terhadap tentara sekutu tersebut tidak banyak berarti, karena pada tahun 1945, Angkatan Udara Australia mengebom instalasi-instalasi militer Jepang di Bima. Di samping itu, mereka juga menyebarkan pamflet dalam bahasa Melayu dan Inggris yang isinya ingin menegakkan kembali pemerintahan Sultan Bima di wilayah Timur Hindia Belanda.

Dalam peperangan melawan Tentara Sekutu, Jepang banyak mengalami kekalahan. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, membuat Jepang bertekuk lutut dan menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Soekarno–Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

H. PERIODE KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Penataan administrasi wilayah Indonesia mulai dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan RI, dengan membentuk delapan provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil. Pada setiap provinsi diangkatlah seorang gubernur untuk memimpin masing-masing wilayah Provinsi. Untuk Provinsi Kepulauan Sunda Kecil diangkatlah **Mr. I Goesti Ketut Poedja** sebagai Gubernur pertama. Walaupun pengangkatan seorang Gubernur di Provinsi Sunda Kecil telah

dilakukan dan Sultan Sumbawa menyatakan tetap bersimpati kepada Republik Indonesia, serta di Bima para pendukung kemerdekaan berkumpul dan menyatakan bersumpah setia kepada cita-cita kebangsaan, namun Belanda tidak mau menerima kenyataan dan tetap menyatakan bahwa wilayah tersebut masih dalam kekuasaannya.

Keinginan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di bagian Timur Hindia Belanda menyebabkan munculnya konflik di mana-mana. Karena konflik yang berkepanjangan akhirnya diputuskan untuk menyelenggarakan **Konferensi Malino** tanggal 15 – 25 Juli 1946 yang dihadiri Wakil Nasionalis dari Sumbawa, **Muhammad Kaharoeddin** (Sultan Sumbawa), **Muhammad Salahoeddin** (Sultan Bima) **Oemboe Toenggoe Bili** (*Zelfbestuurder* dari Memboro/Sumba), **J. Th. Ximenes de Silva** (*Zelfbestuurder* dari Sikka/Flores), **Bapa Kajah** dari Endeh, **H.A. Koroh** (*zelfbestuurder* dari Amarasi/Timor dan **Doko** dari Timor. Dalam **Konferensi Malino** tersebut diputuskan pemimpin tradisional (raja) dan Pemerintah Belanda berusaha menyatukan Residentie Timor dan daerah sekitarnya dengan Bali, Lombok dan Pulau Selatan Daya. Disamping itu, Pemerintah Belanda menyatakan bahwa Kepulauan Sunda Kecil akan digabungkan dengan Timur Besar untuk membentuk satu atau lebih federasi yang dapat dipimpin Kepulauan Sunda Kecil.

Oleh karena belum ditemukannya kesepakatan dalam **Konferensi Malino**, selanjutnya dilaksanakan **Konferensi**

Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946. Konferensi ini dituntut untuk mengesahkan Undang-undang yang menyetujui **Perjanjian Linggarjati** yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1946, yang di dalamnya diletakkan dasar pembentukan **Negara Timur Besar**. Para wakil dari Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa menuntut penggabungan ke dalam satu daerah administrasi. Mereka sepakat dengan sultan yang lain (dari Bima dan Dompu) untuk menggabungkan diri dalam satu wilayah otonom dan dalam Negara Timur Besar yang memiliki hubungan federal dengan **Negara Indonesia Serikat (NIS)**. Dalam Konferensi Denpasar dijelaskan bahwa daerah ini untuk sementara diorganisir sebagai **Negara Indonesia Timur (NIT)**, yang semula bernama Negara Timur Besar yang didirikan pada 24 Desember 1946.

Berdasarkan hasil dari Konferensi Denpasar tersebut dan dikuatkan dengan *Staatsblad* No. 143 Tahun 1946, dinyatakan ada 13 daerah yang termasuk dalam **Negara Indonesia Timur**, yakni Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor, beserta pulau-pulau sekitarnya. Untuk daerah Sumbawa meliputi tiga *landschappen* yaitu, Bima, Dompu dan Sumbawa. Sedangkan Lombok merupakan *neolandschappen* berdasarkan *Staatsblad* No. 15 Tahun 1947.

Dengan terbentuknya **Negara Indonesia Timur**, wilayah Sunda Kecil termasuk di dalamnya Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu Negara bagian **Negara Indonesia Timur**. Keadaan ini berlangsung sampai dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan Piagam Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949. Namun dalam perkembangannya, para elite Timor dan sekitarnya pada awal tahun 1950 mengusulkan dan mendesak kepada Republik Indonesia (RI) untuk menyatukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Indonesia Timur NIT dengan RI. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewan raja-raja dan Dewan-dewan rakyat lainnya, partai-partai politik dan organisasi pergerakan di Sumbawa. Pada tanggal 9 Mei 1950 terbit pernyataan keluar dari **Negara Indonesia Timur** dan menggabungkan diri dengan Pemerintah RI. Demikian juga dengan Lombok yang menyatakan meleburkan diri dalam wilayah RI yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta.

Sesudah beberapa kali melaksanakan pembicaraan antar negara bagian dalam Pemerintah RIS, akhirnya dicapai kesepakatan tanggal 19 Mei 1950 untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status Provinsi Kepulauan Sunda Kecil diaktifkan kembali.

Pada tahun 1954 terbit Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954, yang merubah wilayah Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara yang dibagi ke dalam tiga daerah

Swatantra Tingkat I, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (Sumbawa dan Lombok) dan Nusa Tenggara Timur (Timor, Flores dan Sumba).

Tahun 1957 terjadi lagi perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 1 tahun 1957, yang membagi wilayah Nusa Tenggara menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi kabupaten yang masing-masing dilengkapi dengan parlemen (DPRGR) dan kepala daerah.

I. NUSA TENGGARA BARAT DALAM KHASANAH ARSIP

Materi arsip yang ditampilkan dalam *Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip* meliputi berbagai aspek yang menggambarkan Nusa Tenggara Barat dalam perjalanan sejarahnya sejak masa kerajaan hingga sesudah kemerdekaan.

Penjelasan **geografis** ditampilkan melalui arsip peta dari dinas topografi memperlihatkan Kota Ampenan, P. Lombok, P. Sumbawa dan Kepulauan Sunda Kecil pada tahun 1926, 1927, 1928 dan tahun 1942.

Arsip yang berkaitan dengan **pemerintahan** dapat dilihat dari arsip tekstual mulai dari suksesi di Kerajaan Bima, Sumbawa dan Dompu tahun 1701-1756 hingga pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dan pernyataan penggabungan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam bidang **politik** ditampilkan beberapa kontrak sebagian dalam Bahasa Melayu, Arab dan Bugis; pendirian partai dan kunjungan tokoh-tokoh ke Nusa Tenggara Barat.

Pemandangan suasana pasar, pemungutan pajak, kewajiban menabung, memberikan gambaran mengenai **perekonomian** pada saat itu.

Adat-istiadat dan kesenian dapat dilihat dari arsip foto yang memperlihatkan pakaian adat, tari-tarian Lombok dan Sumbawa.

Kekhasan Nusa Tenggara Barat dengan kudanya tampak dari arsip mengenai **transportasi** yang menampilkan kuda sebagai alat transportasi hingga pembukaan lapangan terbang dan musibah Kapal de Hercules tahun 1769.

Hasil **pertanian** seperti kedelai, kapas, kopra, bawang merah, semangka dan tembakau dari arsip tekstual maupun foto.

Bangunan seperti masjid, rumah penduduk, monumen, pintu air, jembatan hingga lumbung padi.

Bencana alam direkam dalam kutipan dokumen yang menggambarkan meletusnya Gunung Tambora tahun 1815 dan beberapa arsip foto yang menunjukkan kerusakan akibat gempa yang terjadi pada tahun 1910 dan 1954.

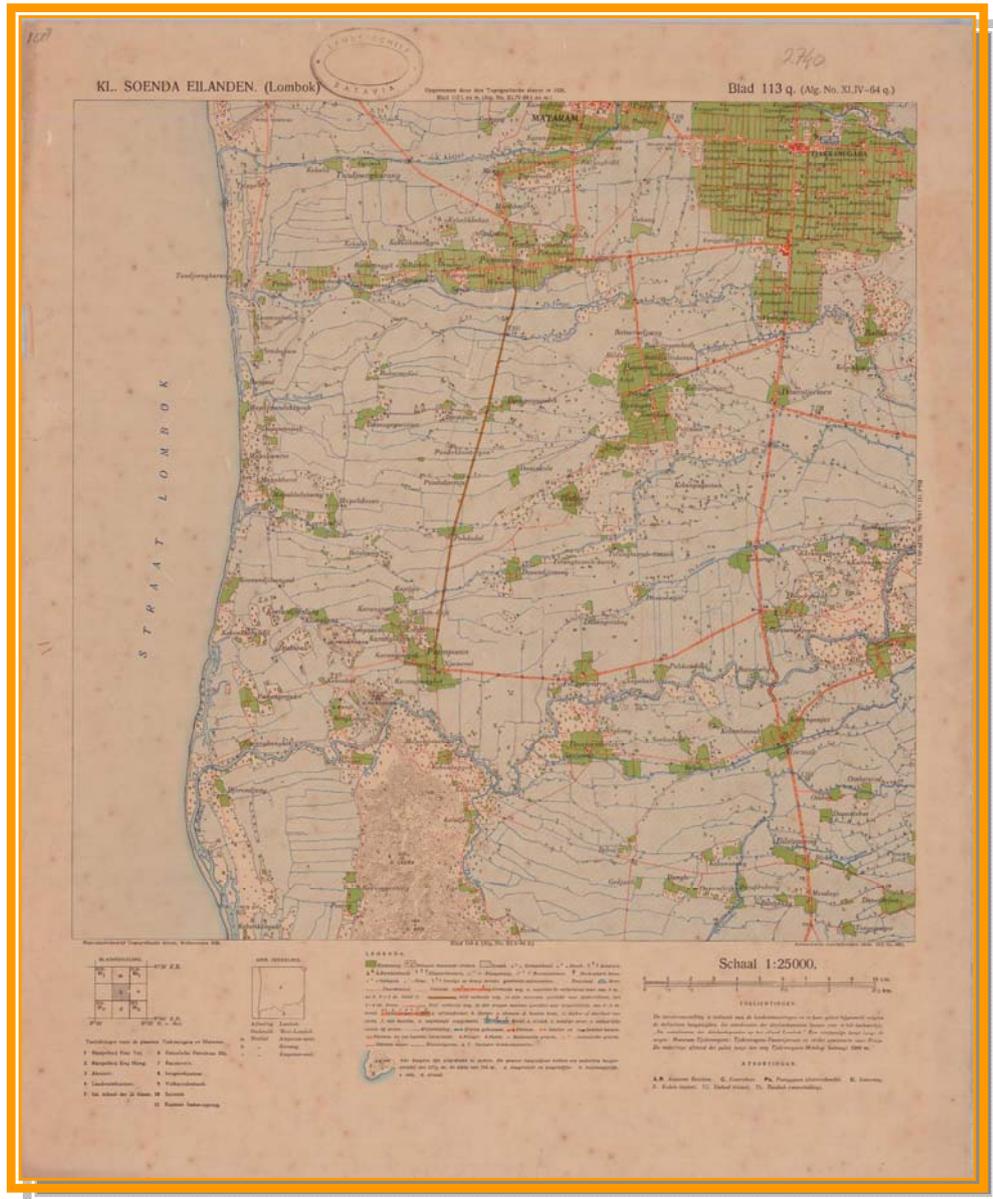
Selanjutnya arsip yang merekam keindahan **panorama alam** menutup rangkaian arsip yang ditampilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chambert-Loir, Henri. 2004. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Departemen Dalam Negeri. 2005. *Profil Provinsi Republik Indonesia: Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900: Dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: PT Gramedia.
- Marsono. 2005. *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: CV Eko Jaya.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Soejito, Irawan. 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Zuhdi, Susanto. 1997. *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

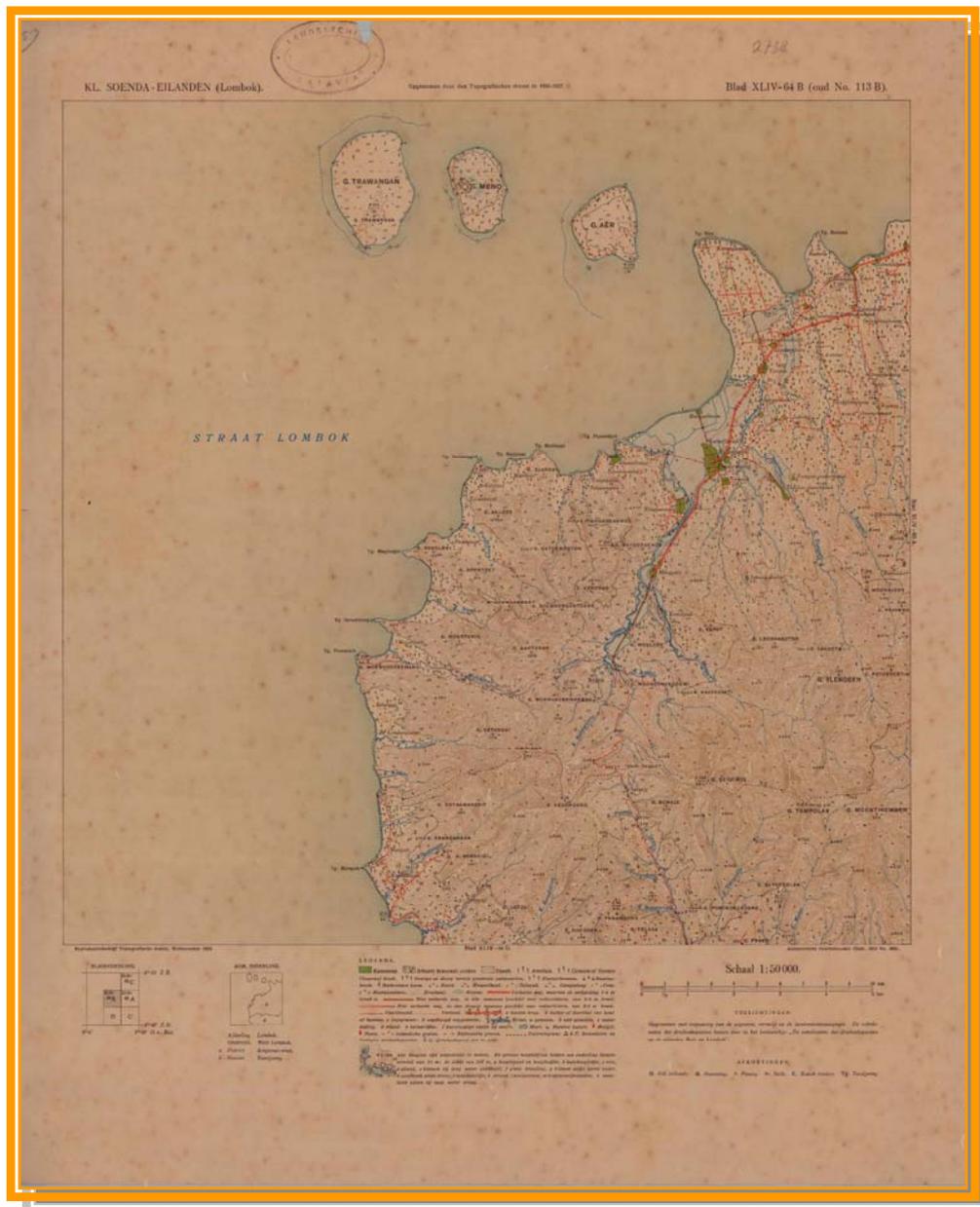
CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP

Geografis



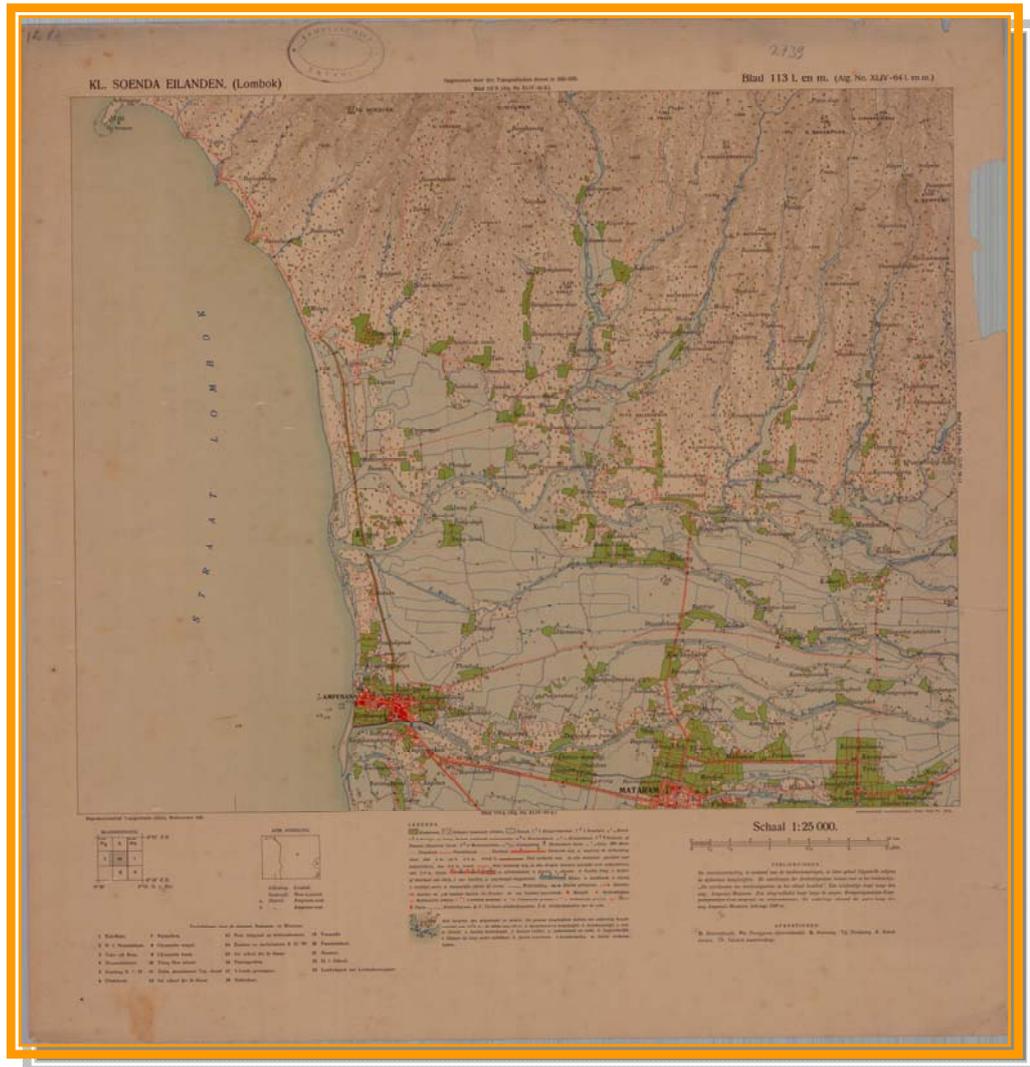
Ampenan, Mataram (*Kleine Sunda Eilanden*)
Lombok, Nusa Tenggara Barat,
1926.

ANRI : Topografi No.2740



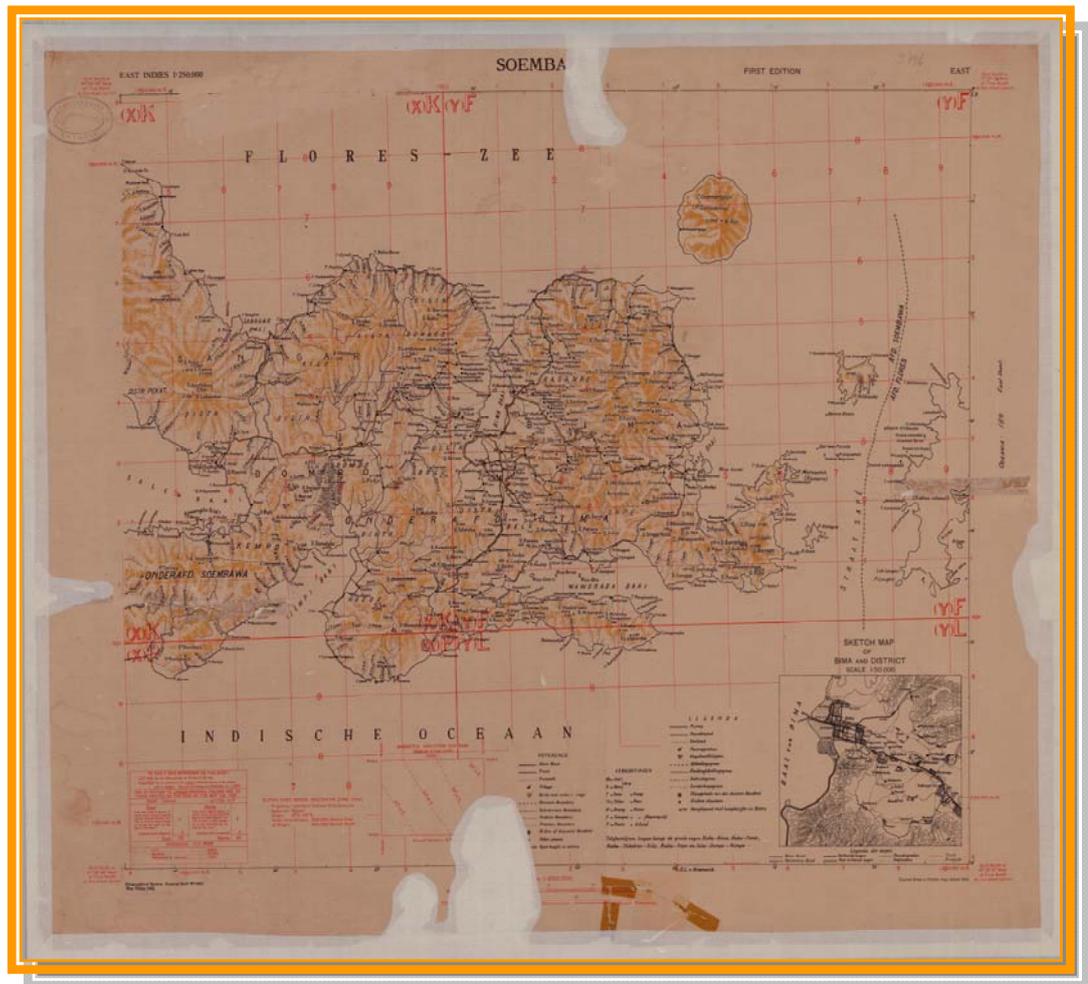
Peta ikhtisar Lombok yang termasuk bagian residensi Bali dan Lombok, 1927.

ANRI : Topografi No.2738



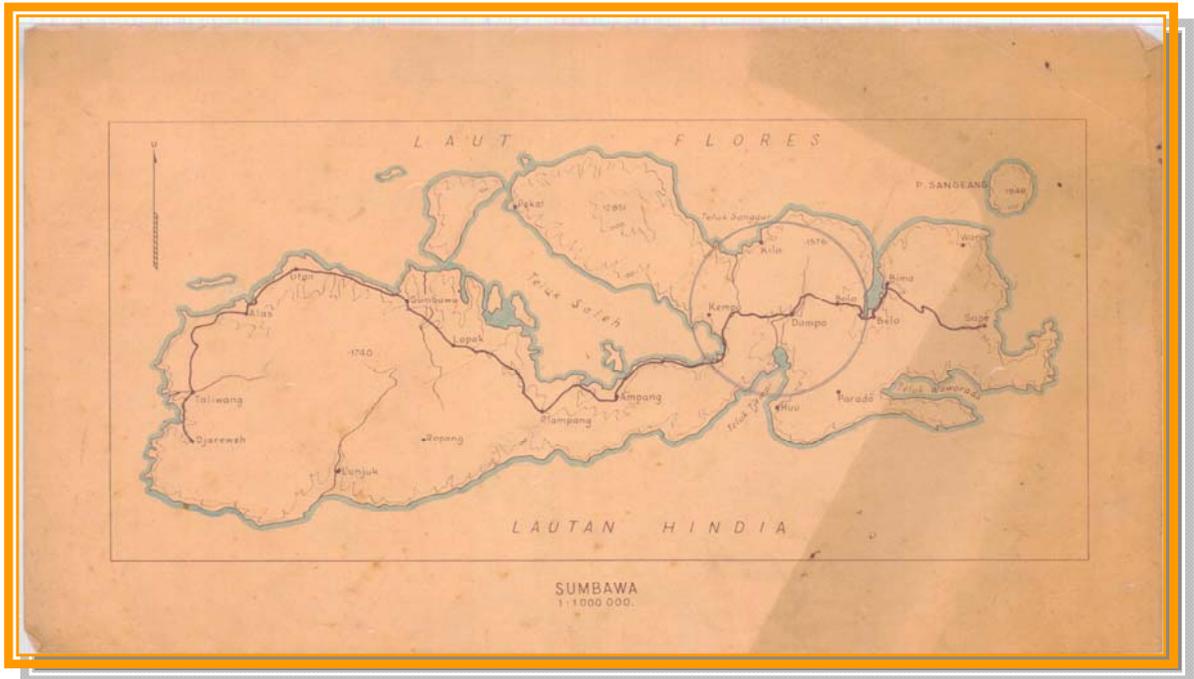
Pamonang, Telaga Wareng, Tjoepok, Dasanlontar, Menggala,
Gunung Trawangan, Gunung Weno, Gunung Aer
(Tjoepok Lombok, Nusa Tenggara Barat),
1928.

ANRI Topografi No. 2739

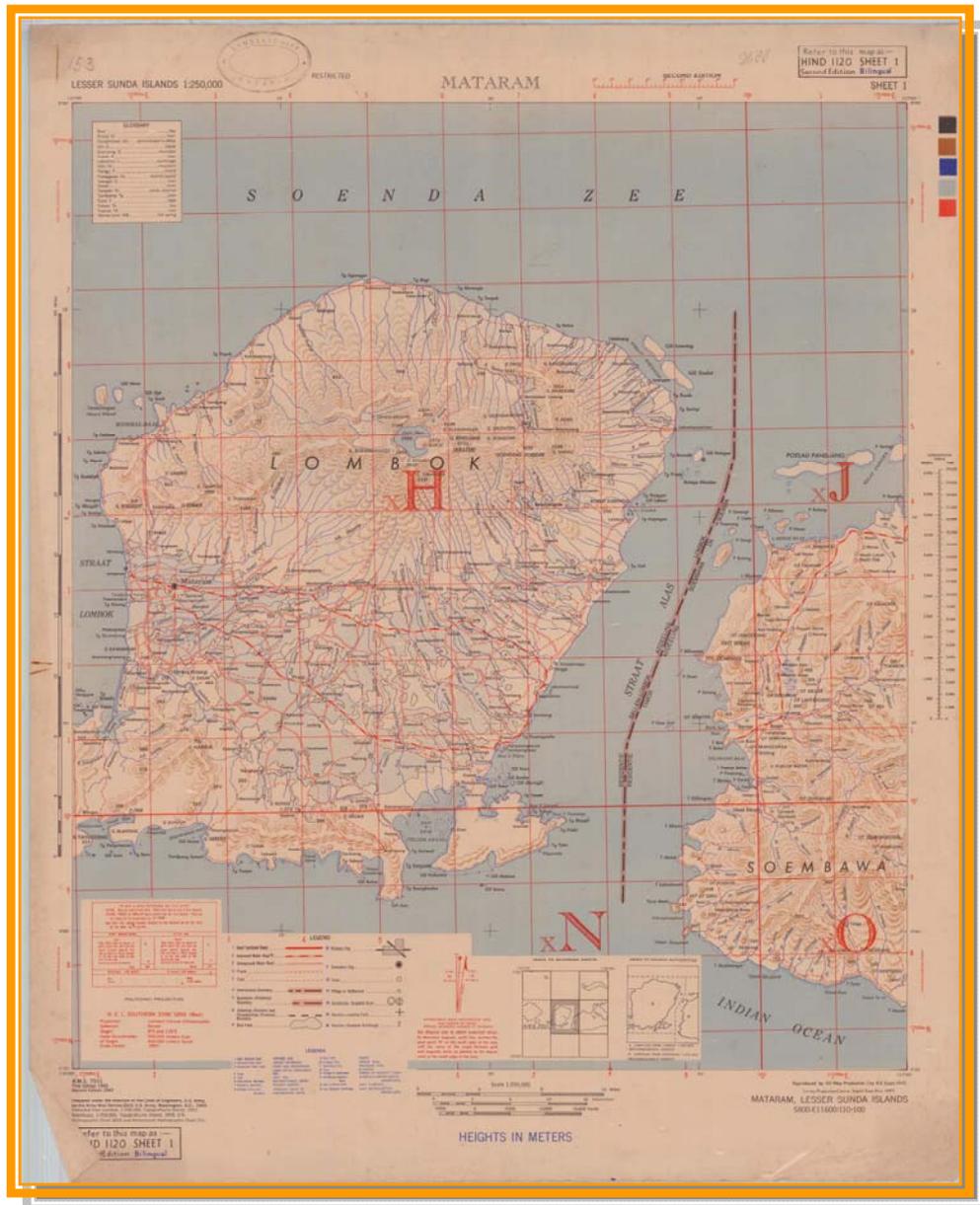


Soembawa Pulau Maya, *East Indies*
(Sumbawa, Nusa Tenggara Barat),
1942.

ANRI : Topografi No.2746



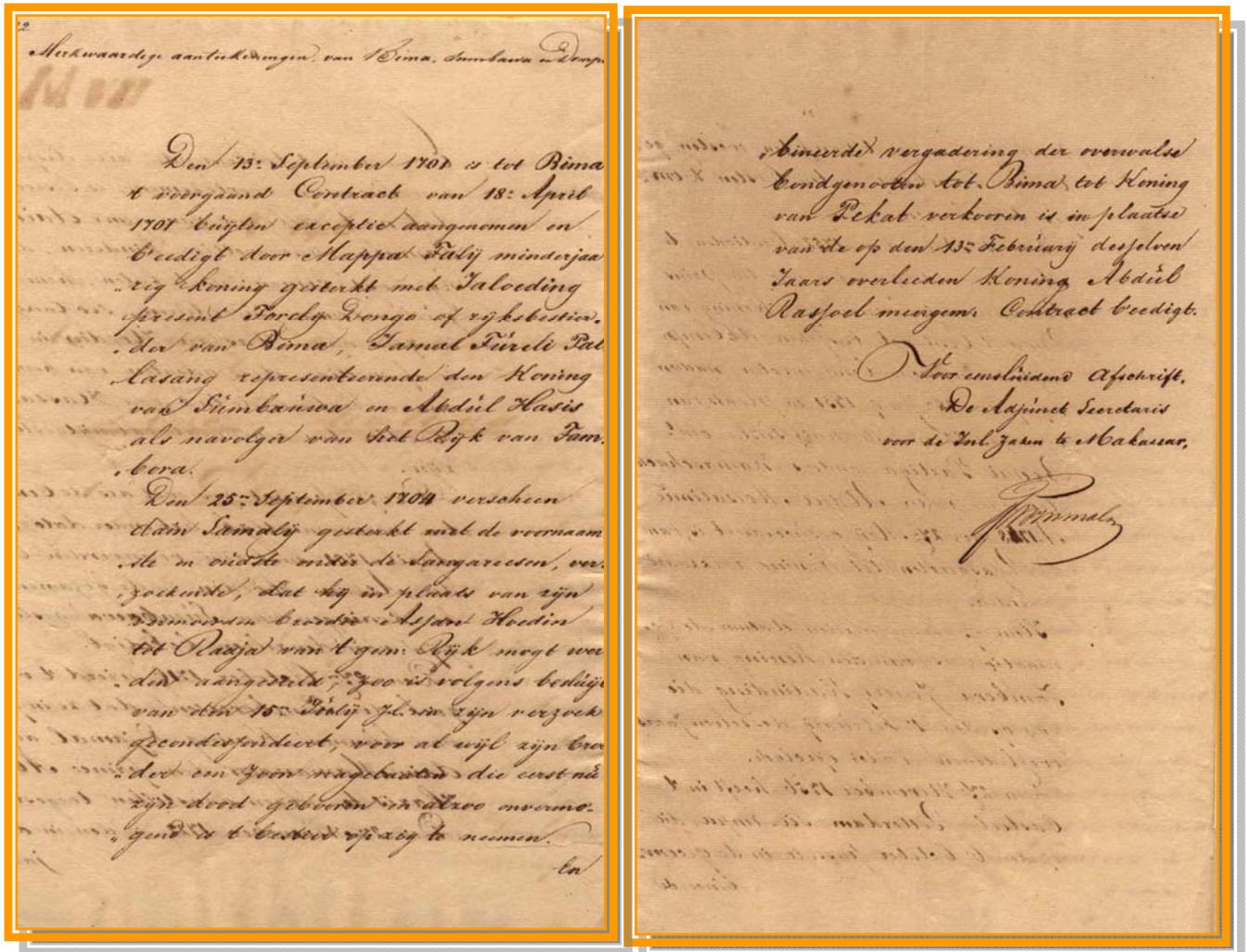
Soembawa,
1920
ANRI : M. Yamin 1013



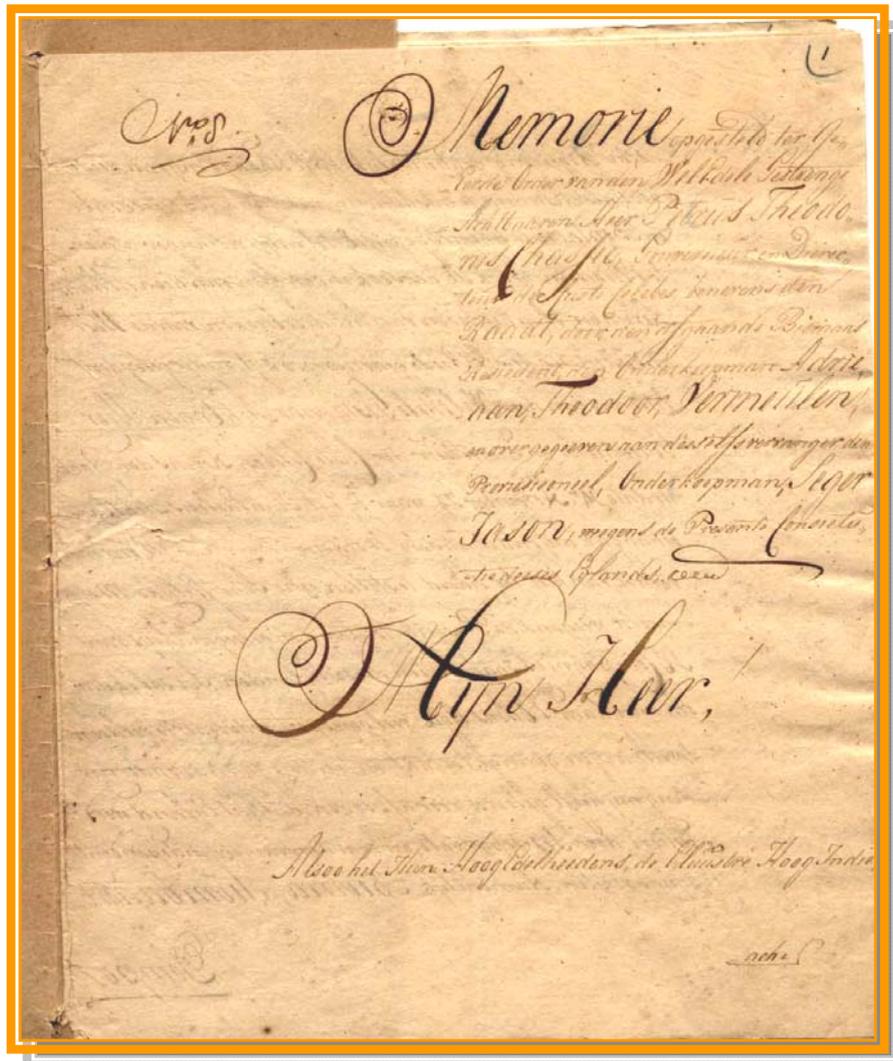
Kleine Soenda Eilanden (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur), 1945.

ANRI : Topografi No.2688

Pemerintahan

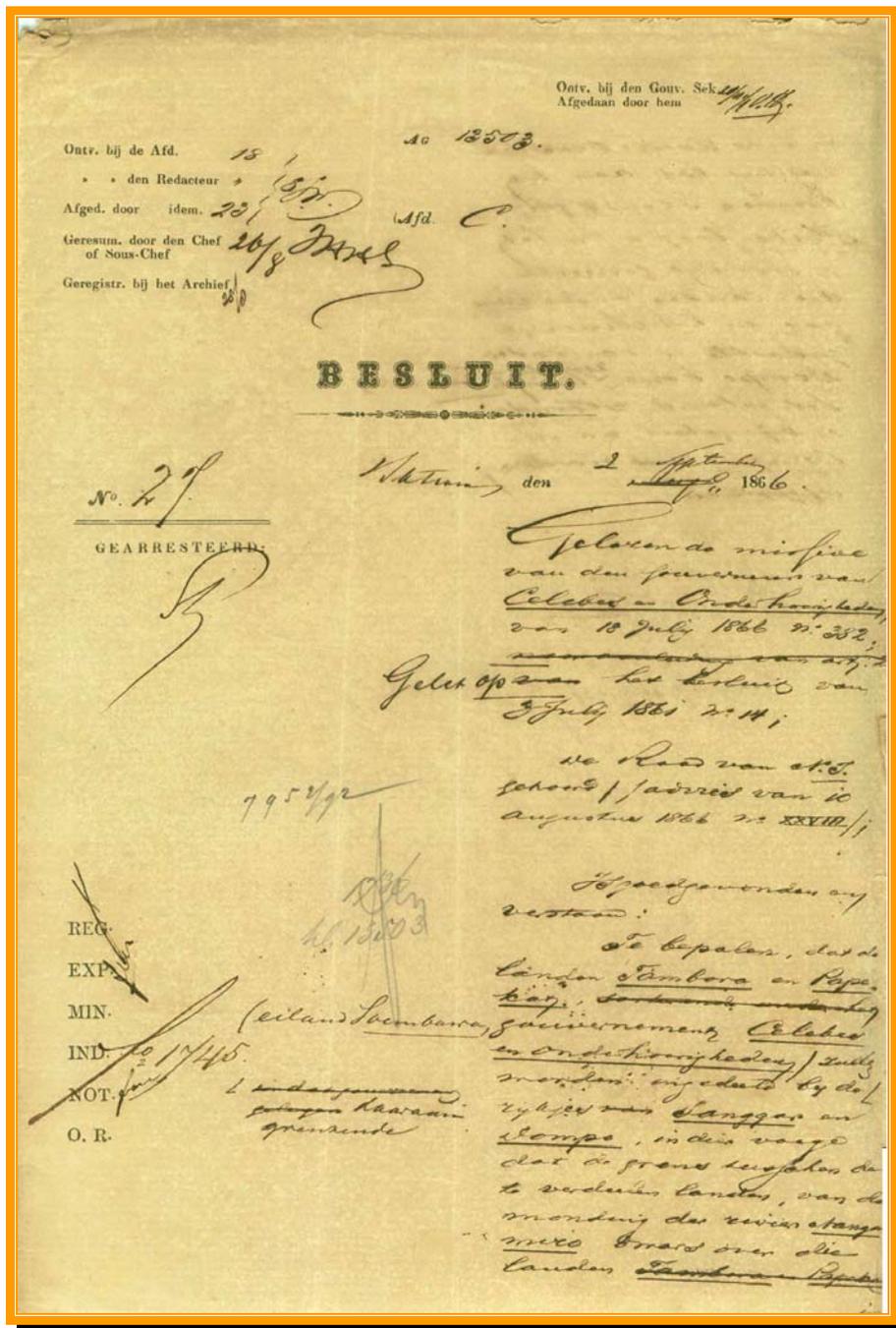


Catatan kejanggalan mengenai suksesi di kerajaan Bima,
Sumbawa dan Dompu,
13 September 1701
ANRI : Kontrak Dompu



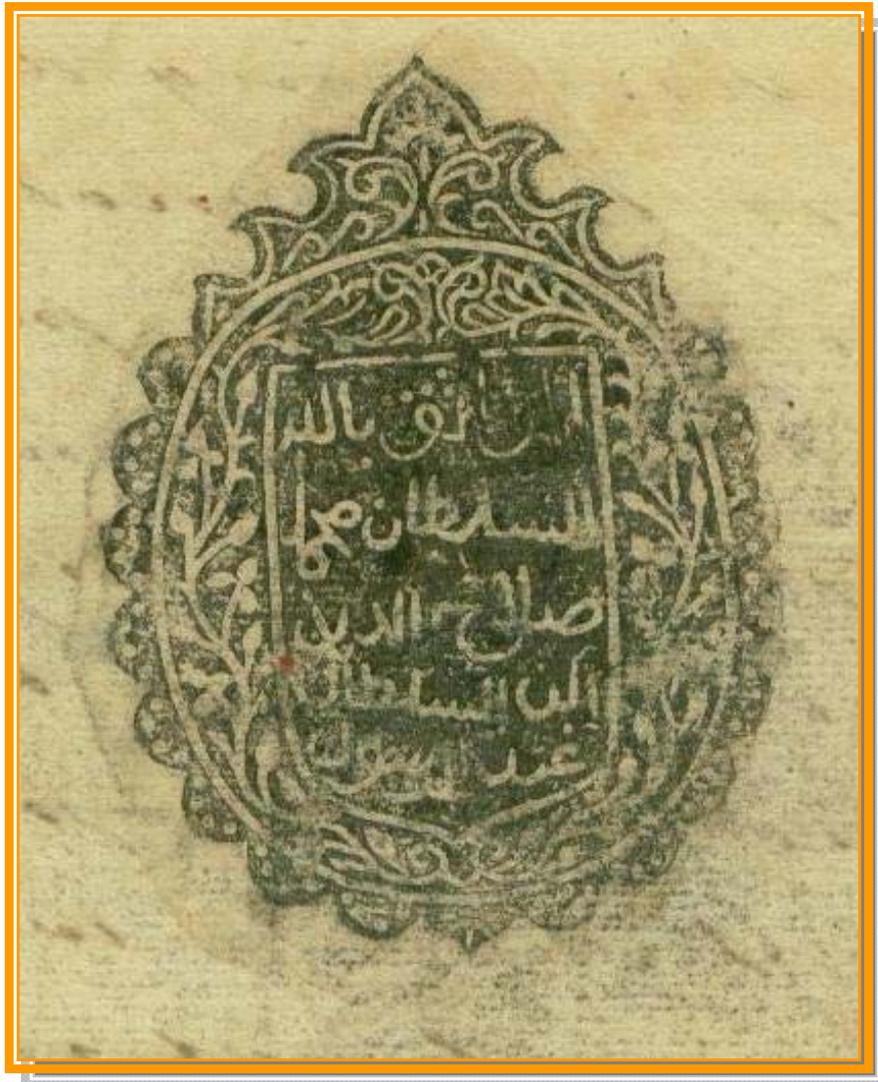
Bagian awal dari Memori serah terima Residensi Bima,
Vermarlen kepada Jason,
1801.

ANRI : Makasar No.376/1



Bagian awal dari Besluit Nomor 27 tanggal 2 September 1866 tentang Pembagian Wilayah Tambora dan Papekat menjadi kerajaan Sanggar dan Dompu

ANRI : Besluit 1866, Nomor 27



Stempel Kerajaan Bima
Masa Pemerintahan Sultan Salahudin,
Tahun 1800,
ANRI : BT 4 Mei 1851, No.15



Stempel Kerajaan Sangar Masa Pemerintahan
Sultan Yunus Muhammad Tahun 1850,
28 Desember 1850
ANRI : BT 28 Desember 1850



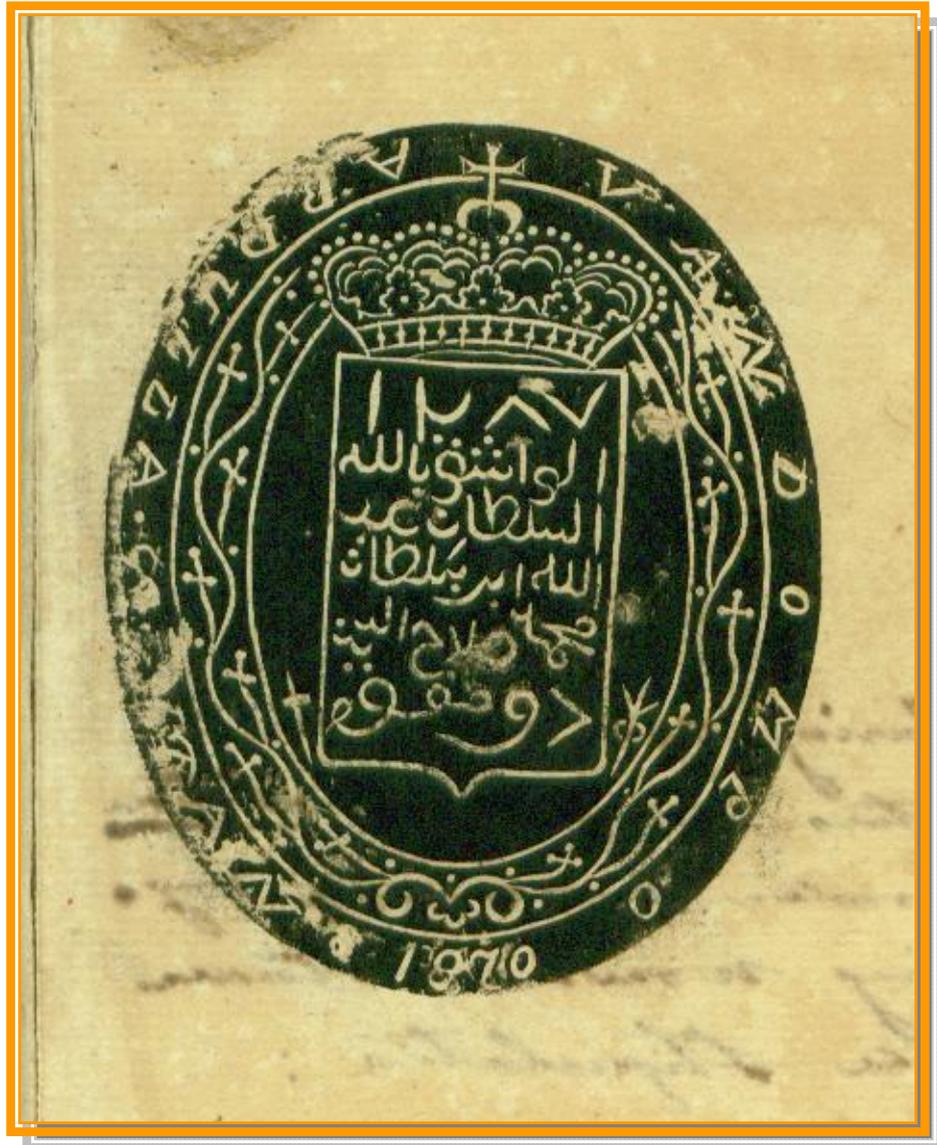
Stempel Kerajaan Sumbawa pada masa pemerintahan
Sultan Amaroellah, Tahun 1846,
4 Mei 1951

ANRI : BT 4 Mei 1851, No.15



Stempel Kerajaan Bima Masa Pemerintahan
Sultan Ismail (Jamaeel), Tahun 1817-1850,
4 Mei 1851

ANRI : Besluit , 1851, No. 15



Stempel Kerajaan Dompu Tahun 1870,
Masa Pemerintahan Sultan Abdullah.
12 Agustus 1871
ANRI : BT , 1871, No.22



Stempel Kerajaan Dompu
Masa Pemerintahan Sultan Moehamad Sirajoedin,
Tahun 1882,
ANRI : BT 28 April 1890, No.28

P. P. Bima

PENYERAHAN HAK DAERAH SUMBAWA

Pada tanggal 26 Maret 1949 tibalah saat yang sedjak beberapa bulan ditunggu-tunggu oleh ra'jat dan pemerintah dipulda Sumbawa, saat penyerahan dan penyerimaan hak Daerah.

Pagi-pagi hari itu ratusan murid sekolah dan pandu sudah berhimpun dilabuhan Sumbawa-Besar, menunggu turun para Utusan tinggi dari Makassar dengan kapal K.P.M. "KASIMBAR".

Kurang lebih djam 8 turunlah tamu2 agung jaitu P.J.M. Mr. S. Binol-Menteri Social yang untuk penyerahan itu mewakili Menteri Dalam Negeri, disertai Pt. Mr. Rickork pembesar pada Komenterian Dalam Negeri.

Tamu Agung itu disambut dengan lagu2 gembira sedjak turun didarat, lalu dari labuhan menuju kota kira2 4 km beroto perlahan-lahan karena diapit kiri-kanan muka belakang, oleh iring-iringan kehormatan dari murid2 sekolah dan pandu, yang terus-menerus membujikan lagu gembira terus-menerus sampai istana Sri Sultan Sumbawa, dimana sudah ditunggu oleh ribuan orang dari segala lapisan masyarakat datang dari seluruh kepulauan dengan tampak sorak kegembiraan. Setelah tamu agung itu tiba di istana dinantikan Wilhelms dan Indonesia Raja, kemudian mengasuh beberapa menit. Beberapa menit dimuka djam 10, saat penyerahan menurut rentjana, tibalah Pt. Residen Timor dengan oto dari Bima (beliau tiba lambat dengan kapal "BALANIPA" di Bima pada djam 10 malam lalu terus beroto sepanjang malam monempuh 256 k.m.).

Dalam suasana riang gembira istana yang besar dan indah dihiasi pula dengan halaman oleh polbagai hiasan padat dengan ra'jat, pada djam 10 tepat P.J.M. Mr. Binol bertindak memulai upacara penyerahan dimana setelah pertama Pt. Rickork membuat besluit penyerahan yang mengatakan bahwa seluruh hak Assisten-Residen diserahkan, ketjuali hak notaris dan pemberi keterangan pada luar negeri, berpidatolah P.J.M. Mr. Binol, Seri Sultan Bima Salahudin Kepala Daerah, Pt. Residen Timor Mr. Verhoof, Ketua Dewan Ra'jat Pt. Mochamad Hasan, berturut-turut, semuanya disambut dengan tepuk tangan gopak gompita sampai akhir. Sahabis segala undangan bersantap tengah hari di istana pada kira2 djam 2.30 berangkatlah para tamu agung P.J.M. Mr. Binol dengan mesin terbang pulak Makassar dan Pt. Mr. Rickork dengan kapal ke Lombok.

Pidato2 yang bersedjarah itu akan kami terbitkan selaku buku, tapi buat sementara dimuat sini semuanya supaya segera tersiar antara ra'jat.

H. B. V. L.



No. B.2.1/15/16. KUTIPAN dari daftar besluit2 Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur. -
Makassar, 18 Desember 1948. -

MENTERI URUSAN DALAM NEGERI,

Memperhatikan pasal 4 dari Besluit Penyerahan organisasi hukum negara dan tata usaha Indonesia Timur, demikian pula pasal 3 dari Ordonansi tertanggal 15 Februari 1946 (Staatsblad Hindia-Belanda 1946 No. 17);

Telah bermufakat dengan Dewan Radja2 di Sumbawa dan dengan Residen Kepulauan Timor;

M E N E T A P K A N :

Portama: Hak2 pekerdjaan dan tjampur tangap, yang menurut undang2 yang berlatu patut dilaksanakan oleh kepala dari afdoling Sumbawa, dipertanggung-gungkan pada Dewan Radja2 di Sumbawa, dengan mengotjualikan hak2, pekerdjaan dan tjampur tangan tentang

- a) memberikan keterangan2 kepada wakil2 konsuler negeri2 luaran,
- b) djabatan notaris.

Kodua: Pengeaksanaan sehari-hari dari hak2, pekerdjaan dan tjampur tangan tersebut pada pasal pertama dipertanggung-gungkan pada anggota dari Dewan Radja2 di Sumbawa, yang berdjani di Sumbawa Besar. -

Salinan besluit ini akan dikirimkan kepada: 1. P. J. M. Presiden Negara Indonesia Timur, 2. P. J. U. Ketua Badan Perwakilan Sementara N. I. T., 3. P. J. M. Perdana Menteri N. I. T., 4. Sekalian Menteri2 N. I. T., 5. Sekretaris Negara untuk Urusan Dalam Negeri di Djakarta, 6. Komisaris Mahkota untuk Indonesia Timur, 7. Residen Kepulauan Timor, 8. Dewan Radja2 Sumbawa di Sumbawa-Besar, 9. Assisten Residen Sumbawa di Sumbawa Besar, 10. Zelfbestuur2 Bima-Dompu dan Sumbawa.

Sesuai dengan bunji Daftar tersebut:

Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur,
t. d. t. Ido Anak Agung Gdo Agung. -

Kutipan besluit Menteri Urusan Dalam Negeri Negara
Indonesia Timur tentang penyerahan hak Daerah Sumbawa,
18 Desember 1948.

ANRI : Kerajaan Bima No. 592

- SALINAN -

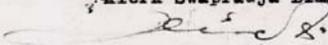
MA'LUMAT.

Kami, Sultan Keradjaan Bima, menjatakan dengan sepenuhnya, bahwa:

1. Pemerintahan Keradjaan Bima, adalah suatu Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia;
2. Kami menjatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah Pemerintahan Keradjaan Bima terletak ditangan kami dan oleh karena itu berhubung dengan suasana pada dewasa ini, maka kekuasaan2 jang sampai sekarang ini tidak ditangan kami, maka dengan sendirinja kembali ketangan kami;
3. Kami menjatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan Pemerintahan dalam lingkungan Keradjaan Bima bersifat langsung dengan Pusat Negara Republik Indonesia;
4. Kami memerintahkan dan pertjaja kepada sekalian penduduk dalam seluruh Keradjaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami jang ternjata diatas.-

B i m a, 22 November 1945.-
Seri Sultan Bima,
t. d. t. M. Salahuddin,

Untuk salinan jang sebunji:
Klerk Swapradja Bima,


(M. Ali Setaubé).-

Salinan maklumat Sultan Bima M. Salahuddin tentang pernyataan pemerintahan kerajaan Bima adalah Daerah Istimewa bagian dari negara Republik Indonesia, 22 November 1945.

ANRI : Kerajaan Bima No.M58

DAERAH PULAU SUMBAWA.
-----MTA-----

Sumbawa-Besar, 13 April 1950.

No. 2226/PS.

Lampiran: 1 + 1.

Pokok: Pernyataan (Statement) Bersama dari Swapradja2 Bima, Sumbawa dan Dompu untuk menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia.--

*Ummurukon.
Sesiatkan juga
buat Kony
P. J. H.
Utth. S. H.
Sesiatkan juga
Segit. 1/4
P. J. H.*

Bersama ini dengan segala hormat disampaikan:

satu lembar " PERNJATAAN (STATEMENT) BERSAMA DARI PEMERINTAH SWAPRADJA2 BIMA, SUMBAWA DAN DOMPU ", yang isinya menubut penggabungan ketiga daerah Swapradja ini kedalam Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnja, dengan disertai ~~sa~~ pula satu lembar salinan dari MA'LUMAT PEMERINTAH SWAPRADJA BIMA tertanggal 22 November 1945 (sebagai lampiran dari " Pernyataan (Statement) tersebut),

untuk ma'lum dan diwujudkan.--

K e h a d a p a n :

A.n. Kepala Daerah Pulau Sumbawa:
Datu Ranga,

1. P.J.M. Presiden R.I.S. di Djakarta,
2. P.J.M. Acting-Presiden R.I. di Djokjakarta,
3. P.J.M. Presiden N.I.T. di Makassar,
4. P.J.M. Perdana Menteri R.I.S. di Djakarta,
5. P.J.M. Perdana Menteri R.I. di Djokjakarta,
6. P.J.M. Perdana Menteri N.I.T. di Makassar,
7. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.I.S. di Djakarta,
8. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.I. di Djokjakarta,
9. P.J.M. Menteri Dalam Negeri N.I.T. di Makassar.

(Abdulmadjid).

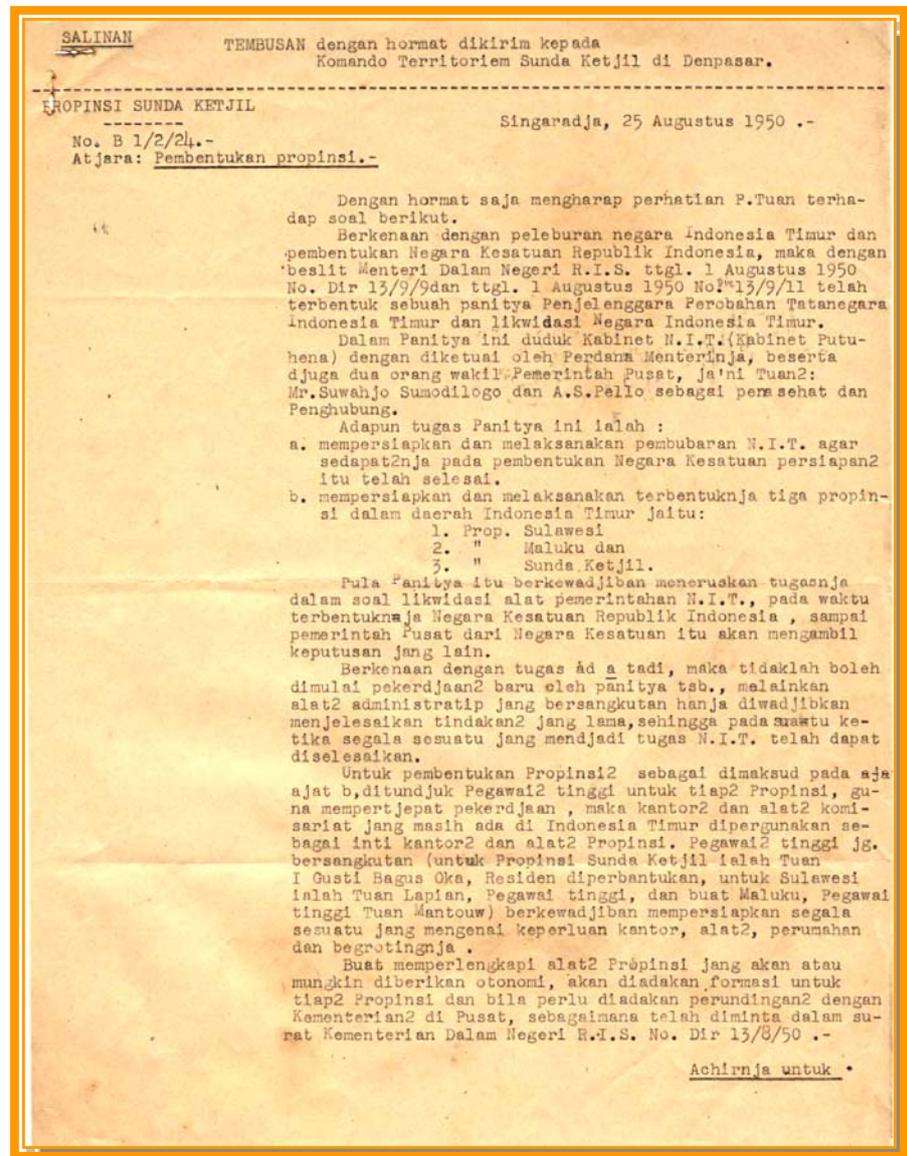
TEMBUSAN (dengan disertai lampiran) dikirim ke hadapan:

1. P.J.U. Ketua Parlemen R.I.S. di Djakarta,
 2. P.J.U. Ketua Parlemen R.I. di Djokjakarta,
 3. P.J.U. Ketua Parlemen N.I.T. di Makassar,
 4. P.J.U. Ketua Senat R.I.S. di Djakarta,
 5. P.J.U. Ketua Senat N.I.T. di Makassar,
 6. P.T.Jth. Kommissaris Negara Selatan (N.I.T.) di Singaradja,
- untuk ma'lum dan seperlunja.--

KABINET PRESIDEN	
AGENDA No.:	<i>ibari 13/4/50</i>
TGL. TERIMA :	<i>21-4-50</i>
BUNDFL :	<i>180</i>

Bagian awal dari Surat Pernyataan Swapraja Bima, Sumbawa dan Dompu untuk menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, April 1950.

ANRI : Kabinet Presiden RIS No.168



Surat Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Bagus Oka mengenai pembentukan 3 propinsi Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil serta pembubaran Negara Indonesia Timur, 25 Agustus 1950.

ANRI : Kerajaan Bima No.S112

R E S O L U S I

D.P.R.P.S.

Dalam sidang Dewan Pulau Sumbawa, yang bertempat di Domou, pada tanggal 18 April 1950 telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mengingat: 1. adanya mosi dan resolusi dari Partai politik dan segala organisasi yang ada dalam ketika Swaradja (Sumbawa, Domou dan Bima), yang menuntut akan pembubaran NIT.

2. adanya Statement (pernyataan) bersama dari ketika Swaradja (Sumbawa, Domou dan Bima), tertanggal 11 April 1950, yang menuntut penggabungan dari ketika Swaradja tersebut kedalam R.T., dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Melihat adanya mosi yang dimajukan oleh anggota Dewan Pulau.

Menimbang: 1. bahwa tuntutan ini sesuai dengan pasal 13-14 dari Konstitusi R.I.S. sementara.

2. bahwa sesuai pula dengan undang-Undang Darurat tahun 1950, Bab II pasal 1 huruf d.

Memutuskan: Mendesak kepada Pemerintah Pusat (R.I.S.) agar dengan segera N.I.T. dibubarkan, dan disabungkan kedalam R.I.

Memutuskan pula: bahwa bilamana pembubaran N.T.T. tidak terlaksana dengan segera, maka Daerah Pulau Sumbawa akan segera mengambil inisiatif sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya berabung langsung dengan R.T., sesuai dengan Undang-Undang Darurat tahun 1950 Bab II pasal 1, huruf d.-

Atas nama D.P.R. P.S.
Wakil Ketua,

Bertanda,

Jalu Mentia.

Kehadapan:

1. P.J.M. Presiden R.I.S. di Djakarta.
2. P.J.M. Astina Presiden R.I. di Djokjakarta.
3. P.J.M. Presiden NIT di Makassar.
4. P.J.M. Perdana Menteri R.I.S. di Djakarta.
5. P.J.M. Perdana Menteri R.I. di Djokjakarta.
6. P.J.M. Perdana Menteri NIT di Makassar.
7. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.T.S. di Djakarta.
8. P.J.M. Menteri Dalam Negeri R.T. di Djokjakarta.
9. P.J.M. Menteri Dalam Negeri N.T.T. di Makassar.
10. P.J.M. Menteri Penerangan R.I.S. di Djakarta.
11. P.J.M. Menteri Penerangan R.I. di Djokjakarta.
12. B.J.M. Menteri Penerangan N.I.T. di Makassar.

TEMBUSAN (dikirim kepada):

1. P.J.U. Ketua Parlemen R.I.S. di Djakarta.
2. P.J.U. Ketua Parlemen R.I. di Djokjakarta.
3. P.J.U. Ketua Parlemen N.I.T. di Makassar.
4. P.J.U. Ketua Senat R.I.S. di Djakarta.
5. P.J.M. Ketua Senat N.I.T. di Makassar.
6. P.T. Jth. Komisaris Negara Selatan (N.I.T.) di Singaradja.
7. Anggota Parlemen N.I.T. dari Sumbawa.

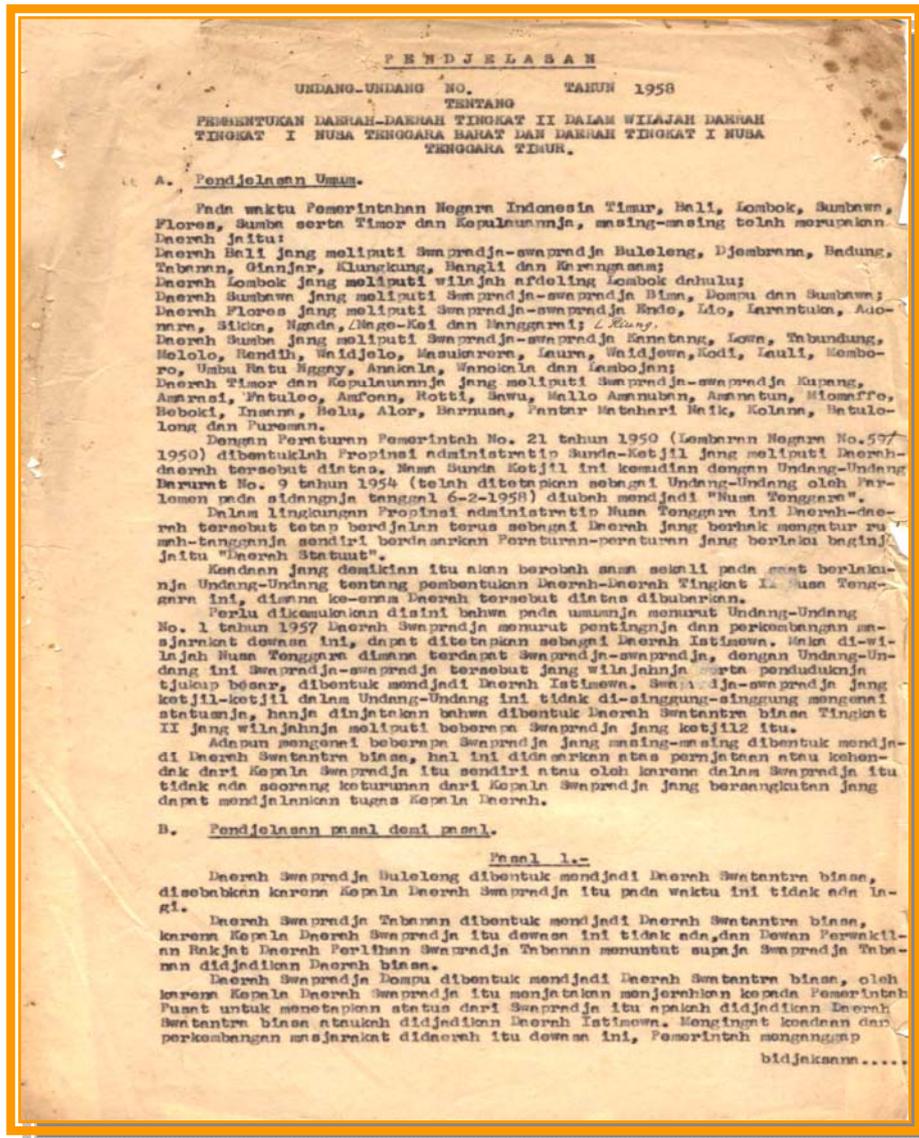
-----untuk ma'lum dan seperlunya.-----

P e n j a l i n :
Adjun-Komis Swaradja Bima,

Anwar Ikraman.

Resolusi DPR RS tentang pembubaran Negara Indonesia Timur
dan bergabung dengan Republik Indonesia,
18 April 1950.

ANRI : Kerajaan Bima No.S139



Bagian awal dari Penjelasan Undang-Undang Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, 1958.

ANRI : Kerajaan Bima No.579

RENTJANA - PERATOERAN
PEMBENTOEKAN NEGARA "INDONESIA TIMOER".

BAB I.
Fatsal 1.

- (1) Diadakan negara "Indonesia Timoer"
- (2) Daerah negara "Indonesia Timoer" melingkoengi daerah geweat yang diadakan menoeset ordonmantie tgl. 19 Feberuari 1937 (Staats blad No.68, Beslit Goebnemenent tgl. 25 Mei 1938 No. 28 (Staatsblad no. 264), pembentoeke daerah Indonesia Timoer terhitoeeng djoega, jang mana kemoedian akan ditetapkan tentang pembagaan daerah dari Kerresidenan Nieuw-Guinea jang sekarang dan perhoeboengannja kepada Negara Indonesia Timoer dan djoega kepada negara Indonesia Serikat.
- (3) Iboe negeri dari Negara Indonesia Timoer ialah Makassar.

Fatsal 2.

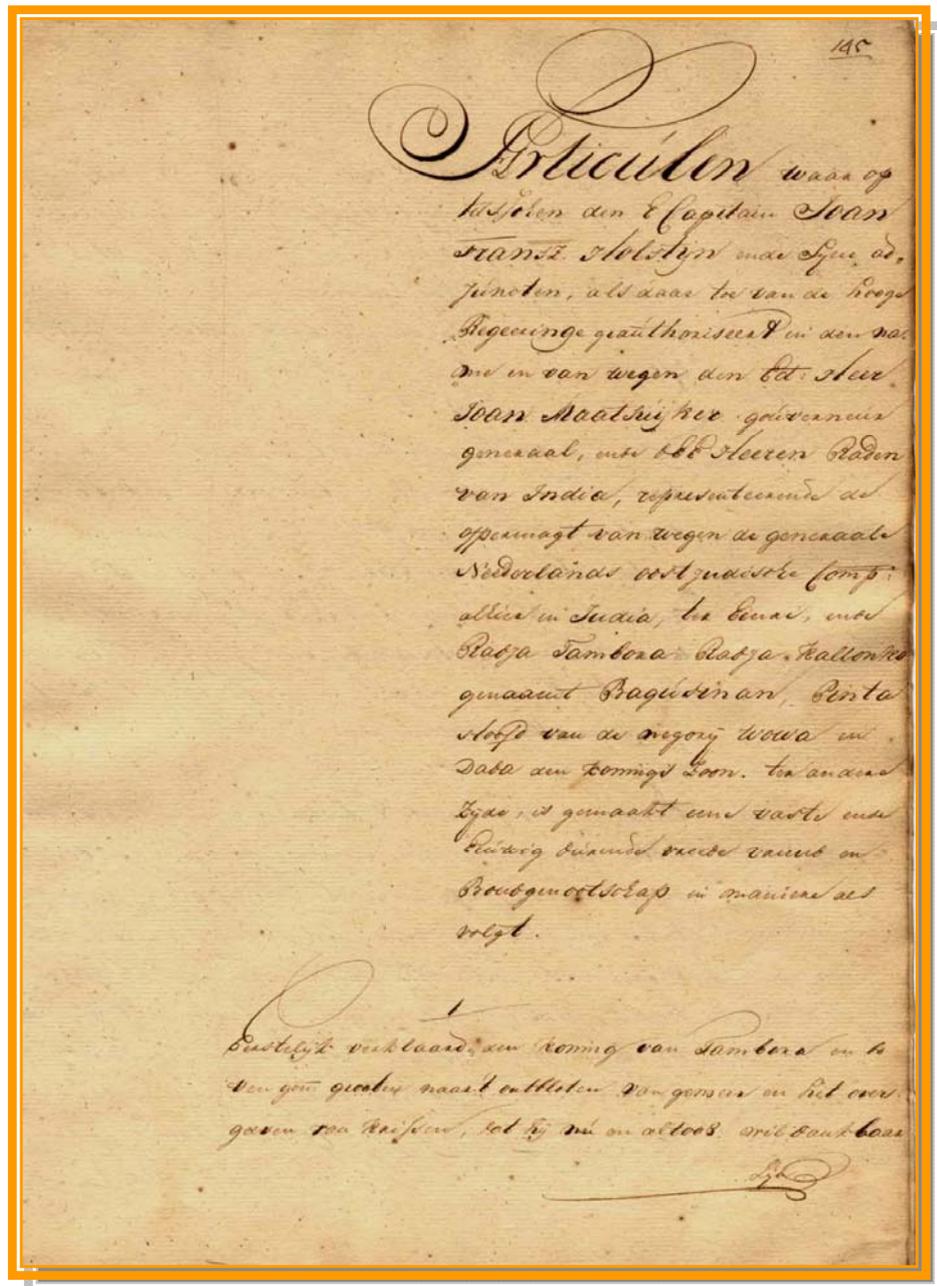
- (1) Kepada Negara Indonesia Timoer oleh Goebnemenent diserahkan segala hak2 pemerintah dan kekoesaan2 pemerintahan, jang haroes memoengkinan negara ini dalam waktoe jang sesingkat-singkatnja mendjadi soeatoe negara dengan organisasi dan kekoesaan jang demikian roepa, sehingga negara itoe dapat mendoedoeiki tempatnja dalam Negara Indonesia Serikat jang direntjanakan, sesoenggoeh2 sederadjat dengan lain negar sekoetoe manapoen djoega, dengan pengertian, bahwa pada peralihan kekoesaan2 jang terseboet tadi djoega termasuk, bahwa negara menerima segala kewadajiban2 jang timboel dari padanja.
- (2) Penjerahan kekoesaan seperti jang dimasoedkan dalam ayat 1, hanja dibatasi oleh kepaksaan, soepaja sekarang tidak diadakan penjerahan kekoesaan, jang berhoeboeng dengan pembangoenan kenegaraan jang dimaksodkan, haroes akan dihapoeskan poela berkenaän dengan penjelenggaraan kewadajiban oleh Negara Indonesia Serikat dan Unie Nederland-Indonesia.
- (3) Dengan mengetjoealikan kepoetoesan2, jang akan diambil ketika pembentoekan Negara Indonesia Serikat, negara Indonesia Timoer setoedjoe, berhoeboeng dengan jang ditetapkan dalam ayat jang lebih dahoeloe, bahwa kekoesaan2 pemerintah jang menegenaf pokok2, jang akan diseboet dibelakang ini, oentoeek sementara akan diselenggarakan oleh Goebnemenent, ketjoeali perobahan2 jang diadakan dalamnja sesoedah diperoendingkan lebih landjoet serta dengan kepoetoesan bersama, dan ketjoeali kekoesaan2 dari Goebnemenent oentoeek meminta soepaja negara toeroet membantoe dalam hal itoe:
 - a. perhoeboengan2 loear negeri, kewadajiban2 terhadap Pemerintah Pemerintah loear negeri; demikian poela pada oemoennja segala pokok2 jang bersangkoeatan rapat dengan perhoeboengan loear negeri;
 - b. pembelaän negeri, termasuk penjoesoenan dan pengoemoeman keadaan perang dan keadaan bahaaja (Staat van oorlog en beleg
 - c. pengampoenan, pembebasan dan penghentian hoekoeman ("gratie, amnestie, abolitie");
 - d. peratoeran2 tentang kebangsaan, kewarganeganearaan dan pendoeok ("nationaliteit, onderdaanschap, en ingezetenschap");
 - e. pemindahan orang2 dalam atau keloear negeri ("immigratie en emigratie");
 - f. peratoeran2 tentang hak pengarang dan milik perindoestrian;
 - g. badan2 ilmoe pengatahoean;
 - h. pengoempoelan bahan2 "statistisch"(angka2)goena keperluan oemoem;
 - i. persediaan2 kesoesialan jang bersifat oemoem;
 - j. badan pengadilan tertinggi;
 - k. penjoesoenan hoekoem sipil dan hoekoem perdagangan, sependjan hal ini patoet diatoerkan dari poesat, baik oleh karena kepeinginan2 perdagangan oemoem, atau karena alasan2 ekonomi lainnja, ataupun oleh karena arti istimewa bagi golongan ra'jat jang penting, jang kedoedoeakannja sedemikian

Roepa

Bagian Awal Rencana Peraturan Pembentukan Negara
Indonesia Timur,
[± 1947)

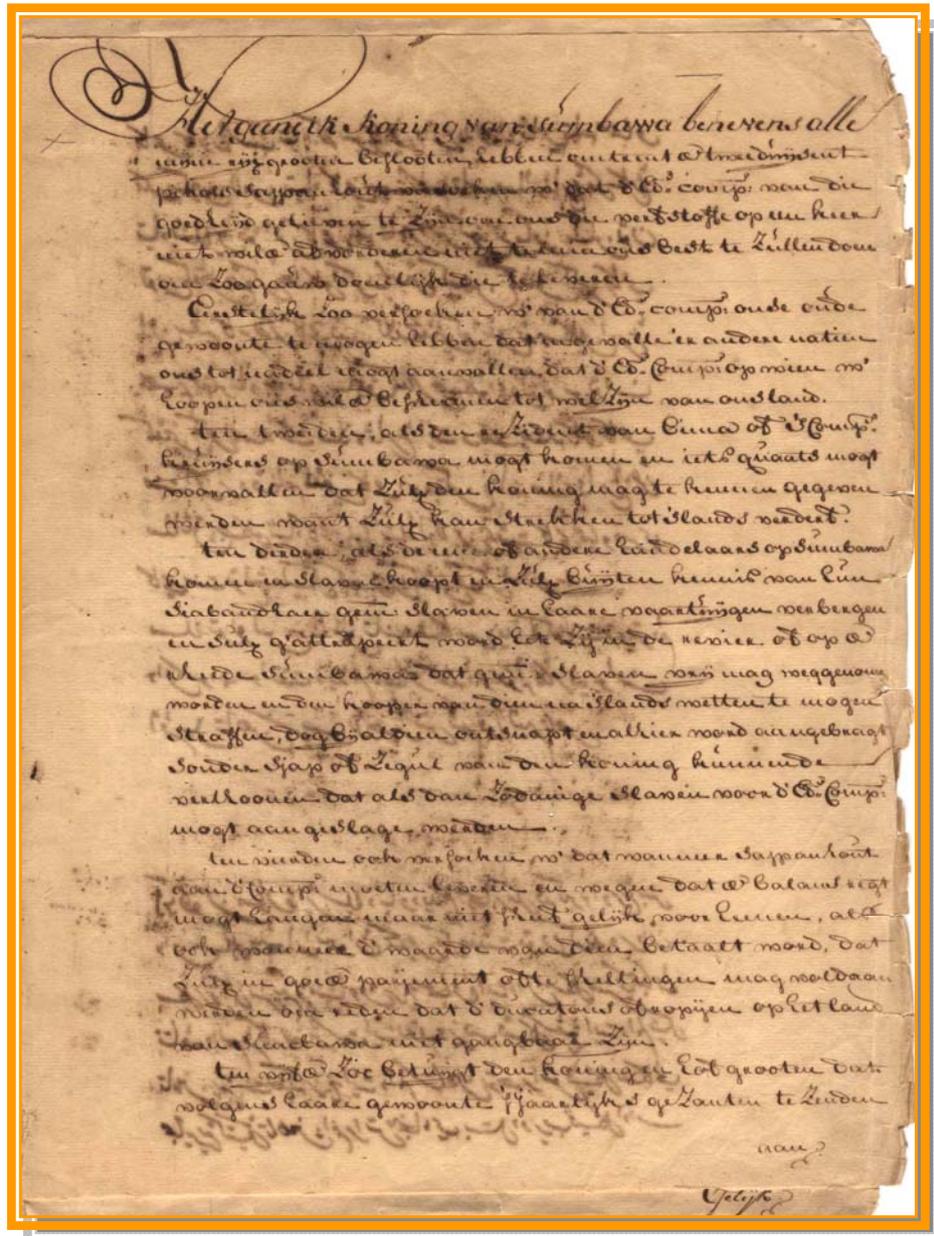
ANRI : Kerajaan Bima No.S32

Politik



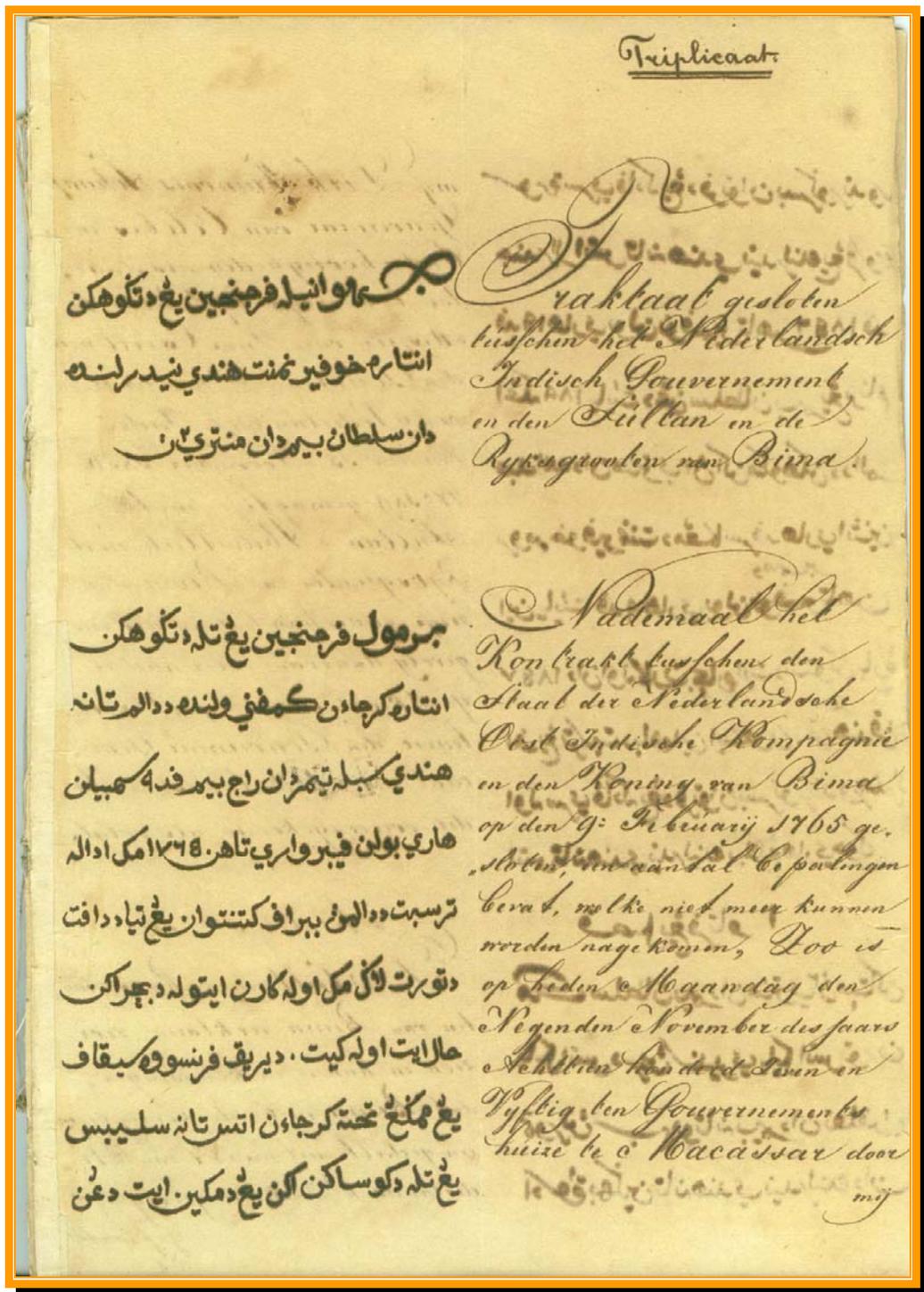
Bagian Awal kontrak perjanjian antara pemerintah VOC dengan Raja Tambora tentang bantuan Tambora kepada Makasar dalam perang Makasar, 11 Agustus 1675.

ANRI : Makassar No.275



Bagian awal dari Kontrak Sumbawa antara lain mengenai *sappanhout* (sejenis kayu), pedagang dan budak, 25 April 1755

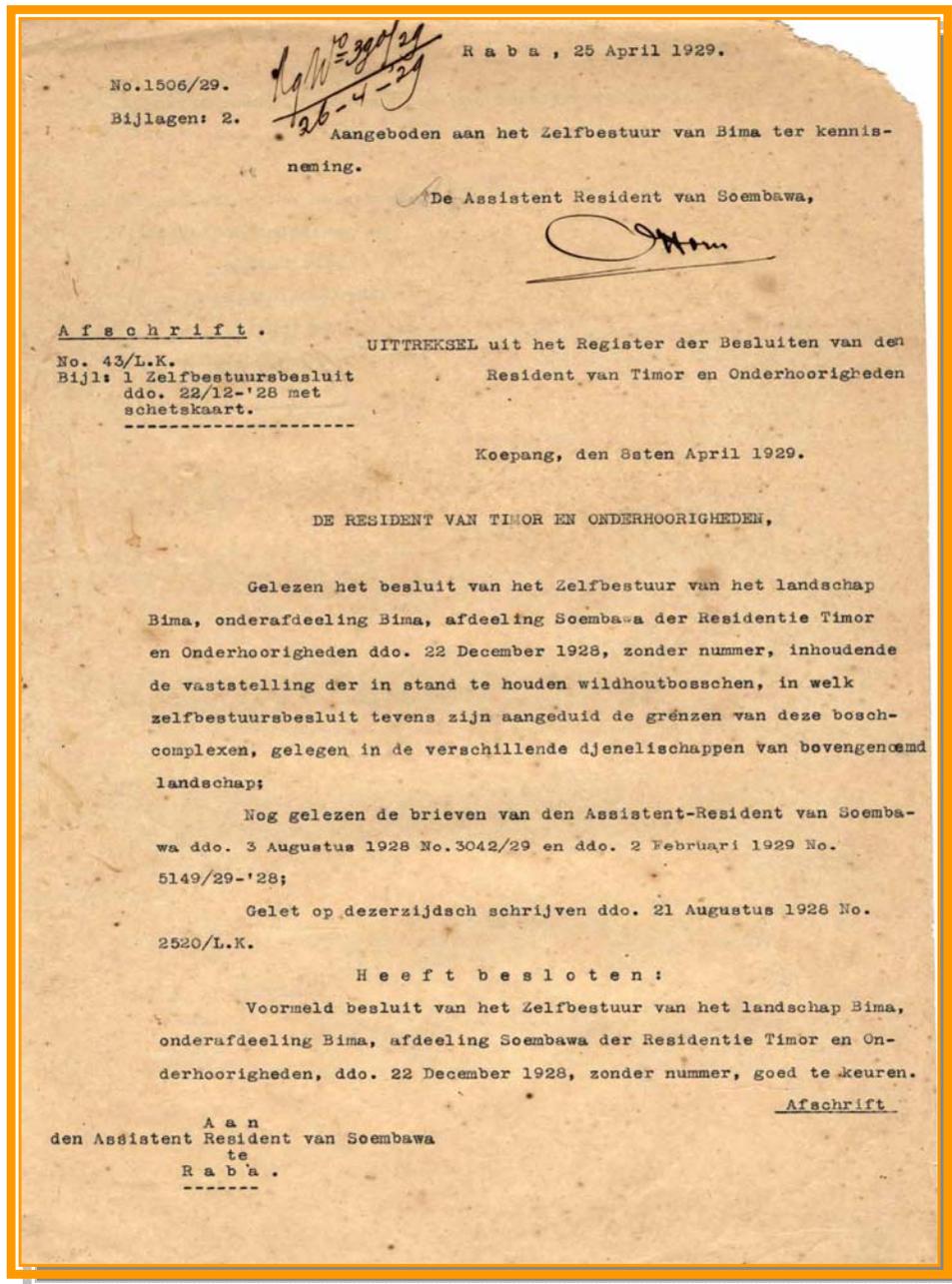
ANRI : Makasar No. 374



Bagian awal dari *Traktaat* (Perjanjian Persahabatan) antara Kerajaan Bima dan Pemerintah Hindia Belanda
9 November 1857
ANRI : Kontrak Bima

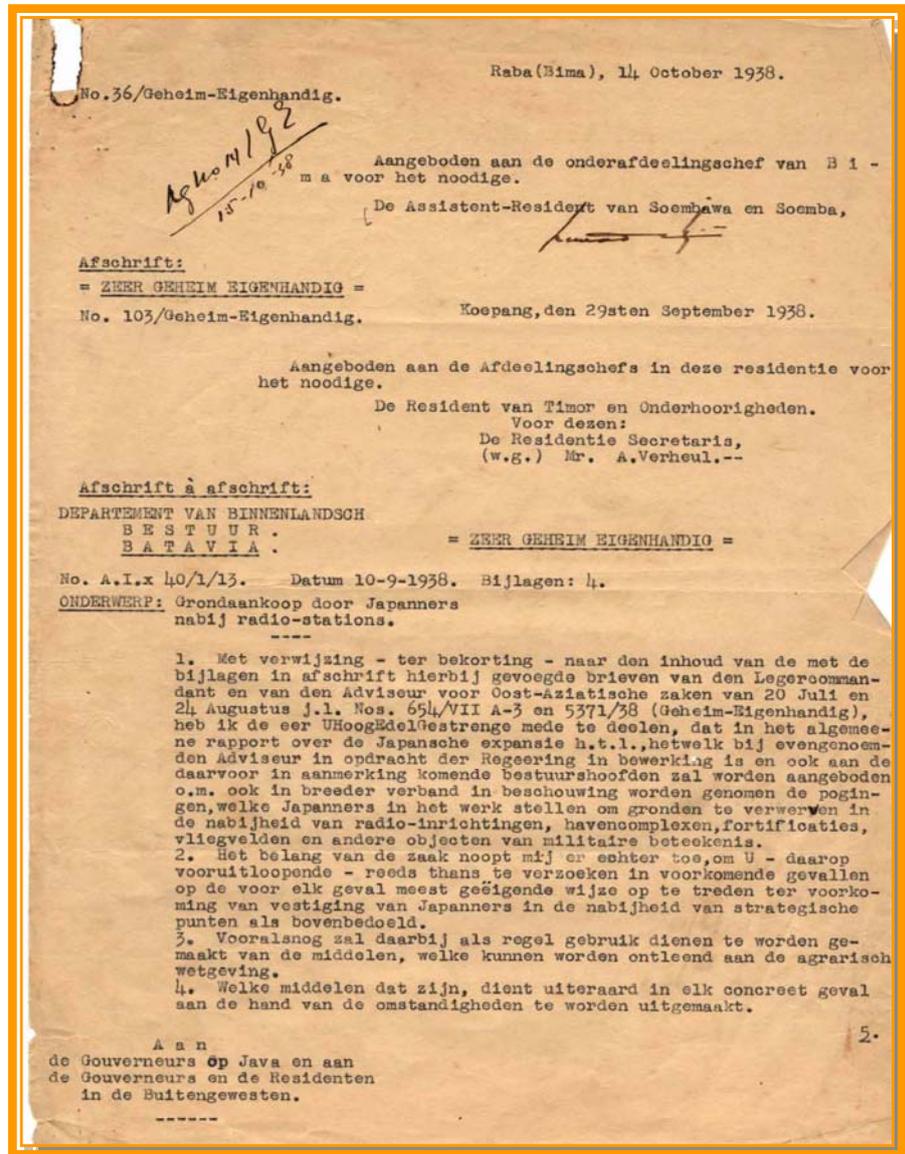


Bagian akhir dari *Traktaat* (Perjanjian Persahabatan) antara Kerajaan Bima dan Pemerintah Hindia Belanda
 9 November 1857
ANRI : Kontrak Bima



Surat kepada Asisten Resident Soembawa tentang perbatasan wilayah Bima,
25 April 1929.

ANRI : Kerajaan Bima No.M13



Bagian awal dari Surat rahasia Departement van Binnenland Bestuur tentang terdamparnya tentara Jepang di dekat stasiun radio di wilayah kerajaan Bima, 14 Oktober 1938.

ANRI : Kerajaan Bima No. M20

KEPENGESAN-KEPENGESAN KONFERENSI K.R.I. dan RAPAT-PLENO GAPI di Mataram.

Konferensi K.R.I. tgl. 13/14 September 1941 di Mataram, dihadiri oleh wakil-wakil dari M.I.A.I., P.V.P.N., Kongres Persewaan Indonesia, Istri Indonesia, Perdi, P.S.I.I., Parindra, Gerindo, Pasundan, P.L.I., P.P.K.I., P.A.I., N.C., Hoehmanadyah, P.P.P.B. dan P.P. M.T.S. menyetujui berdirinya satos MADJELIS RAKJAT INDONESIA sebagai gantinya K.R.I.

Anggaran Dasar
MADJELIS RAKJAT INDONESIA.

1. Nama dan tempat.
 - a. nama badan ini ialah MADJELIS RAKJAT INDONESIA, didirikan pada tanggal 13/14 September 1941 di kota Mataram dan bertempat di tempat kedoeoean Dewan Pendidinaja;
 - b. nama Madjalis ini tidak boleh disingkatkan, baik dalam tulisan maupun dalam lisan.
2. Sifat.

MADJELIS RAKJAT INDONESIA adalah satos badan perwakilan Rakjat Indonesia.
3. Asas.

Asasnya ialah KERAWAJATAN (demokrasi).
4. Toedjoemja.

Toedjoemjaja ialah KERAWAJATAN dan KEMERDEKAAN Rakjat Indonesia.
5. Geasaha.

Geasaha oentoek menjapai toedjoemjaja, ialah:

 - a. mengadakan rapat-besar atau konferensi² dimana Rakjat Indonesia dapat mengoelarkan pendapat dan mengambil kepoetoesan terhadap segala so'al jang mengenai kepentingan Rakjat dan Tanah Air Indonesia;
 - b. teristimewa beroesaha mendjalankan aksi INDONESIA BERPARLEMEN.
6. Anggota.

Jang boleh menjadi anggota hanjalah perhirpoeaan² Rakjat Indonesia jang menpoehi sjarat:

 - a. menyetujui anggaran dasar dan tetangga njata bahwa perkoempoelan itoe beresifat oegamisasi jang terasat dan mengambil bagian dalam mendjoekan Rakjat Indonesia disalah satos lapangan manjerakat, seperti politik, sosial, ekonomi dsb.
 - b. perkoempoelan bangsa lain boleh menjadi anggota sesudah di-idzinkan oleh anggota MADJELIS RAKJAT INDONESIA.
7. Pengoesan.

MADJELIS RAKJAT INDONESIA dipimpin oleh badan pengoesan bernama DEWAN PERIMPEN, terdiri daripada wakil-wakil gaboeangan, federasi² jang besar jang sebagian besar dari anggotanja masoek dalam Madjalis Rakjat Indonesia.

Boeat pertama kali DEWAN PERIMPEN ini terdiri atas wakil² GAPI, MIAI dan PVEN, masing 5 orang, jalmi dari:

GAPI: 1. Abikoosmo Tjolosoosjoso,
2. Soekardi Wirojopranoto
3. Otto Iskandar Dinata
4. Mr. Sartono
5. Kesimo

MIAI: 1. Wachid Hasjim
2. W. Wondokusumo
3. Dr. Soekiman
4. R. H. M. Muisoer
5. Oemar Hoehoisj.

PVEN: 1. Soeroso
2. Atik Soeardi
3. Mr. Hindromartono
4. Roedlan Wongsokoesomo
5. Dri. Jowongso

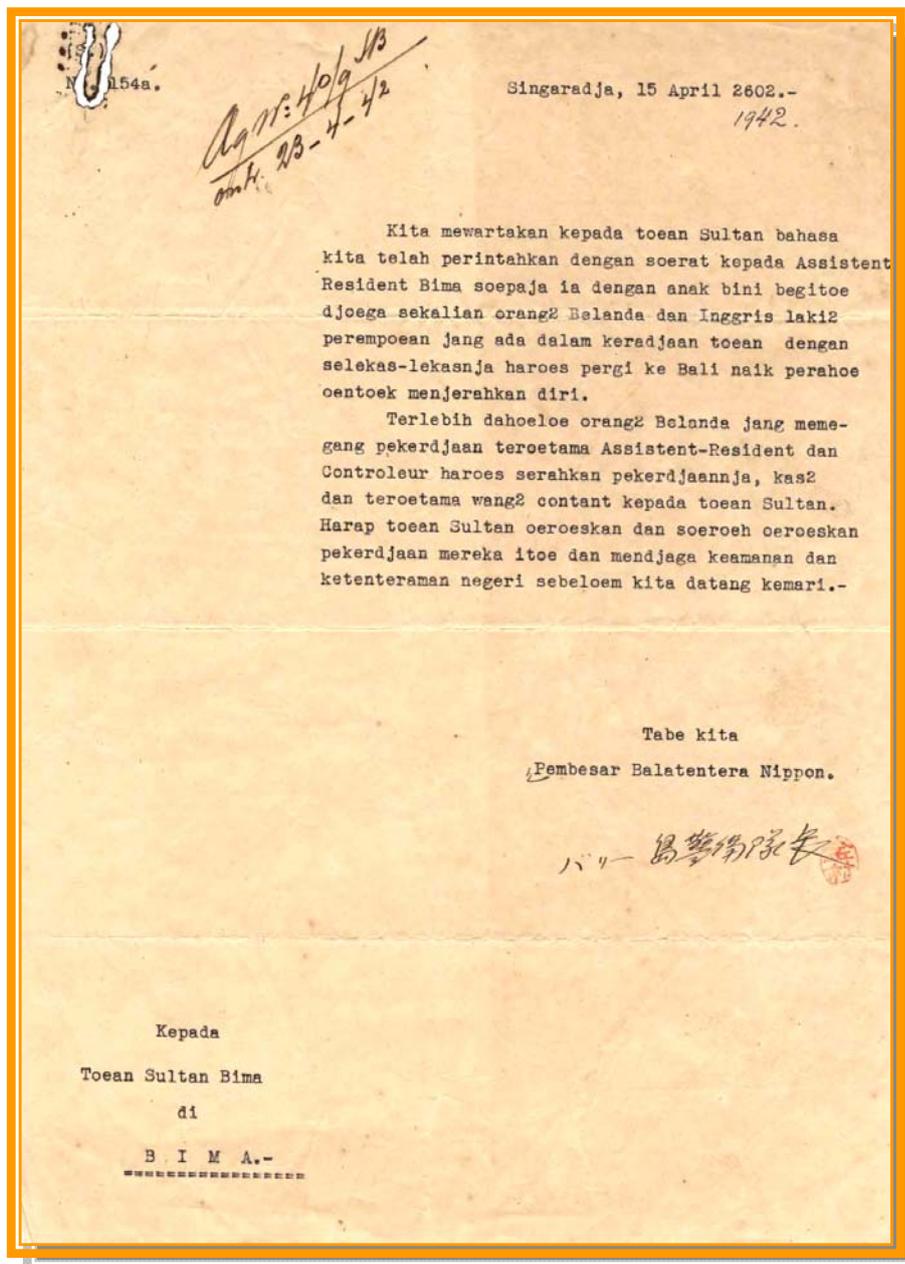
Dewan Pendidin apabila merandang perloe berhak:

 - a. menarib anggotanja dengan wakil anggotanja Madjalis Rakjat Indonesia jang tidak ter-gaboeang dalam salah satos gaboeangan
 - b. oentoek membangoenkan Departamenten oentoek mendjalankan kepoetoesan² Madjalis Rak-jat Indonesia.
8. Hak oewarta.

Hak oewarta dipoengpet menoesoet djoendah tjabang-tjabang jang sah daripada anggotanja Madjalis Rakjat Indonesia.

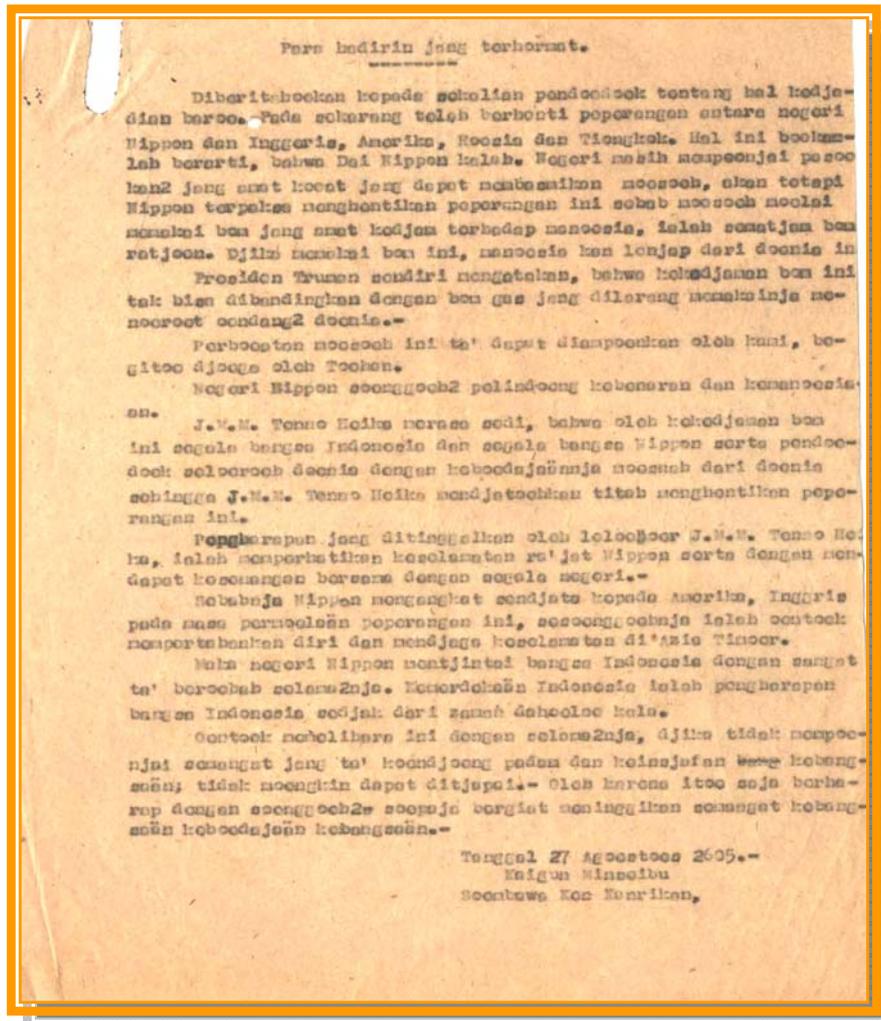
Bagian awal dari Keputusan Konferensi Rakyat Indonesia di kota Mataram tentang pendirian Majelis Rakyat Indonesia (MRI), 13 September 1941.

ANRI : Fritz Laoh No. 11



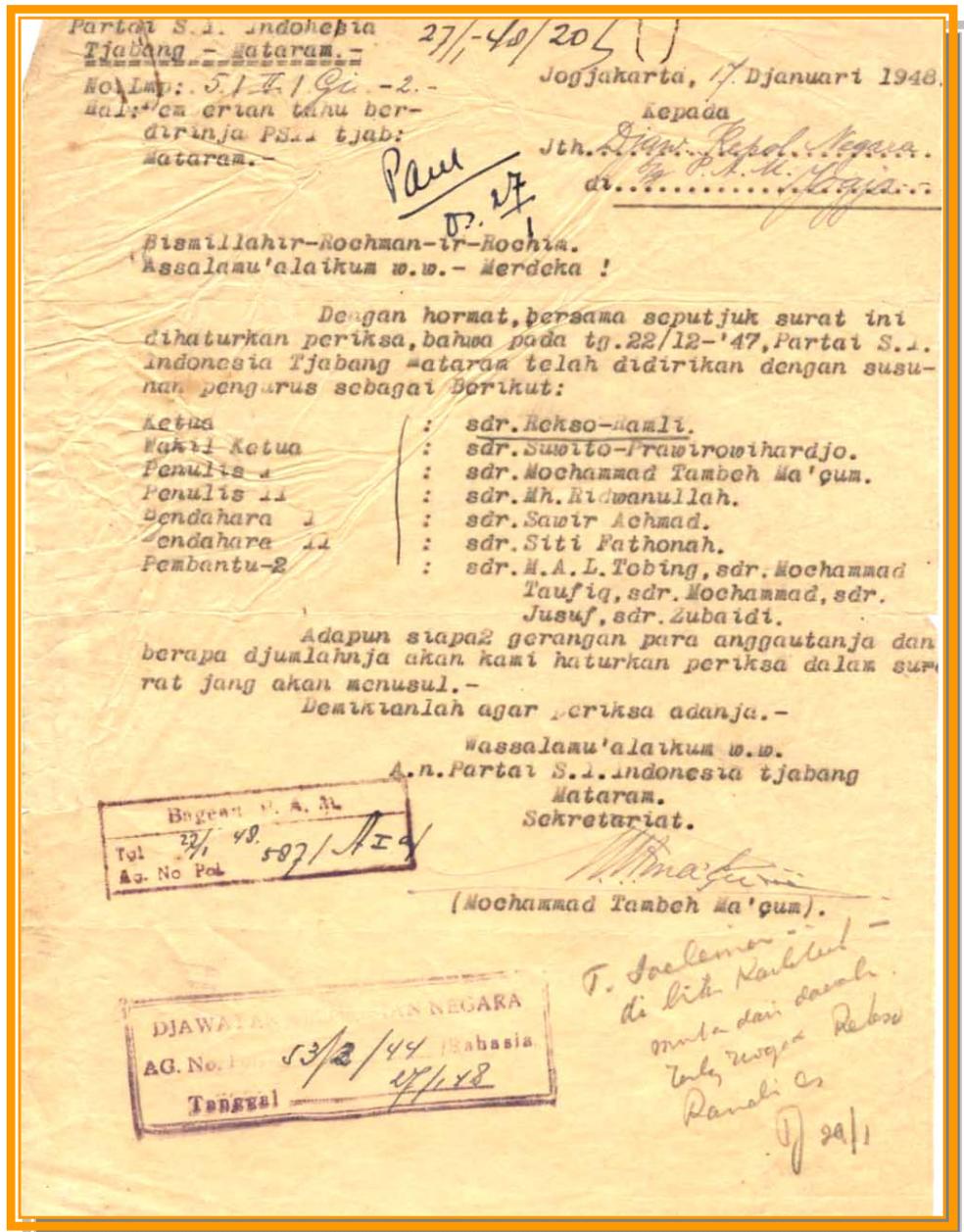
Surat Pembesar Balatentara Nippon kepada Sultan Bima tentang himbauan agar Inggris dan Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Bali, 15 April 1942.

ANRI : Kerajaan Bima No.S149



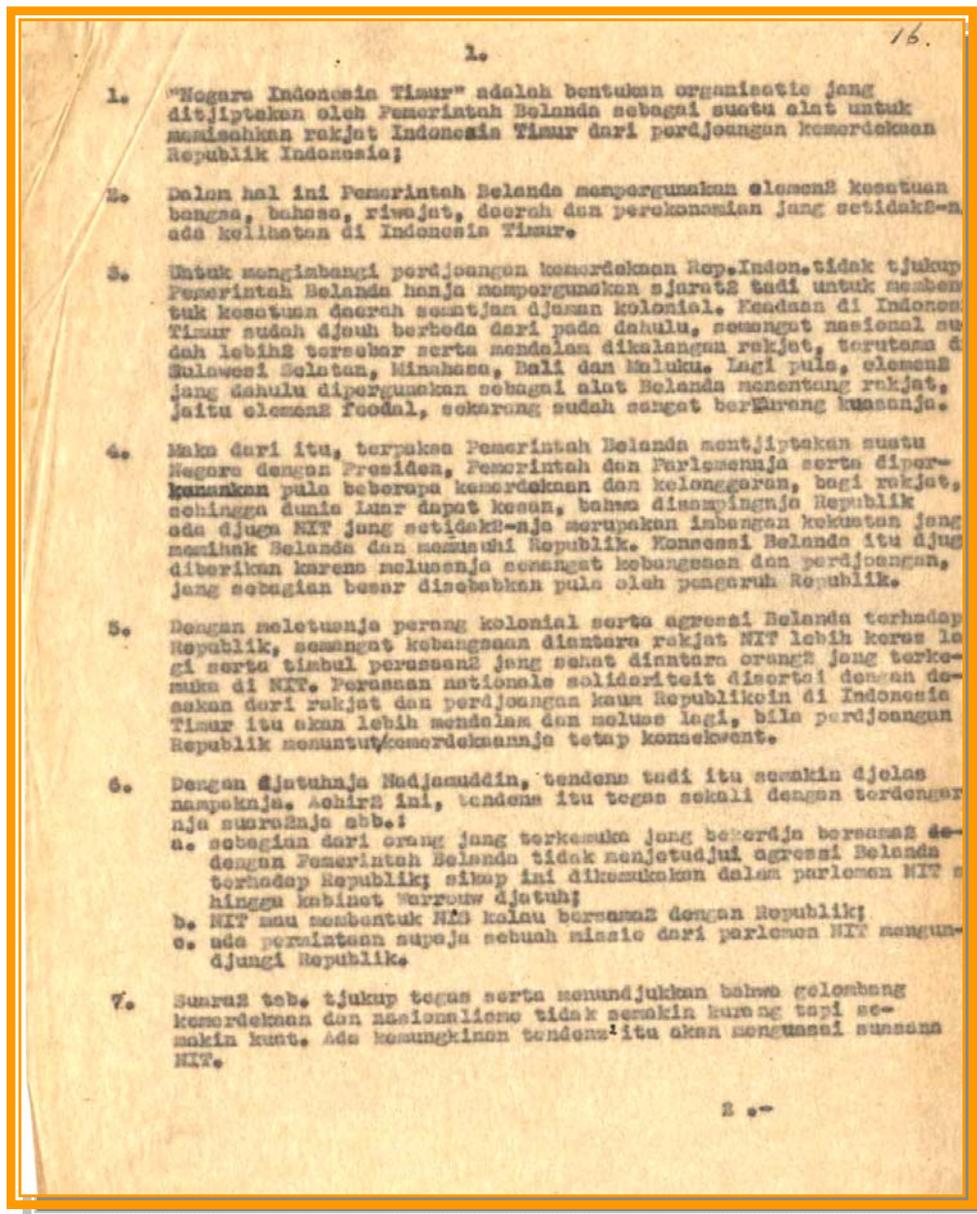
Ucapan terima kasih Panglima Terbesar Angkatan Laut Jepang
Tenno Heika kepada bangsa Indonesia yang telah membantu
Jepang dalam peperangan Asia Timur,
27 Agustus 1945.

ANRI : Kerajaan Bima No.M75



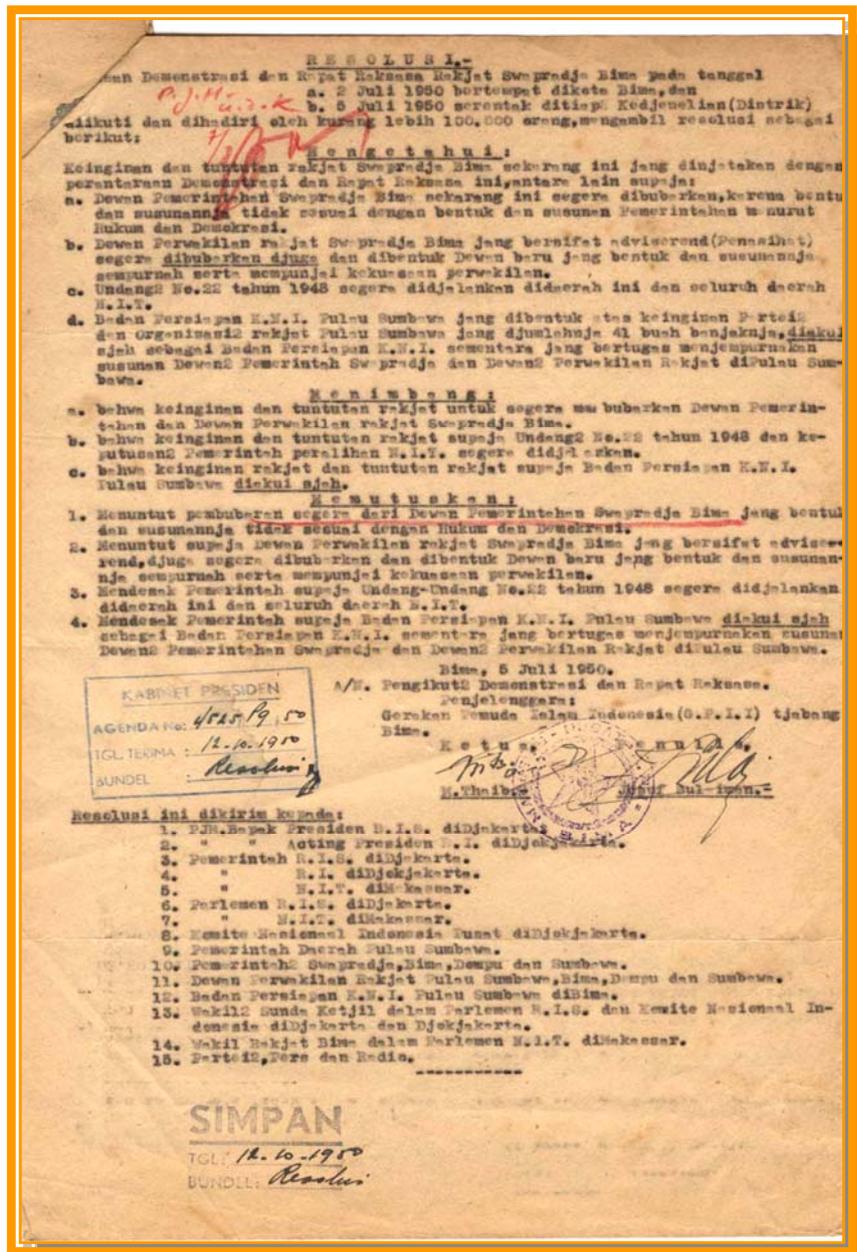
Surat Partai Sarikat Islam tentang pendirian Partai Sarikat Islam
Indonesia (PSII) cabang Mataram dengan Ketua Rekso Ramli,
22 Desember 1947.

ANRI : Kepolisian Negara No.560



Bagian awal dari Pernyataan mengenai pembentukan Negara Indonesia Timur yang oleh Belanda dijadikan alat untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ± 1948.

ANRI : LN Palar No.79



Resolusi Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang merupakan tuntutan rakyat Swapraja Bima (Pulau Sumbawa) antara lain mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Swapraja Bima, 5 Juli 1950

ANRI : Kabinet Presiden RIS No.197



Suasana rapat umum di Mataram ketika masyarakat sedang mengibarkan bendera merah putih dan spanduk Persit yang menuntut Irian sebagai bagian dari Indonesia, 30 Oktober 1950.

ANRI : Kempen No.502288



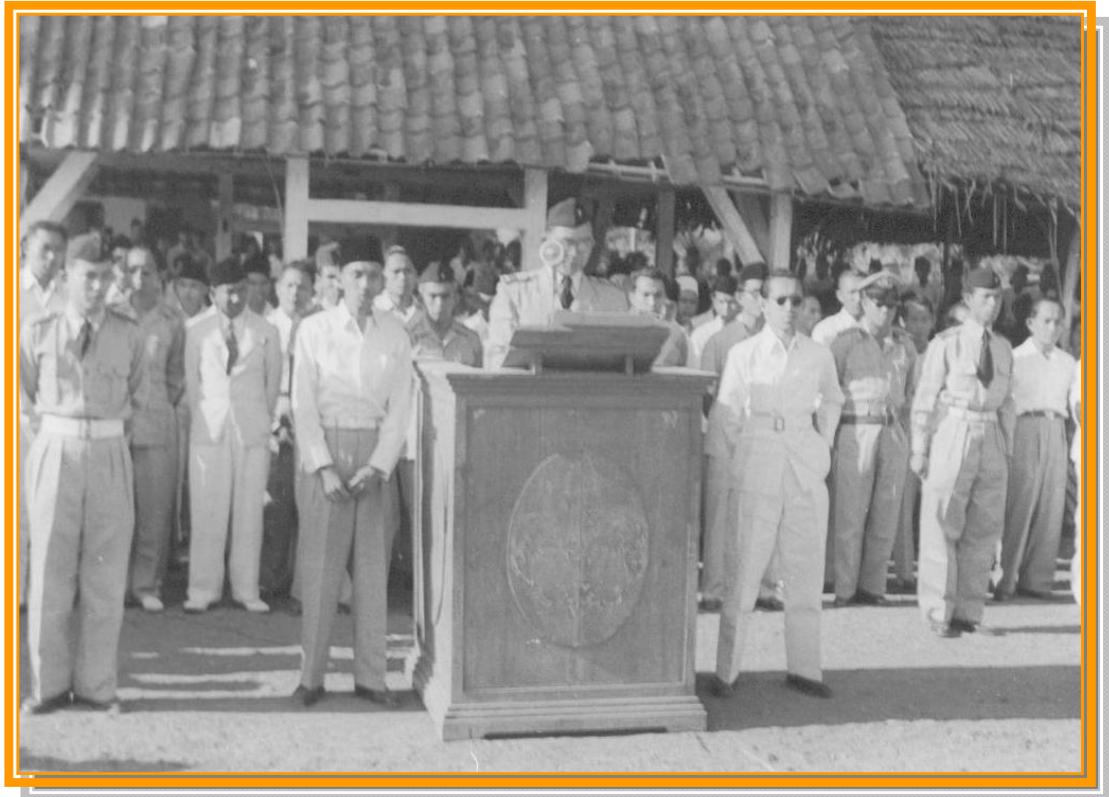
Sambutan rakyat di sepanjang jalan yang dilalui
Wakil Presiden Muhammad Hatta sewaktu tiba di Lombok
dalam rangka rapat umum,
25 April 1952.

ANRI : Kempen No.520425 NN 110



Wakil Presiden Muhammad Hatta sedang memberikan ceramahnya pada saat rapat umum di Mataram, 25 April 1952.

ANRI : Kempen No.520425 NN 122



Komandan Sektor Angkatan Perang Republik Indonesia
pada saat peringatan HUT ke VIII Angkatan Perang
Republik Indonesia di Sumbawa Besar,
5 Oktober 1952.

ANRI : Kempen No.5



Mr. Sartono tiba di lapangan terbang Rembiga Lombok
dalam rangka kunjungan kerja ke Lombok,
23 Juni 1959.

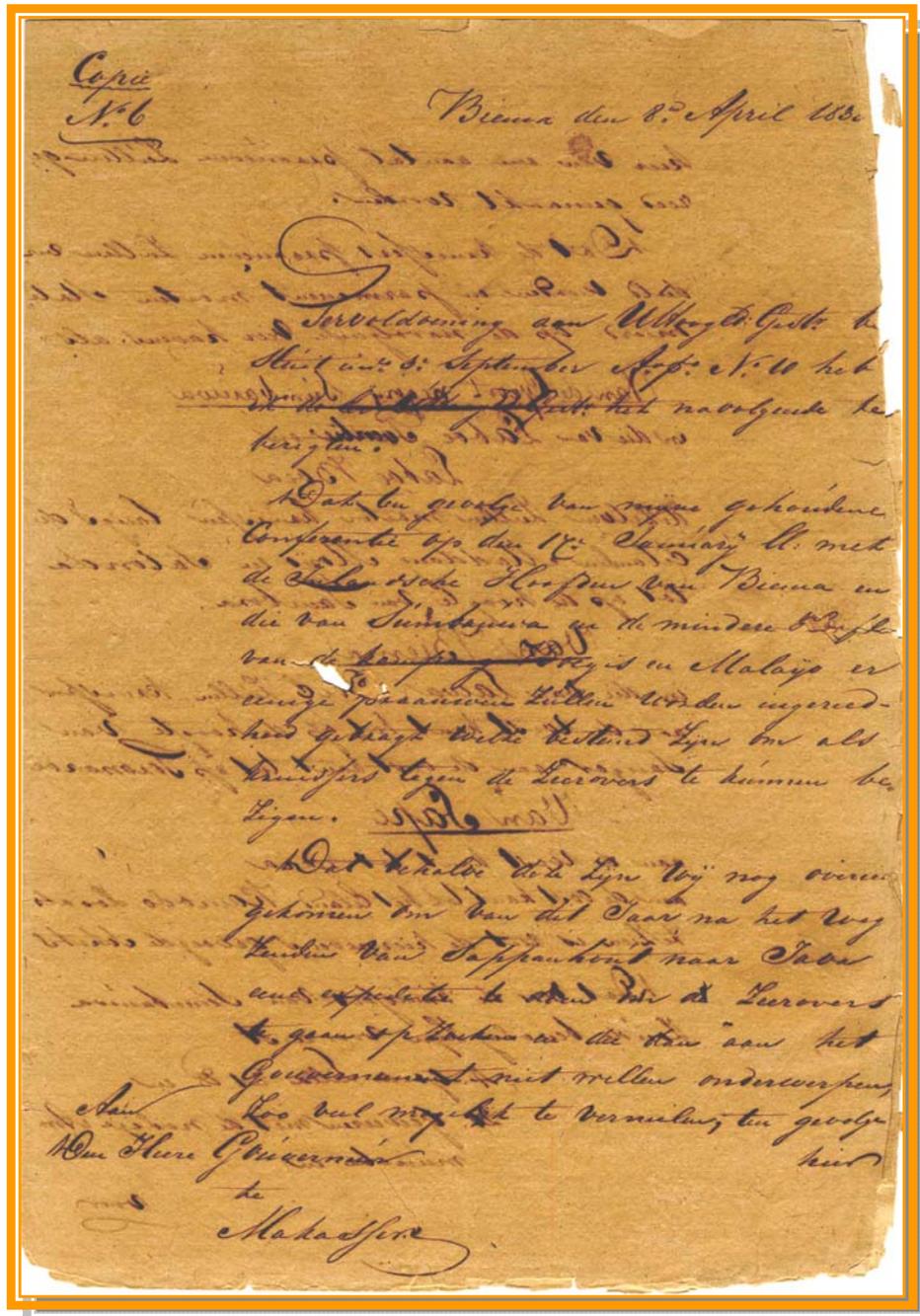
ANRI : Kempen No. 590623 MM 4



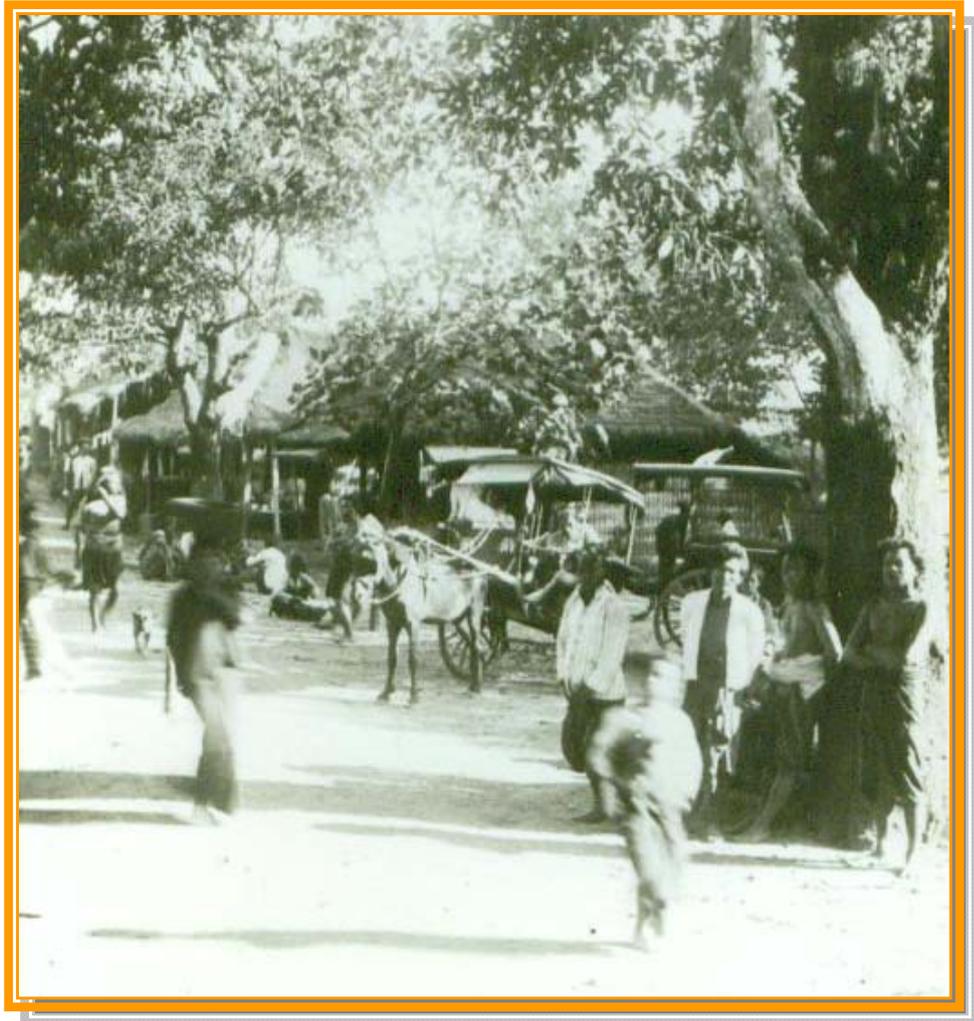
Mr. Sartono sedang memberikan ceramah kepada rakyat
Mataram saat Rapat Raksasa di Mataram,
23 Juni 1959.

ANRI : Kempen No.590623 MM 15

Perekonomian



Surat kepada Gubernur di Makasar tentang pengiriman 'Sappanhout' (sejenis kayu) ke Jawa melalui pelabuhan besar Sumbawa, Bima dan Sape, 8 April 1833
ANRI : Makassar 362/14



Suasana pasar di Mataram,
30 November 1921
ANRI : KIT No. 9/90

PERATOERAN TENTANG HAL MENGENAKAN DAN MEMOENGOET
PADJEG PENGHASILAN DIATAS TANAH KERADJAAN2 (LANDSCHAP) BIMA DAN
DOMPOE, AFDEELING SOEMBAWA, KERESIDENAN TIMOER DAN DAERAH

TA'LOEKNJA

Fasal 1.

Didaerah Keradjaan2 Bima dan Dompoe, Onderafdeeling Bima, Afdeeling Soembawa dan Soemba, Keresidenan Timor dan daerah ta'loeknja, tanah2 didalamnja terhitoeng masuk empang2 dan tanah pegaraman dikenakan padjeg memoeroet atoeran dalam verordening ini. Padjag itoe bernama Landrente. Tanah yang dikenakan padjag itoe, ja'ni tanah2 yang kena hak benda dan yang tidak masuk atoeran verponding.

Fasal 2.

- (1) Dari padjag landrente itoe dibebaskan:
 - a. Tanah2 yang baroe diboeka, selama2nja tiga taioen sesoedah selesai diboekat (djadikan), ja'itoe djika memoeroet timbangan Pemerintah Keradjaan, setelah sefakat dengan Kepala Afdeeling, pekerdjaan memoeroet itoe sangat soekarnja atau banjak ongkosnja.
 - b. tanah pekarangan dan penggembalaan persekoetoean adat (desa), tanah keramat dan koeboeran; tanah persekoetoean adat, tempat sesoetoe didirikan atau dikerdjakan oleh kampong yang berpaedah bagi oemoem atau oentoeok djabatan oemoem, demikian djoega tanah2 yang ditoendjoekkan oleh Pemerintah Keradjaan, setelah sefakat dengan Kepala Afdeeling, yang hasilnja oentoeok kepala2 anak negeri (tanah pangkat) atau oentoeok badan oemoem, persekoetoean adat atau agama.
 - c. tanah2 yang ditoendjoekkan akan dipakai oentoeok mentjoba banjaknja hasil boeat pemeriksaan landrente oentoeok mendapat keterangan tentang hasil padi yang pertama dan hasil padi yang kedoea.
- (2) Pada tanah2 pangkat yang tidak dikenakan landrente sebagai antaranja dimakoedkan pada (1) ajat b fatsal ini terhitoeng tanah2 yang ditoendjoekkan oleh Pemerintah2 Keradjaan oentoeok marka itoe (padjakai, bitjarakai, sekoeroekai), oentoeok kepala Sedjeneli (djenelikai), oentoeok Gelarang dan Kepala kampoeng (gelarangkai) dan oentoeok pegawai2 kepemerintahan pengairan (so) ja'itoe: pengita raba, poenggawa oi dan poenggawa koeta.

Fasal 3.

Oentoeok memoengoet landrente, tanah itoe dibagi atas doea bahagian, ja'itoe:

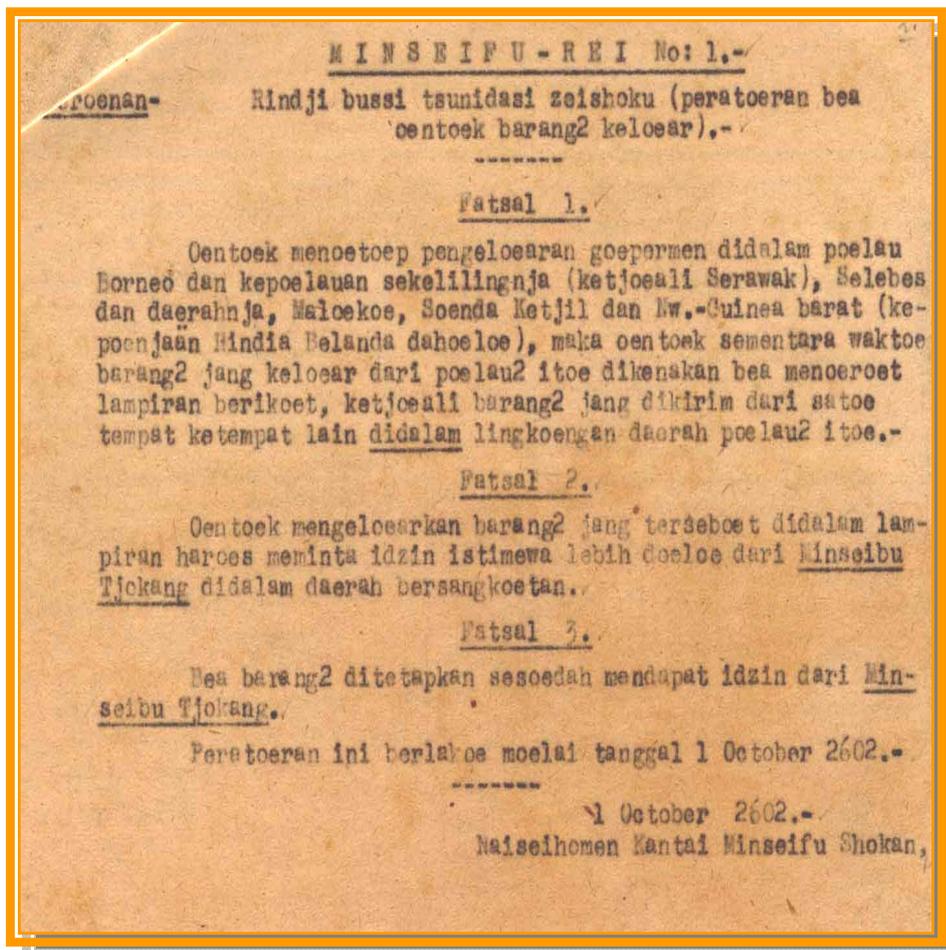
- 1e. sawah;
- 2e. tanah kering, empang dan tanah pegaraman.

Fasal 4.

- (1) Tanah didalam tiap2 gelarangschap ataukampoeng yang diwadjabkan kena landrente diboekoer memoeroet satoe2 perceel, ja'itoe oleh pegawai yang ahli memoeroet atoeran yang dengan choesoes ditetapkan oentoeok itoe.
- (2) Yang dikatakan perceel, ialah sekoempoelan salah satoe djenis tanah yang terseboet pada fasal 3 yang ditentoeokan dengan batas tanah yang djataakan dalam atoeran yang dimakoed dalam ajat pertama fatsal ini.

Bagian awal Peraturan tentang hal pengenaan dan memungut pajak penghasilan di atas tanah-tanah kerajaan Bima dan Dompoe, *afdeling* Sumbawa, Sumba, dan dan daerah Ta'loeknya, 15 Mei 1941

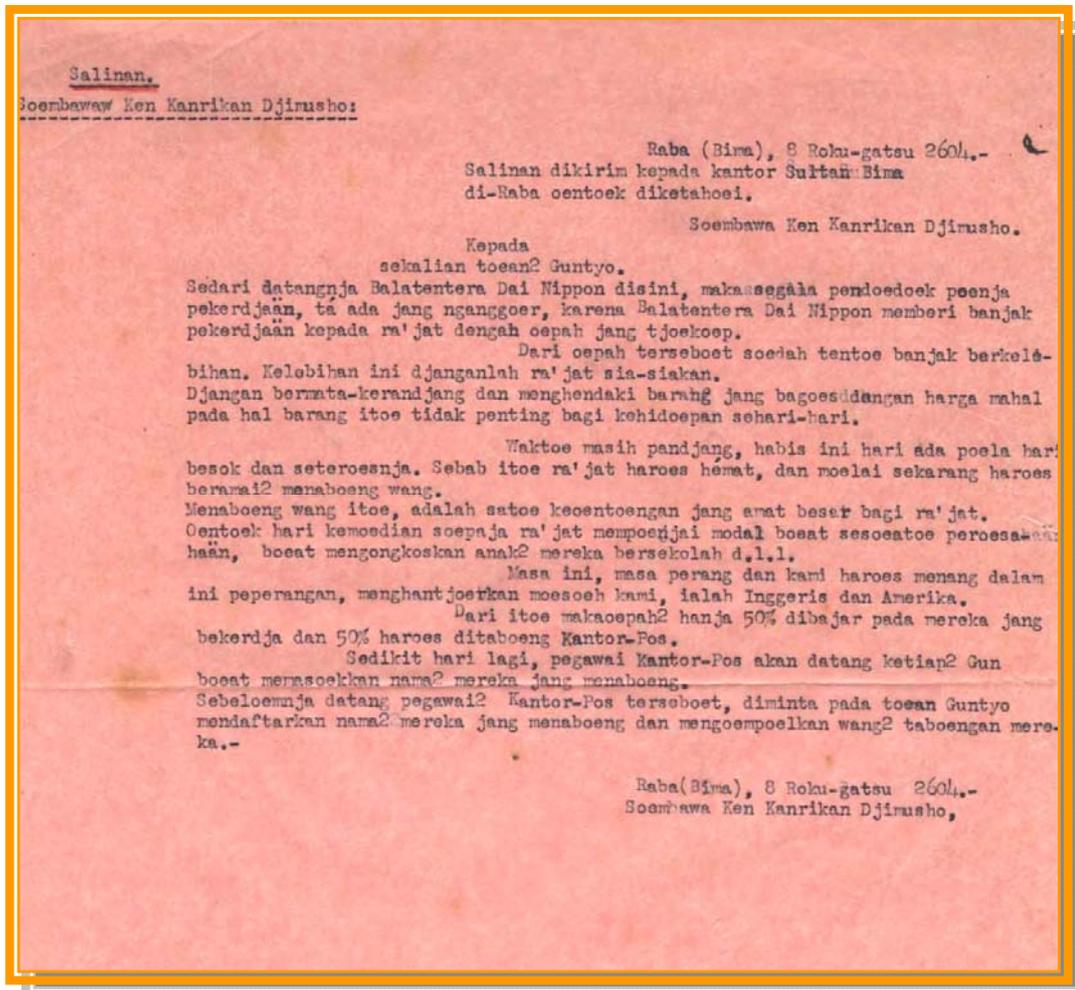
ANRI : Kerajaan Bima No. S45



Bagian awal dari Peraturan tentang bea pengiriman barang-barang keluar dari pulau Borneo, Celebes, Maluku, Sunda Kecil dan New Guinea Barat,

± 1942.

ANRI : Kerajaan Bima No.M40



Surat-surat Sumbawa Ken Karrikan Djimusho tentang kewajiban
menabung ke kantor pos sebesar 50% dari upah yang dibayar,
8 Juni 1944

ANRI : Kerajaan Bima No.S95

DAFTAR - PENETAPAN dari harga pasar di-BIMA/RABA dari barang-barang makanan dan lain-lain, mulai bereskrce tanggal 1 Juni-tahun 1944.

No.	Nama - barang	Banyaknya atau beratnya.	Harga penetapan	Keterangan.
1.	Teloer aja	1 boetir	0.01	
2.	Dendeng kerbau	1 kg.	0.25	
3.	Pisang mada besar	4 boeah	0.01	
4.	Tauge (1 kg.= 24 takar)	4 takar	0.01	
5.	Teloer bebek	1 boetir	0.02	
6.	Doerlan besar	1 boeah	0.12	
7.	Zuurzak (groso) Djawa	1 "	0.03	
8.	Pisang Ambon (kalo Djawa)	2 "	0.01	
9.	Tembakau + bea 30%	1 londa (70 gr.)	0.12	
10.	Laboe pandjang	1 boeah besar	0.03	
11.	Djagoeng toea (kering)	1 nggampo (20 boeah)	0.07	
12.	Tomate (sedang)	4 boeah	0.01	
13.	Pisang moeda	8 bidji	0.01	
14.	" toea	4 "	0.01	
15.	Kelapa toea besar	1 "	0.04	
16.	" " sedang	1 "	0.03	
17.	" " ketjil	1 "	0.02	
18.	Pisang soeoe	3 boeah	0.01	
19.	Rami	25 bidji	0.01	
20.	Katjang goreng mentah belcaem dikoespas	1 kg.	0.06	
21.	Ketimoen	3 boeah	0.01	
22.	Lombok besar	7 "	0.01	
23.	Teroeng besar	3 "	0.01	
24.	Nenas masak	1 "	0.04	
25.	Pisang batoe jang moeda	1 stair	0.02	
26.	Pepaja masak, besar	1 boeah	0.04	
27.	" " , sedang	1 "	0.03	
28.	" " , ketjil	1 "	0.02	
29.	Bawang merah	1 kg.	0.05	
30.	Limas besar	1 boeah	0.03	
31.	Oebi ka Joe	1 kg.	0.03	
32.	Oebi djalar	1 "	0.02	
33.	Baoen Sirih	4 kaba (ikat)	0.01	
34.	Sirihkaja besar	4 boeah	0.02	
35.	Kaloentj moeda	2 boeah	0.01	
36.	Karapa (soekoen) masak	1 "	0.01	
37.	" " moeda	2 "	0.01	
38.	Katjang pandjang	1 ikat (1 ikat= 5 bidji)	0.01	
39.	Bangkaeng	10 (1 kg.)	0.01	
40.	Djerook nipis besar	2 boeah	0.01	
41.	" " ketjil	4 "	0.01	
42.	Oedang	1 kg.	0.15	
43.	Oedang haloes (sepi)	1 perloek (5 kg.)	0.75	
44.	Daging kerbau baeah (mentah)	1 kg.	0.15	
45.	Ikan londe	1 ekor	0.06	
46.	" laot tjampoeren	1 kg.	0.10	
47.	" bangoeng besar	1 ekor	0.05	
48.	" " sedang	1 "	0.04	
49.	" " ketjil	1 "	0.02	
50.	" Tampole besar	1 "	0.05	
51.	" " sedang	1 "	0.03	
52.	" " ketjil	1 "	0.01	
53.	" Kepiting besar	1 "	0.03	
54.	" kering (Oeta Sono)	1 kg.	0.25	
55.	" " (Oeta Kare) besar	2 "	0.25	
56.	" " " sedang	18 "	0.15	
57.	" " " ketjil	1 "	0.05	
58.	Nasi bamboe	1 taboeng besar	0.10	
59.	" " " sedang	1 "	0.07	
60.	" " " ketjil	1 "	0.05	
61.	Alang-alang (atap)	1 ating	0.02	
62.	Bamboe jang besar	1 batang	0.10	
63.	Gedek (wide) 1 1/2 x 1 1/2 M.	1 lembar	0.10	
64.	Sapoeng Bima (dibikin dari kapas Bima)	1 lembar	3.50	
65.	Ayam jang besar	1 ekor	0.25	
66.	" " sedang	1 "	0.15	
67.	Geela merah (hanggarai) besar (= 700 gr.)	1 bidji	0.04	
68.	" " " ketjil	1 "	0.02	
69.	Bawang poath (ntioens) besar	1 "	0.03	
			0.01	

Daftar penetapan harga pasar di Bima/Raba dari barang-barang makanan, sayur mayur dan buah-buahan, 1944

ANRI : Kerajaan Bima No.M40

= Salinan =

Kantor Pos Bima, 21 Sangatsu

Pemberian - tahoe.-

Batasnya dicemlah wang yang boleh dikirim.-

1. Didalam poelau ^{sepedi}sebanjak-banjaknja boleh kirim wang / 1000,- oleh satoe orang dalam tempo satoe boelan. Bila perloe Minseitjo Tyokan, Kenkanrikan, Bunkenkanrikan, (pembesar2 ini selandjoenja akan diseboet "Minseitjo" memberi idzin kepada orang yang memadjoekan permohonan centoek menjimpan dari ketetapan ini.-
2. Keloe ar poelau sediri, / 20.- seseorang dalam tempo satoe boelan. Bila perloe "Minseitjo" memberi idzin kepada yang mengoendjoekkan permohonan centoek menjimpan dari ketetapan ini, sebagai perketjoesalian; misalnja centoek belandja ^{shidoe}shidoepan, pengadjaran, sampai sebanjak2nja / 200,-
3. Djika ^{tempat}tempat kantor pos tidak ada Minseitjo, soerat permohonan haroes dikirim kepada Minseitjo yang terdekat. Soerat permohonan itoe bisa dapat dengan pertjoema dikantor pos.-
4. Soerat permohonan itoe haroes diperiksa oleh Minseitjo. Apabila tjoekoep alasannja centoek diberi idzin, Minseitjo memberi keterangan diatas permohonan itoe, selandjoenja dikirim kepada kantor pos pengirim.-

Peberiantahoe.-

Dengan ini diberitahoekan kepada toean2 sekalian, bahwa T a b o e n g a n - p o s telah diboeka kembali. Dari itoe diminta dengan hormat soepaja toean2 soedi menaboeng wang toean di Kantor pos terseboet. Dibolehkan menaboeng sekoe-rang2nja / 0.25. Disamping itoe diharap djoega toean2 memberitahoekan kepada pegawai2 toean dan teman2 lainnja. ^{hidat}hidat menjimpan dan meminta wang toean2 itoe-pertanjaan pandjang lebar lagi, Pendeknja menaboeng dan meminta wang kembali kita kerdjakan dengan moedah sadja.-

M a l o e m a t.

Diberitahoekan kepada t o e a n 2 - n j o p j a 2 sekalian ja-
itoe soerat2 yang dikirim perantaraan kantor pos hanya
dibolehkan memakai 2 bahasa sadja:

1. b a h a s a Indonesia.
2. " Nippon.

Soerat2 tidak boleh tertoe toep; terketjoesali soerat2 dines.
Dan diatas itoe soerat2 tidak boleh ada tanggalnja tertoe lis

Kepala kantor pos.
Telah ditanda tangani oleh

I n m a i l . -

-----000000000000-----

Surat Kepala Kantor Pos tentang batas jumlah uang yang boleh
dikirim di dalam dan di luar pulau,

1944

ANRI : Kerajaan Bima No.S95

Salinan - Ringkasan:

Hasil wang toendjaagan Pesawat Penempoor Syo Sunda
jang telah disampaikan kehadapan P.T. Soembawa Kentyo
oentoek dilandjoetkan ke Singaradja.

1.	Pendoeoek Woha - gun.....	/ 2825.-	+ / 28.50 = /	2853.50
2.	" Menta - gun.....		" = "	3846.33
3.	" Sape - gun.....		" = "	1322.80
4.	" Wawo - gun.....		" = "	1342.34
5.	" Wera - gun.....		" = "	1211.77
6.	" Doaggö - gun.....	1028.27 + 181.45	" = "	929.72
7.	" Kempo - gun.....		" = "	677.02
8.	" Belo - gun.....		" = "	4873.97
9.	" RasanaB - gun. dan perawai / 1369.91 + / 802.75		" = "	2172.66
10.	" B o l o - gun.....		" = "	5382.81
11.	" Dompoe - gun.....		" = "	2465.05
Djoemlah.....				<u>127077.97</u>
Raba, 30 - 11 - 2604.				

KANTOR KERAJAAN BIMA = Tembusan =

No. 337/17
Lampiran 1803,15

Raba, 2605jam-Sangatsu 1.-

Menjoesoel perla soerat kita tgl. 11-1-2605 No. 53/17,
bernama ini disampaikan dengan segala hormat, wang banjakaja
F1803,15 (Seriboe delapanatoes tiga, 15/100 respiah), janteo
toendjaagan oentoek pembeli "PESAWAT PENEMPOER SYO SUNDA" dari
pendoeoek di Sanggar-gun..... f 1632,80
dan tambahan dari:
pendoeoek di RasanaB-gun..... " 166,85
" " Dompoe-gun..... " 3,50

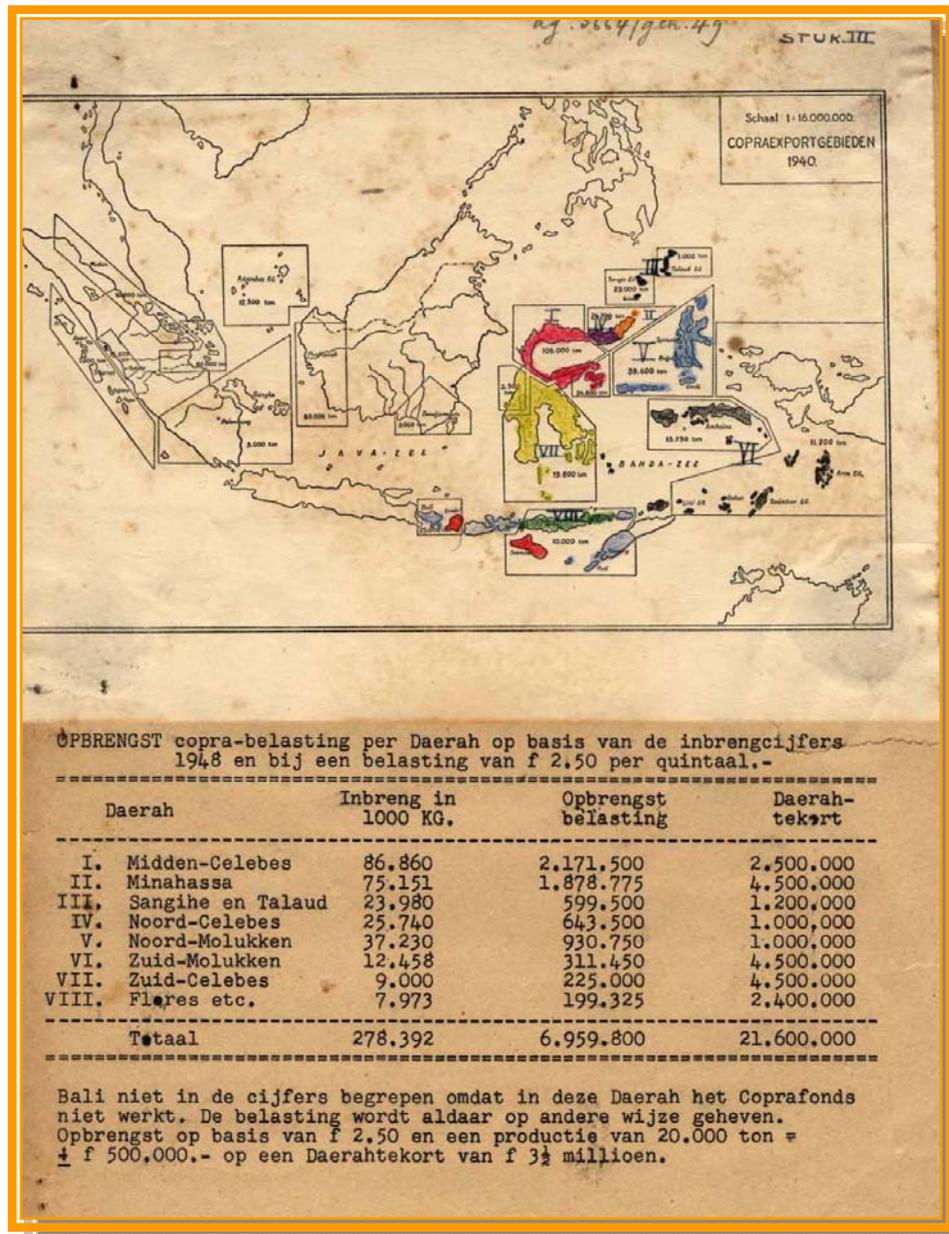
Djoemlah..... f 1803,15

dengan permohonan agar dapat disampaikan landjoet ke-Singa-
radja.-

A.n. Seri Sultan Bima,
Teoreli Ngampo,
[Signature]

Kehadapan
Padoeok Teoem Soembawa Kentyo
di
Raba

Kuitansi sumbangan uang dari penduduk di kerajaan Dompou dan Sanggar untuk pembelian pesawat tempur "Syo Sunda"
30 November 1944
ANRI : Kerajaan Bima No.M46



Pajak kopra per daerah di Negara Indonesia Timur, Bali dan Sumbawa tidak masuk hitungan karena usaha kopra tidak berjalan, 1948

ANRI : Algemene Secretarie No.457

Raba-Bima, 9 November 1946.-

Kehadapan
Padoeka Toean F.W.G.Linck
Assistent-Resident
Soembawa.

Dengan hormat.-

Bersama ini disampaikan, "Keterangan tentang penyerahan mata wang kepada Commandant Djepang" dalam tahoen 1942 dan "Soerat kesaksian tentang pemasokan wang" dalam tahoen 1944.-

Lebih djaceh dima'loemkan, bahwa dari "Keterangan" dan "Soerat kesaksian" terlampir, njatalah bahwa pada waktoe itoe Commandant Djepang Saito menjerahkan pada saja dari djoemlah wang kas kantoorpos jang banjaknja f6826,69½ itoe adalah f1292.98 jaitoe wang simpanan. Dari wang simpanan f1292.98 ini telah diserahkan poela pada sipenjinpan2 banjaknja f633.-- Dan jang sisa lagi sebanjak 659.98 soedah diterima oleh "Soembawa Ken-Kanrikan Djimusho (T.Datoek)" ttgl.17-4-1944 (dipersilahkan lihat "Soerat kesaksian").-

Demikian agar Padoeka Toean ma'loem.-

Seri Sultan Bima,



Surat Sultan Bima tentang penyerahan mata uang kepada
Komandan Jepang,
1946

ANRI : Kerajaan Bima No.S. 133



Kantor Koperasi Perikanan Serba Bangun dengan para anggota
pengurusnya di Bungin, Sumbawa,
26 Oktober 1954

ANRI : Kempen No.541026 NN 4-1



Pemandangan pasar Sumbawa dengan kesibukan penduduk
yang sedang berbelanja,
5 Juni 1955

ANRI : Kempen No.550605 NN 3-1

Pendidikan

I. RESSORT.

Ressort Pemeriksa Sekolah² Ra'jat, ialah seloeroeh Kesultanan Bima, jang berkedoedoekan di Raba. Sekolah-sekolah dalam ressort ini ada jang dapat dikoendjoengi dengan auto atau kenderaan jang lain, dan sebahagian ada jang dapat dikoendjoengi dengan koeda sadja; djoega ada jang boleh dikoendjoengi dengan perahoe, tetapi dalam moesim barat agak berbahaya .-

II. BANJAKNJA SEKOLAH RA'JAT I.-

Pada permolaan tahoen adjaran 2602/2603, jaitoe pada 1 Hachi-gatsu 2602, banjaknja sekolah Ra'jat I ada 42 boeah, jaitoe:

Dalam Kedjenelian RasanaE	7 boeah
" " Wera	2 "
" " Wawo	4 "
" " Woha	3 "
" " Belo	4 "
" " Bolo	6 "
" " Monta	4 "
" " Donggo	2 "
" " Sape	3 "
" " Sanggar	1 "
" " Dompoe	4 "
" " Kempoe	2 "

D j o e m l a h 42 boeah

Pada permolaan boelan Ju-gatsu 2602, diboeka poela seboeah sekolah Ra'jat I dalam Kedjenelian Donggo, jaitoe di Sangari, sehingga banjaknja sekolah Ra'jat I mendjadi 43 boeah.-

Diantara 43 boeah sekolah Ra'jat I itoe, ada 3 boeah jang berkelas IV, jaitoe sekolah Ra'jat I Dompoe (Kedjenelian Dompoe), sekolah Ra'jat I Sila (Kedjenelian Bolo), dan disekolah Ra'jat I (Kedjenelian Sape).-

↳ Sape

Ketiga tempat ini pernah ditempati sekolah Ra'jat. Dalam tahoen adjaran 2602/2603 hanya terdapat doea boeah sadja sekolah Ra'jat I baroe, jaitoe sekolah Ra'jat I Raba II dan sekolah Ra'jat I Sangari .-

Sekalian sekolah² ini diboeka oentoek oemoem, djadi boekan oentoek anak negeri Bima sadja .-

III. BANJAKNJA GOEROE .-

Pada ahir tahoen adjaran 2602, jaitoe boelan Shichi-gatsu 2602, banjaknja goeroe sekolah Ra'jat I 96 orang, jaitoe 41 orang Kepala sekolah dan 55 orang pembantoe. Seorang diantaranya berasal dari sekolah Normal di Makassar tetapi hingga kelas sadja. Ia ini disesoaikan haknja dengan goeroe-goeroe jang berasal dari sekolah Bakal Goeroe Sekolah Ra'jat I .-

Pada ahir tahoen adjaran 2602/2603 banjaknja goeroe pada sekolah Ra'jat I, ada sebagai jang ternjata dibawah ini:

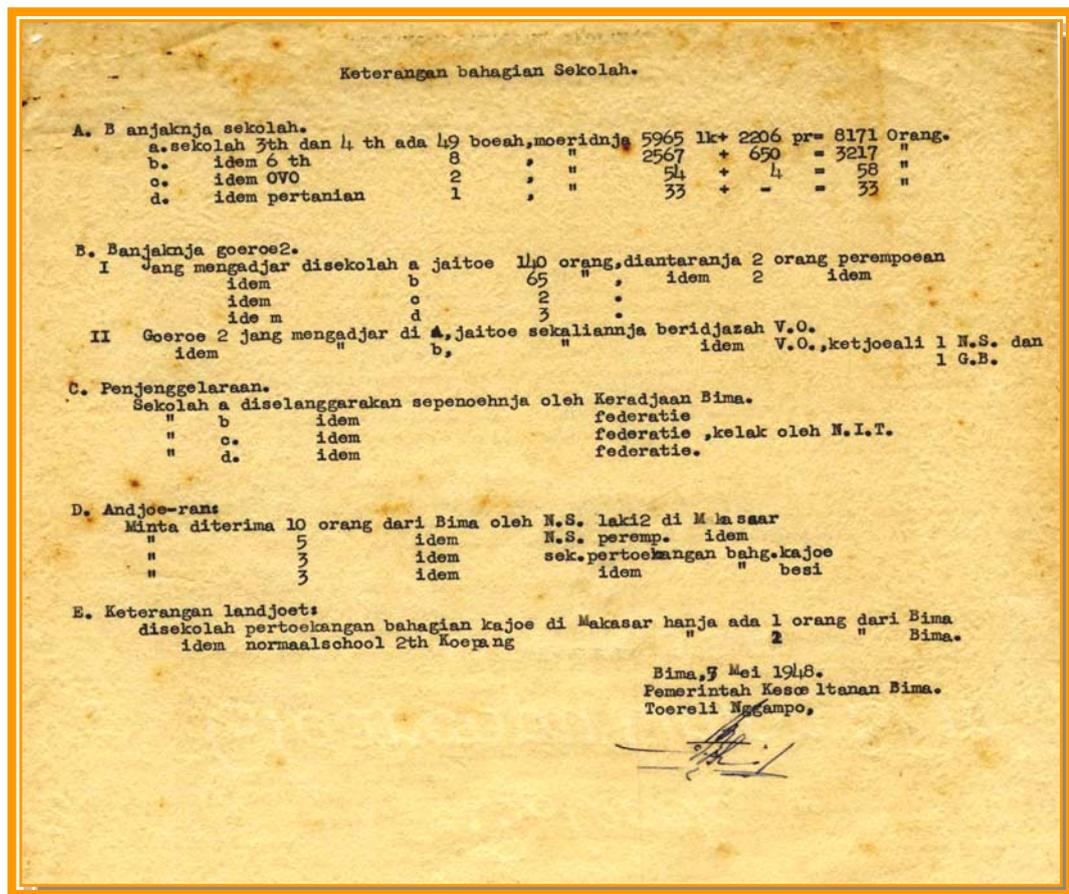
Kedjenelian	Banjak sekolah	Kepala sekolah	Pembantoe	Djoelahnja
RasanaE	7	7	10	17
Wera	2	2	2	4
Wawo	4	4	6	10
Woha	3	3	4	7
Belo	4	4	6	10
Bolo	6	6	9	15
Monta	4	4	4	8
Donggo	3	3	2	5
Sape	3	3	6	9
Sanggar	1	1	1	2
Dompoe	4	4	7	11
Kempoe	2	2	5	7
Djoemlah:	43	43	62	105

Bertambah -

Bagian awal dari Laporan Tahunan Dinas Perguruan antara lain tentang sekolah rakyat di Kesultanan Bima,

21 Mei 1943

ANRI : Kerajaan Bima No.S90



Daftar jumlah sekolah beserta murid-murid dan guru-guru di
Kesultanan Bima,
5 Mei 1948
ANRI : Kerajaan Bima No.M61

SALINAN:
A.R. No. 77/5/S.E.F. *Kembah* *19/6-48* M O S I .

Sidang pengoes serta pengadjaran2 dari sekolah menengah partikelir di Soembawa-Besar, jang dihadiri djoega oleh Padoeka Toean Dea Dipati, anggota Madjelis Pemerintah Kesultanan Soembawa serta Toean Pemeriksa sekolah (Schoolopziener) Soembawa, jang diadakan pada tanggal 18 Juni 1948:

- Menimbang,
1. bahwa pengembangan jang merata dari oeroesan pergoeroean dalam lingkoean Negara Indonesia Timor kini sangat diboektikan oleh jang bei wadajib adalah soeatoe kenjataan jang ta' dapat dibantah,
 2. bahwa dalam keresidenan Timor dan DaErah Ta'loeknja beloem terasa oleh jang berwadajib, didaErah Soembawa boeat mengadakan sesoetoe sekolah jang lebih tinggi dari pada jang telah berada sekarang misalnya S.M., sebagai djoega jang telah kadjadian di lain2 daErah dalam keresidenan.
 3. bahwa djikalau ditilik kadjoeroesan tentang banjaknja pendoeok, banjaknja sekolah2, serta ditilik poela kepada kema'moeran Negri, maka daErah Soembawa haroes diakoel tidak kalah dari tetangga2nja dalam keresidenan.
 4. bahwa menilik kepada keadaan sekolah menengah partikelir, jang didirikan pada tanggal 15 October 1947, jang hingga kini dapat berdjalan dengan baik.

- Menimbang poela
1. bahwa oentoe mendirikan soeatoe sekolah Menengah jang sempoerna (volwaardig) di Soembawa terdapat goeroe2 jang diperloekan, jaitoe seorang goerce jang berdiploma Hoofdakte dan beberapa orang goerce jang berdiploma Kweekschool dan Normalschool.
 2. bahwa oentoe keperluan itoe dapat disediakan djoega roemah sekolah dan bangkoe2nja.

Memotookkan.
Minta kepada Padoeka Jang Moelia Mantari Pengadjaran dari Negara Indonesia Timor agar di Soembawa-Besar dengan selekas moengkin, djika dapat moelai dengan tahoen adjaran 1948 - 1949 sekolah Menengah partikelir jang telah ada sekarang dapat dimiliki (dibelandjai) oleh Negara Indonesia Timor.

Soembawa-Besar, 19 Juni 1948.-

Atas nama Pengoes sekolah Menengah Partikelir Soembawa:
Ketoea I,
W.R.R. Toersino.-

Kehadapan
Padoeka Jang Moelia Mantari Pengadjaran
Negara Indonesia Timor

di
MAKASSAR

Temboesan diaotoerkan kepada:

1. Padoeka Toean Residen Timor dan DaErah Ta'loeknja di Koepang,
2. Padoeka Toean Assistant Resident Soembawa di Soembawa-Besar,
3. Seri Sultan Soembawa/Ketoea Federatie Poelau Soembawa di Soembawabesar,
4. Padoeka Toean Ketoea Dewan Poelau Soembawa di Soembawa-Besar,
5. Padoeka Toean Hoofd van Plaatselijk Bestuur/Sch. Com. di Soembawa-Besar,
6. Padoeka Toean Inspecteur Middelbaar Onderwijs di Makassar,
7. Padoeka Toean Kepala Dienst Onderwijs di Koepang,
8. Padoeka Toean2 anggota Madjelis Pemerintah Kesultanan Soembawa.

SOEMBAWA EILAND FEDERATIE.

No. 77/5.-

Soembawa-Besar, 30 Juni 1948.-

Dengn segala hormat diaotoerkan langsoeng salinen kehadapan Seri/Padoeka Toean oentoe dapat ma'loem.-

Kehadapan
Seri Padoeka Toean Koe Sultan Bima
di
B i m a . -

a/n Ketoea Federasi Poelau Soembawa,
Ambtenaar Federasi Soembawa,
(Djoenaidi)

Ingekamen 19/6-48.

Agenda No. 2326/48.

Mosi Pengurus Sekolah Menengah Partikelir Sumbawa mengenai pendidikan antara lain agar Negara Indonesia Timur memiliki Sekolah Menengah Partikelir,
30 Juni 1948
ANRI : Kerajaan Bima No.S103



Sekolah Menengah Pertama Mataram di Lombok,
20 September 1951

ANRI Kempen No.510920 MM 44



Murid-murid Sekolah Rakyat sedang menanti kedatangan
Gubernur Sunda Kecil beserta rombongan
di depan rumah kediaman Sultan Bima,
30 Agustus 1952

ANRI Kempen No. 165-10

Kebudayaan



Bejambek, upacara seserahan kepada calon
penganten wanita, di Lombok,
20 September 1951

ANRI Kempen No.510920 MM 31



Pertunjukan tari Gandrung di Mataram, Lombok,
18 Mei 1954

ANRI Kempen No.540518 MM 1-2



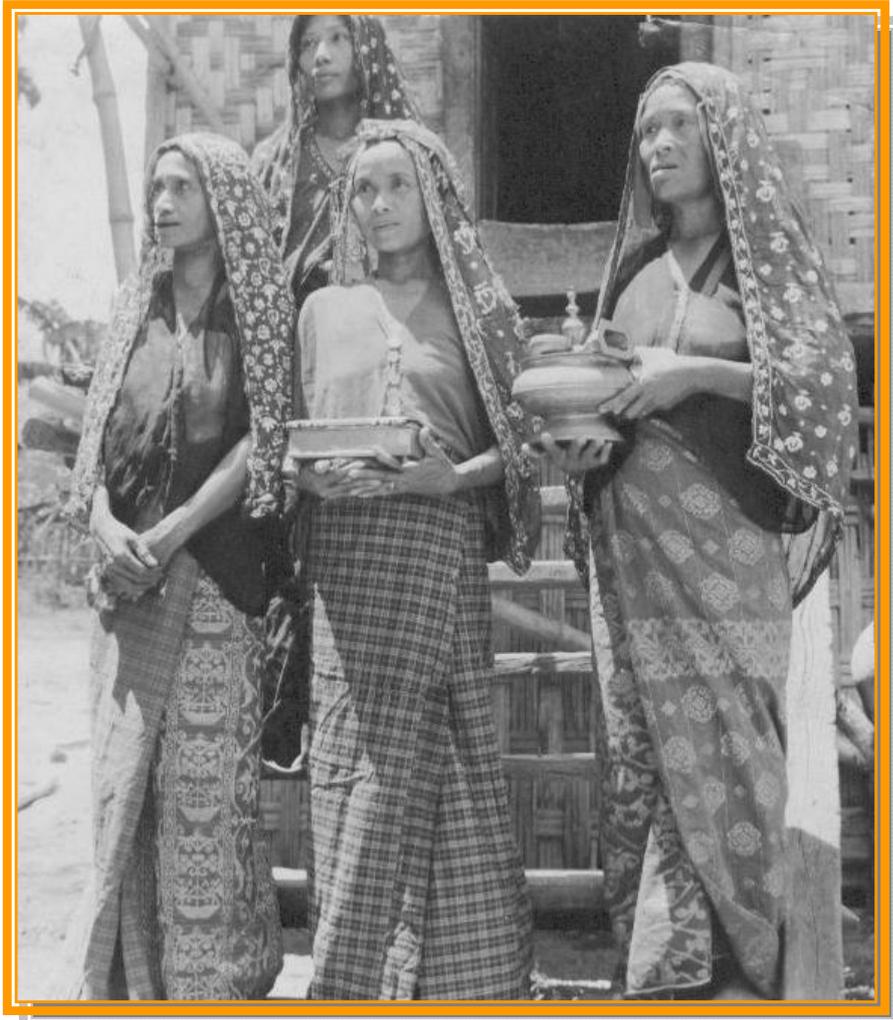
Pertunjukan tari Bumbung di Mataram,
18 Mei 1954

Arsip Kempen No.540518 MM 1-1



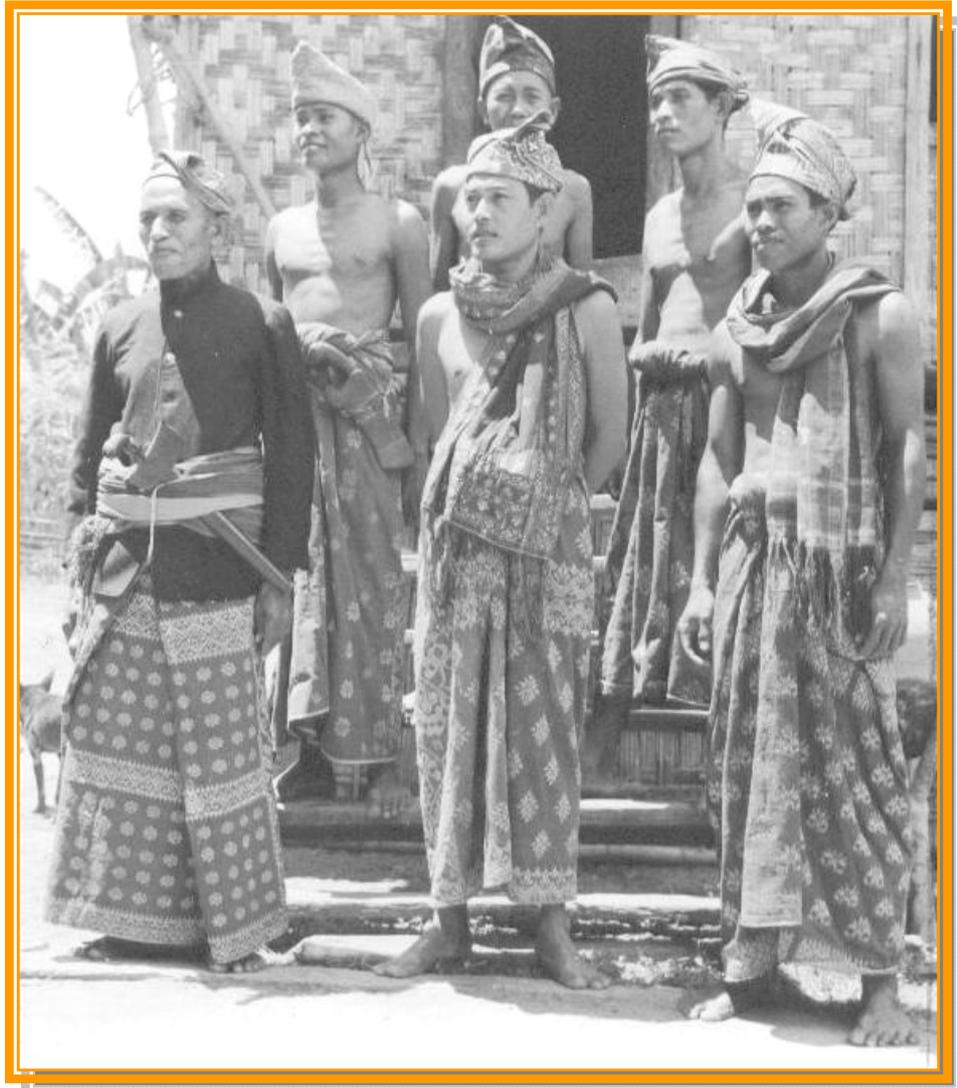
Keluarga Petani berpakaian adat di salah satu desa di Sumbawa,
26 Oktober 1954

ANRI : Kempen No.541026 NN 8



Empat orang wanita suku Sumbawa
berpakaian adat berdiri di depan rumahnya,
26 Oktober 1954

ANRI : Kempen No.541026 NN 3



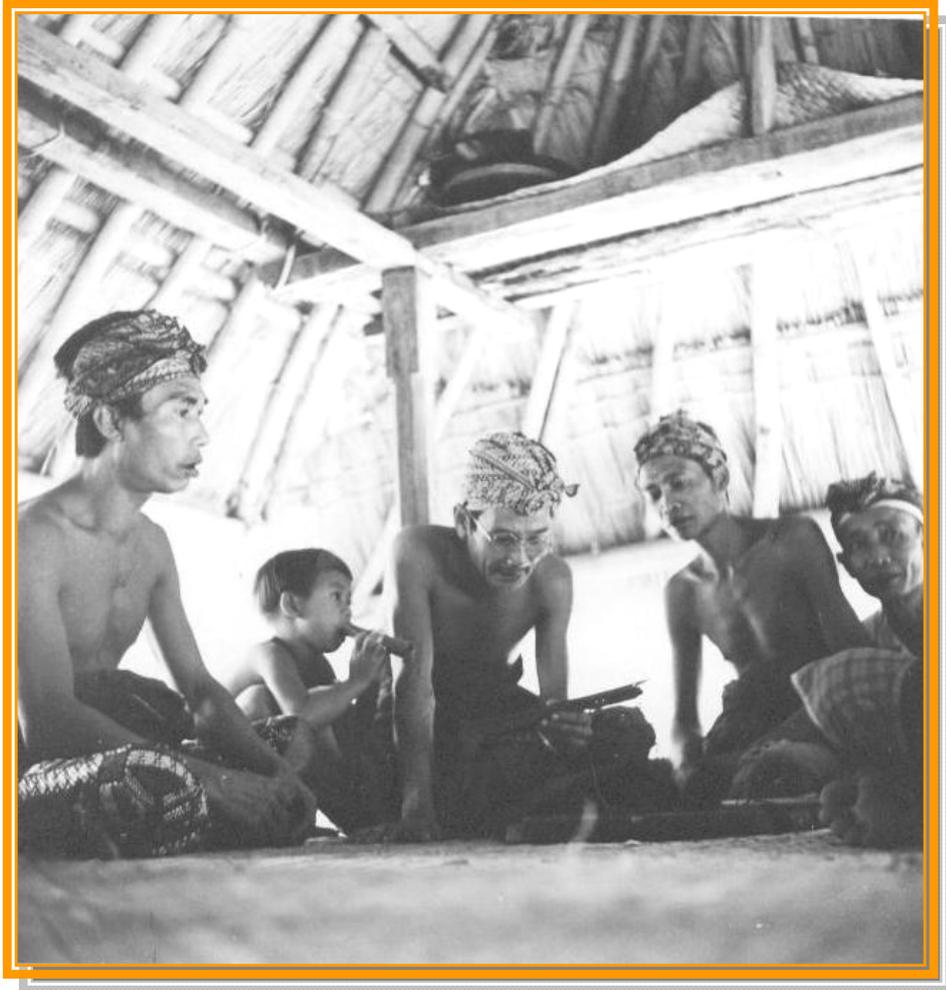
Laki-laki suku Sumbawa berpakaian adat di muka
rumahnya, Sumbawa.

26 Oktober 1954

ANRI : Kempen No.541026 NN 2



Kuburan raja-raja dahulu kala di Bima,
3 November 1954
ANRI : Kempen No.541003 NN 2



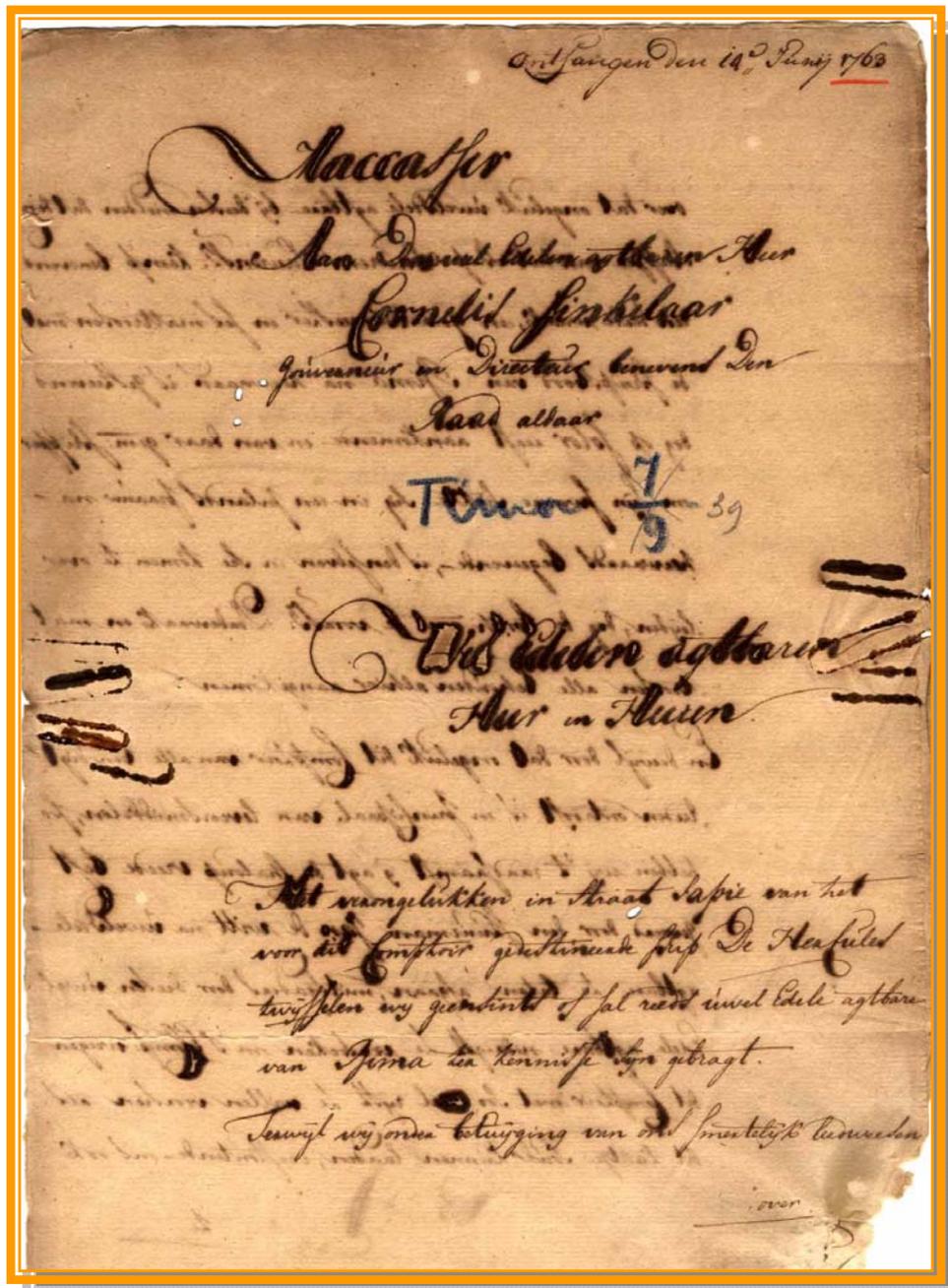
Suku Sasak sedang membaca daun lontar, Lombok,
1 Agustus 1960

ANRI : Kempen No.600801 MM 1



Peringatan 15 tahun pengangkatan Sultan Sumbawa,
± 1956
ANRI : Kempen RVD No.A 1540/47

Transportasi

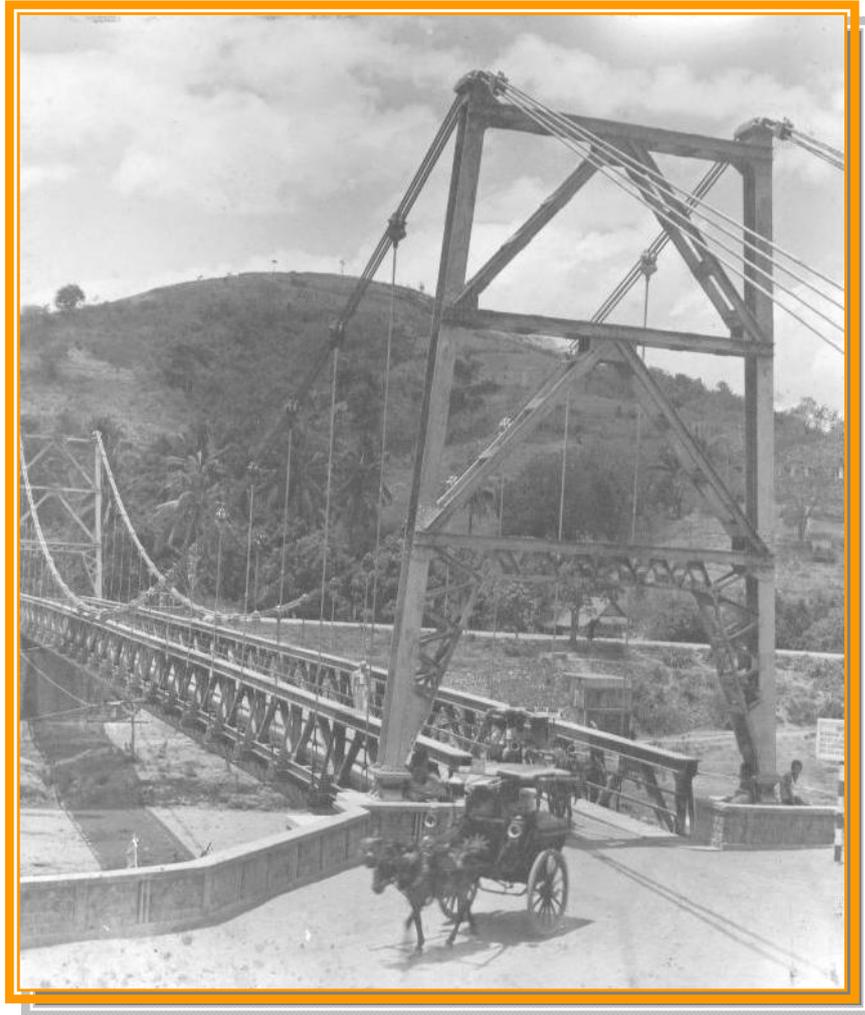


Surat kepada Cornelis Sinkelaar, gubernur di Makasar mengenai musibah kapal *de Hercules* di selat Sapie berikut kelasi-kelasi yang menjadi korban. Berita disampaikan oleh pejabat VOC di Bima,
2 Mei 1769
ANRI : Timor No.18



Kapal yang akan mengangkut barang-barang hasil bumi dari pulau ke pulau di pelabuhan Bima, 16 September 1951.

ANRI : Kempen No.510916 NN 6



Sebuah jembatan yang digabung dengan *Aqueduct* di desa Gerung, Lombok Barat, 20 September 1951

ANRI : Kempen No. 510920 NN 8



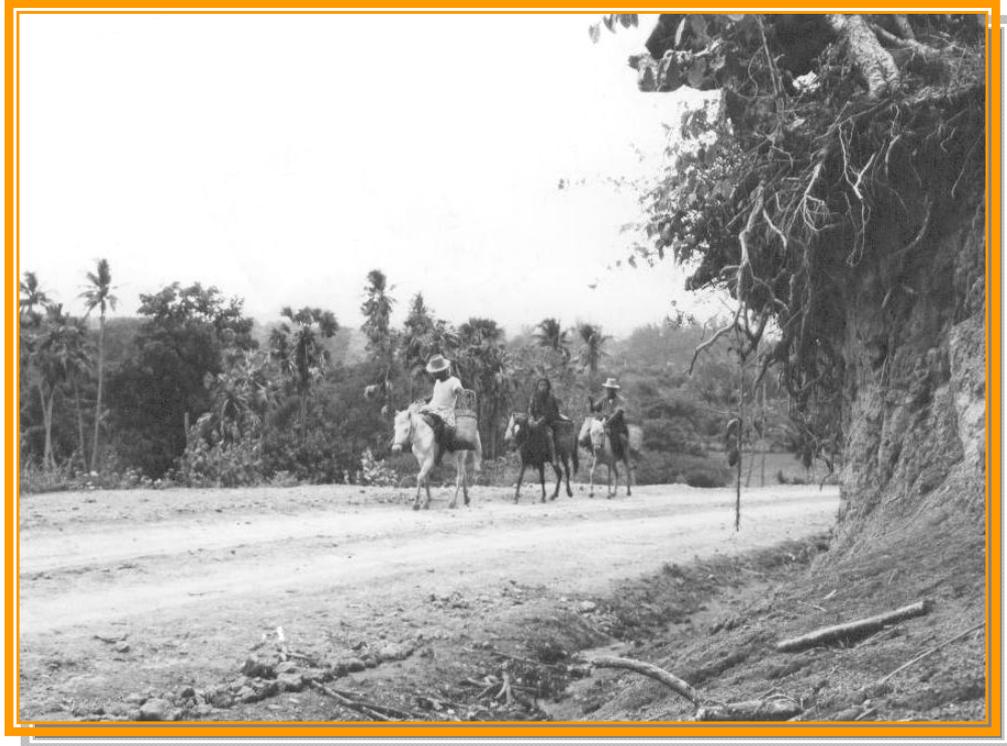
Gerobak kuda sebagai alat untuk mengangkut kacang tanah,
Lombok Barat,
21 September 1951.

ANRI : Kempen No.K 510921 MM 31



Pedagang naik kuda dan petani membawa padinya pergi ke pasar, 25 April 1954.

ANRI : Kempen No.520425 NN 142



Kuda tunggang yang terdapat banyak di Sumbawa yang digunakan oleh rakyat sebagai alat pengangkut dari desa ke kota Sumbawa,
29 Oktober 1954

ANRI : Kempen No.541029 NN 1-3



Pembukaan lapangan terbang Rembiga oleh menteri
Perhubungan di Lombok,
13 Januari 1959
ANRI : Kempen No.441/B

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
MATARAM (LOMBOK)

No. : Pemek. 33/17/125. Mataram, 26 Februari 1969.

Lamp.
Hal : Permohonan membeli kapal
KARAWATU ex PELNI.-

Kepada
Jth. 1. Bapak Menteri Keuangan
2. Bapak Menteri Perhubungan
di-
DJAKARTA.

Dengan hormat.

1. Kami Pemerintah Nusa Tenggara Barat menjambut dengan gembira Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 8 Djanuari 1969 No. Kep. -5/MK/V/69, tentang PENENTUAN NILAI DARI No. K.14/1/5 phb PADA KAPAL KAPAL MILIK PN.PELNI SEBAGAI PERANAMAN MODAL, berikut dengan lampiran.
 2. Dari lampiran tersebut kami membuat daftar nama2 kapal, tyfe, Dwt, tahun pembuatannya dengan nilai Dl. US \$ dengan kursnja dalam rupiah jang djumlahnja ± 86 buah kapal.
 3. Jang menarik perhatian kami adalah kapal Karawatu tyfe Gen.Cargo, DWT 2252/172 ex pembuatan 1957 harga US \$ 224.500 nilai Rp.73.187.000.
 4. Sebagai dimaklumi bahwa Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari gugusan Pulau2 jang sangat memerlukan alat perhubungan baik dengan kapal laut, maupun udara untuk tugas pemerintahan, kelantjaran ekonomi/perdagangan interinsulair maupun export dan penumpang umum, dimana alat2 pengangkutan untuk itu sangat kurang sekali, lebih2 untuk menghadapi Repelita tahun 1969 ini.
 5. Berhubung dengan itu kami sangat berhasrat untuk memiliki sebuah kapal untuk mengatasi kesulitan perhubungan tersebut.
 6. Maka berkenaan dengan hal2 diatas sesuai pula dengan Surat Keputusan Bersama tersebut maka dengan ini kami mengajukan permohonan/melamar untuk turut serta membeli kapal ex PELNI bila kapal Karawatu sebagai tersebut pada angka 3 diatas dengan sjarat2 jang lebih ringan.
 7. Technis pelaksanaan pembayarannya kami kuasakan kepada P.T.Pelajaran Nusantara Nusatenggara, dan selandjutnja pengoperasian kapal tersebut akan diserahkan kepada P.T.Pelajaran Nusantara Nusa Tenggara dimana Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saham 20 %.
- Mengharap lamaran ini dapat diterima dan memperoleh kabar setjepatnja untuk langkah selandjutnja.

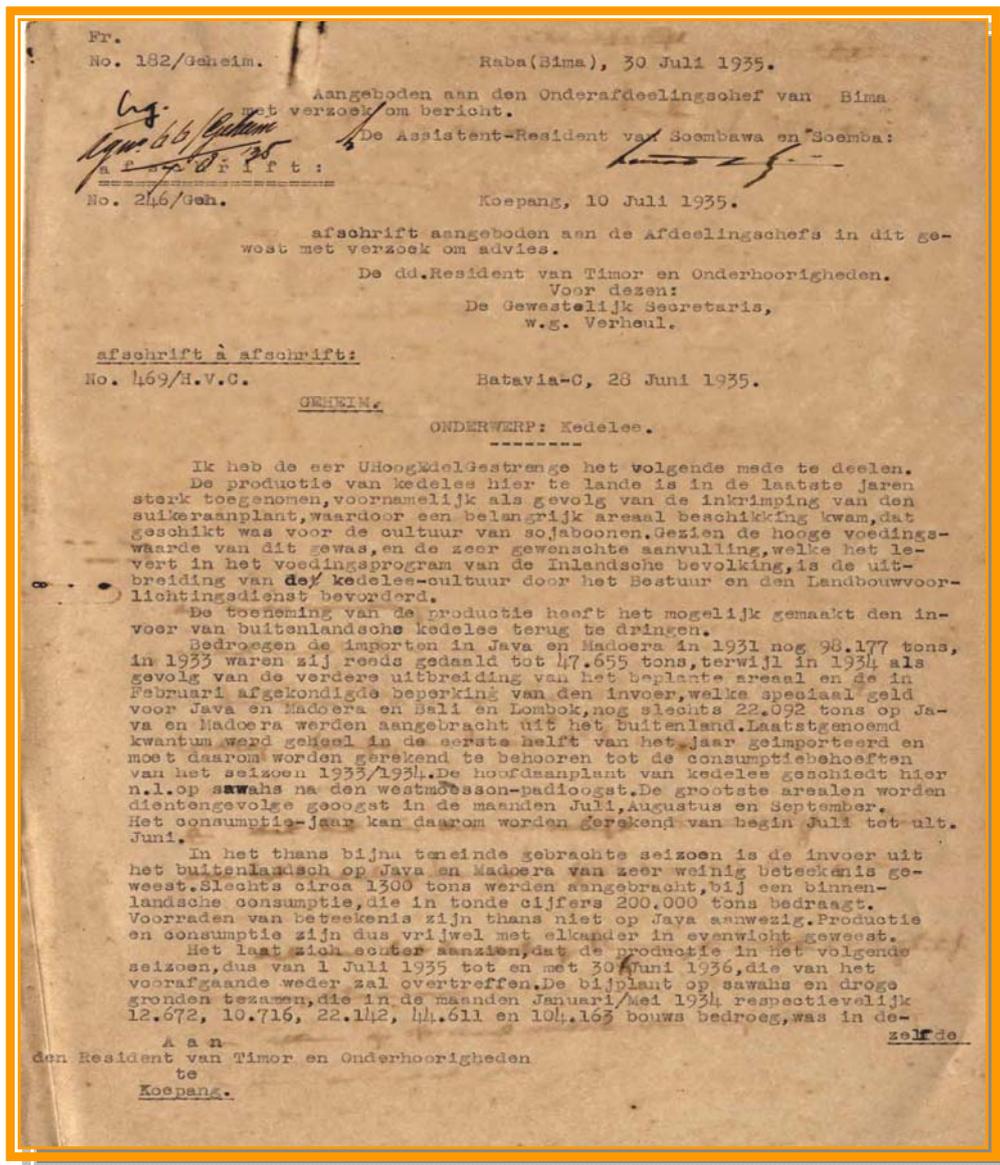

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT.
R. WASITA KUSUMAH
Inf. Hrp. 116.16.-

TEMBUSAN dikirim kepada :
Direktur P.T.Pelajaran Nusantara
Nusa Tenggara di Denpasar.-

Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang permohonan
membeli kapal Karawatu eks Pelni,
26 Februari 1969.

ANRI : Kementerian Keuangan No.436

Pertanian



Bagian awal dari Surat kepada Residensi Timor
tentang produksi hasil pertanian kedelai di wilayah Bima,
30 juli 1935

ANRI : Kerajaan Bima No.M29

=Wak=

Salinan: D A F T A R -

Taksiran hasil padi ladang taheon 2604.-

No.	Kedjenelien.	Loesanja terhitung H. A.	Hasil per H.A. terhitung K.G.	Mendjadi hasil semoes K. G.	Keterangan
1.	Belo	214.15	1550	331932	
2.	Bolo	450.00	1550	3) 784825	1/2 bhg.keroesa-
3.	Donggo	284.50	1550	4) 1540975	kan.
4.	Monta	410.98	1650	678117	
5.	RasanaE	1106.25	1340	988250	1/3 " "
6.	Sanggar	447.69	1650	492459	1/3 " "
7.	Sape	287.47	1340	385209	
8.	Wawo	629.60	1340	632748	1/4 " "
9.	Wera	534.04	1040	370268	1/3 " "
10.	Woha	7.00	1340	9380	
11.	Dompoe	1) 2087.00	1650	5) 1649813	1/3 " "
12.	Kempo	2) 1761.92	1650	1090188	1/4 " "
Djoemlah:		8220.60	--	9154164=	

1) + 1000 h.a. ladang orang2 Donggo dan Bolo.
 2) + 1/2 bahagian ladang orang2 Dompoe dan Donggo.
 3) Soedah masoek hasil dari Dompoe-Gun.
 4) " " " " Dompoe dan Kempo-Gun.
 5) " " " " Kempo-Gun.-

Hasil th. 2603 18939861 K.g. padi kering.
 " " 2604 9154164
 Koerang 9785697=

Raba, 15 Hachi-gatsu 2604.-
 Kepala Padjak Tanah,
 T.d.t.: Djakaria.-

Daftar perhitungan hasil padi sawah
 serta keperluan penduduk dalam kerajaan Bima,
 1944

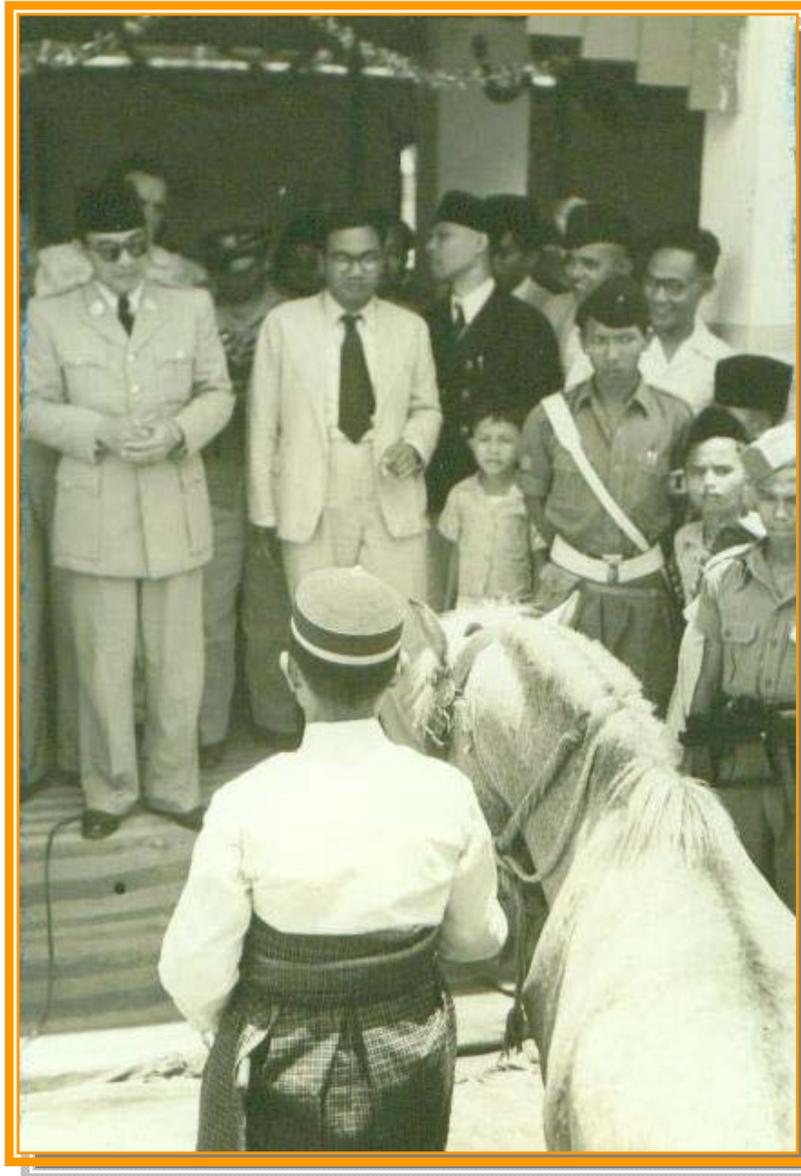
ANRI : Kerajaan Bima No.S99

HAL MENANAM KAPAS.-

1. Kapas itoe sesoewatoe barang jang penting sekali oentoek keperluan hidgep. Ia ad lah bahan2 oentoek didjadikan tjita-tjita dan pakailan Negara2 jang mengeloarkan kapas, ialah Amerika Sarekat, Mesir (Sgypte) dan India. Lain2 Negara oempama: Tjina, Indo-Tjina dan Indonesia djoe-ga mengeloarkan kapas, akan tetapi tiada seberapa banjaknja dan dja-oeh dari pada tjoekeep oentoek keperluan Asia Timoer.
Sesoedah petjah perang di Asia Timoer ini, maka dari Amerika Mesir dan India, kapas tidak dapat didatangkan lagi, karena negara2 terseboet termasuk dalam lingkoengan daerah moesoe. Dalam hal ini tentoe sadja kita haroes berdaja oepaja setjepat moengkin beroesaha menanam kapas agar kita dapat memenehi keperluan kita sendiri dan Asia oemoemnja. Bagi orang tani jang mempoenjai tanah kering (tegalan) adalah ini soewatoe mata pentjaharian baharoe, teristimewa pada tem-pat2 dimana tiada terdapat sawah dan jang koerang soember pentjahari-annja, oempama didesa Ngis, Koeboe, Seraja, Noes Penida dan Boekit. Bagi orang tani ditempat2 itoe kapas itoelah jang mempoenjai banjak harapan.
2. Kapas itoe berdjenis-djenis. Diantara itoe ada djenis kapas jang da-pat hidoep hingga beberapa tahoen dan ada hanja beberapa boelan sadja.
Kapas jang asli di Bali ja'ni kapas jang toemboehnja sampai be-berapa tahoen. Kwaliteitnja tiada baik dan koerang baik dipergoenakan oentoek didjadikan tjita-tjita atau bahan2 badjoe jang oemoem didjoeal ditoko dan harganjapoen rendah, jaitoe harga pasarnja hanja 2/3 dari harga kwaliteit standard (djenis jang oemoem dipakai bahan oleh pabril tenoen), disebabkan oleh koerang pandjangnja ramboet kapas itoe, ka-sar dan kekoekatannjapoen tiada mentjoekeopi. Dalam beberapa tahoen jang telah laloe, teristimewa dalam tahoen 2594-2598 di Djawa telah diadkan pertjobaan2 dengan berpoeloeh2 matjam kapas dari lain negeri dibandingkan dengan kapas asli, ja'ni kapas dari Amerika, Mesir dan India dibandingkan dengan kapas dari Demak, Ponorogo, Palembang, Lom-bok, Flores d.l.l. Dari Pada pertjobaan ini ternjata bahwa hanja ka-pas jang asal dari lain negeri, ialah kapas Cambodja dan Paradenya jang dapat dinarap baik oentoek diperoesahkan di Indonesia.
Djenis kapas Cambodja dan Paradenya asalnja dari India. Kwa-liteitnja itoe sesoewai dengan kapas kwaliteit standard. Hasilnjapoen ada baik djoega. Ditanah jang tiada begitoe djelek, hasilnja 10 sampa 12 q/ha dihitoe dengan bidji. Oemoernja kapas itoe 7-8 boelan. Pada oemoer 4 a 5 boelan boehnja moelai masak dan sehabis dipetik matilah ia, ja'ni pada oemoer 7 a 8 boelan.. Djadi moesim memetik boehnja a-gak lama, jaitoe 2 a 3 boelan.
3. Tempat jang baik oentoek kapas.
 - a. Tempat jang hawanja panas, djadi sebaiknja ditanah rendah. Dipegoe noengan baik djoega hidoepnja kapas asal sadja tiada lebih tinggi nja dari pada 500 m diatas laeet. Lebih tinggi dari itoe misalnja ditempat2 jang banjak kopi, hawanja tiada mentjotjoki lagi bagi ka-pas, sehingga toemboehnja tiada memoeaskan dan hasilnja koerang.
 - b. Tempat jang koerang hoedjannja dan kemarau pandjang.
Sampai oemoer 10 minggu tanaman kapas itoe tahan dengan ba-njak hoedjan, akan tetapi setelah oemoer + 3 boelan, jaitoe pada waktoe boenganja moelai keloeat sebaiknja hoedjan soedah berkoer-rang, sebab air hoedjan itoe dapat meroesakkan boenga. Pada moesim boeah toea dan panen, seharoesnja soedah moesim kemarau. Boeat di Bali masa ini seolah moengkin djatoeh dalam boelan Juni hingga Sep-tember.
 - c. Tanah jang baik oentoek kapas ja'ni tanah liat bertjamboer pasir gember (kruimelstruktur) dan lapisan-atas tanah itoe (tanah jang penting oentoek tanaman) tebal. Biasanja pada tanah dimana dja-goeng dapat menghasilkan, disitoelah baik djoega oentoek kapas. Tanah jang banjak batoenja atau jang ada perasnja tiada baik oen-toek kapas. Tanah jang liat sekali koerang djoega baiknja.
 - d. Kapas itoe boleh ditanam ditegalan dan djoega disawah. Ditempat sawah tentoe sadja tanahnja haroes dikeringkan lebih dahoeloe.
Moesim menanam kapas itoe oentoek di Bali sebaiknja pada moe-lai toeroen hoedjan bersama-sama dengan menanam djagoeng atau gage

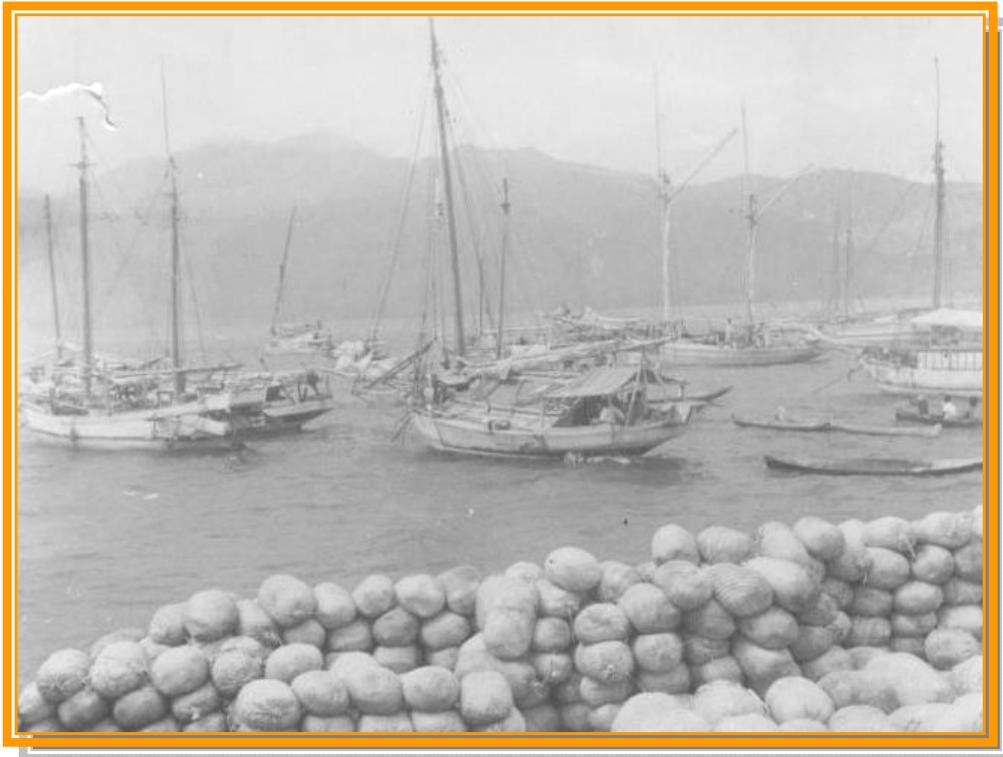
Halaman pertama surat Paduka Tuan Sumbawa Kentyo
tentang peraturan penanaman kapas di Bima,
Januari 1945

ANRI : Kerajaan Bima No.593



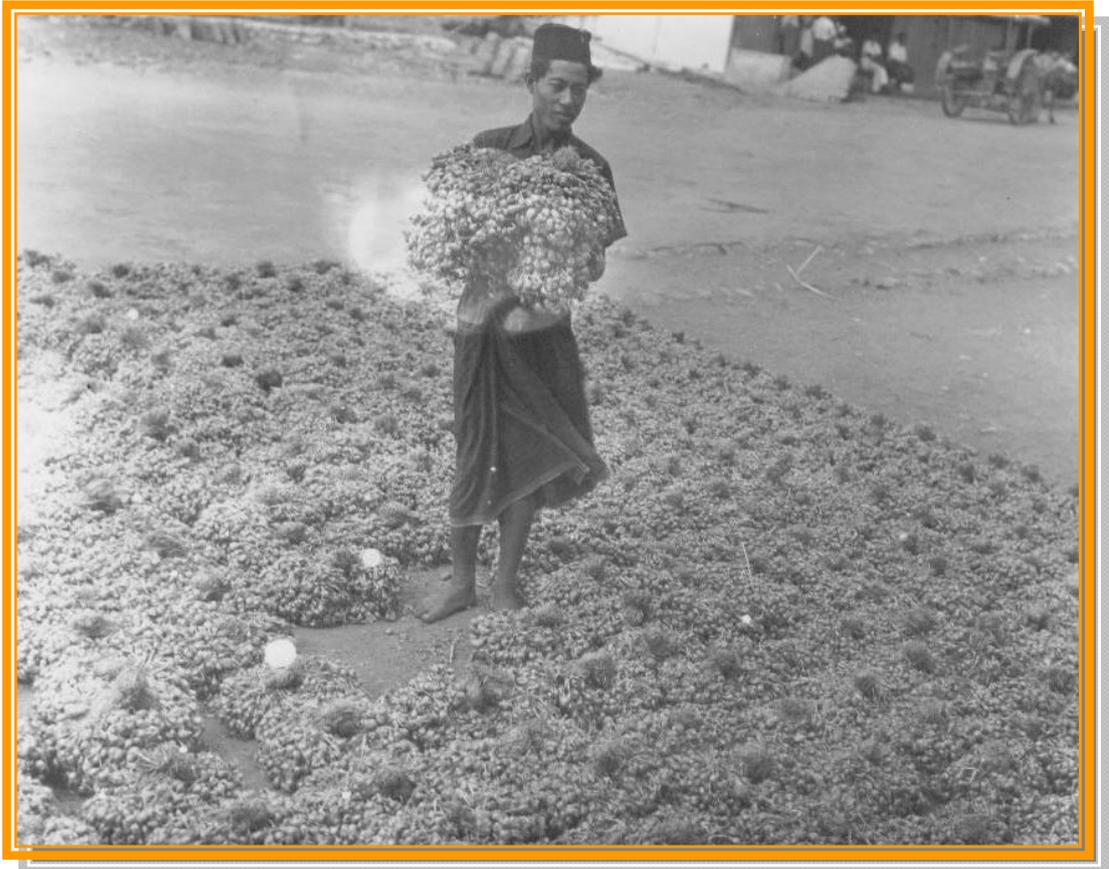
Presiden Soekarno menerima persembahan kuda dari rakyat Sumbawa saat berkunjung ke Sumbawa, 30 Oktober 1950

ANRI : Kempen No.503110



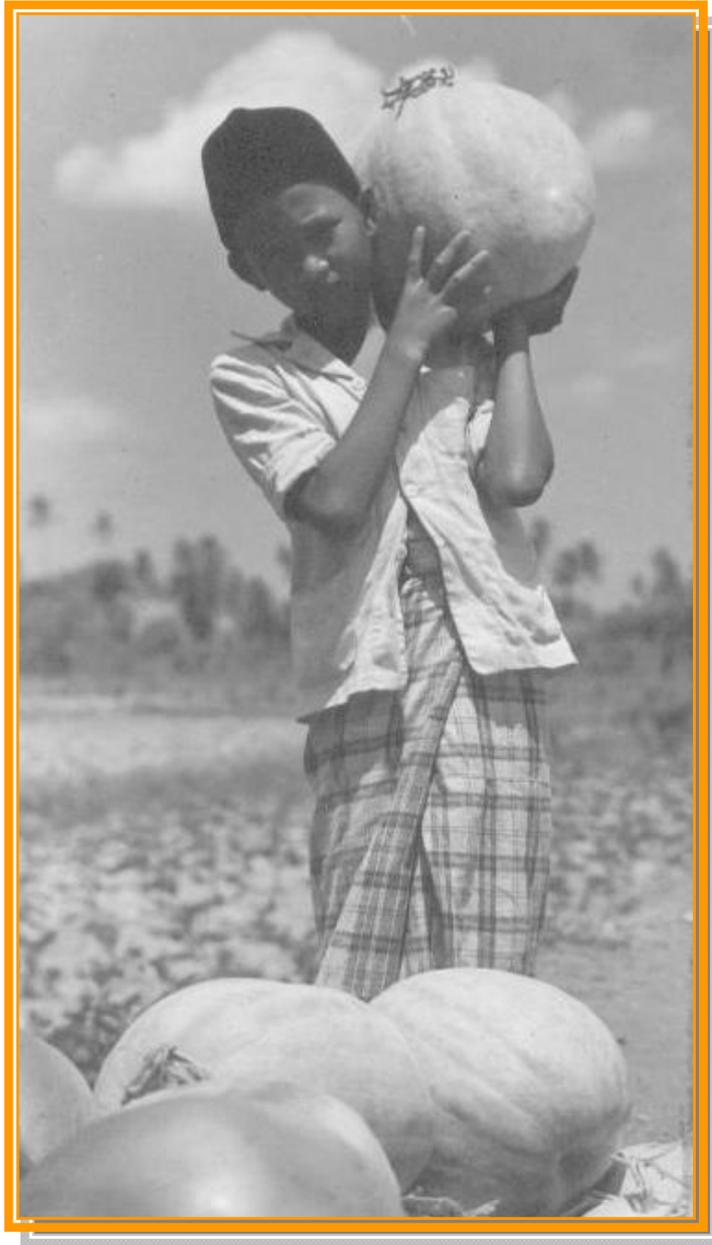
Garam sebagai penghasilan rakyat Bima ditimbun
di pelabuhan untuk dikirim ke kepulauan lain,
16 September 1951

ANRI : Kempen No.510916 NN 5



Seorang laki-laki sedang menjemur bawang merah yang merupakan hasil pertanian rakyat Sumbawa,
16 September 1951

ANRI : Kempen No.510916 NN 1



Seorang anak petani dengan hasil tanaman buah semangka
di Lombok Barat,
20 September 1951

ANRI : Kempen No.510920 MM 37



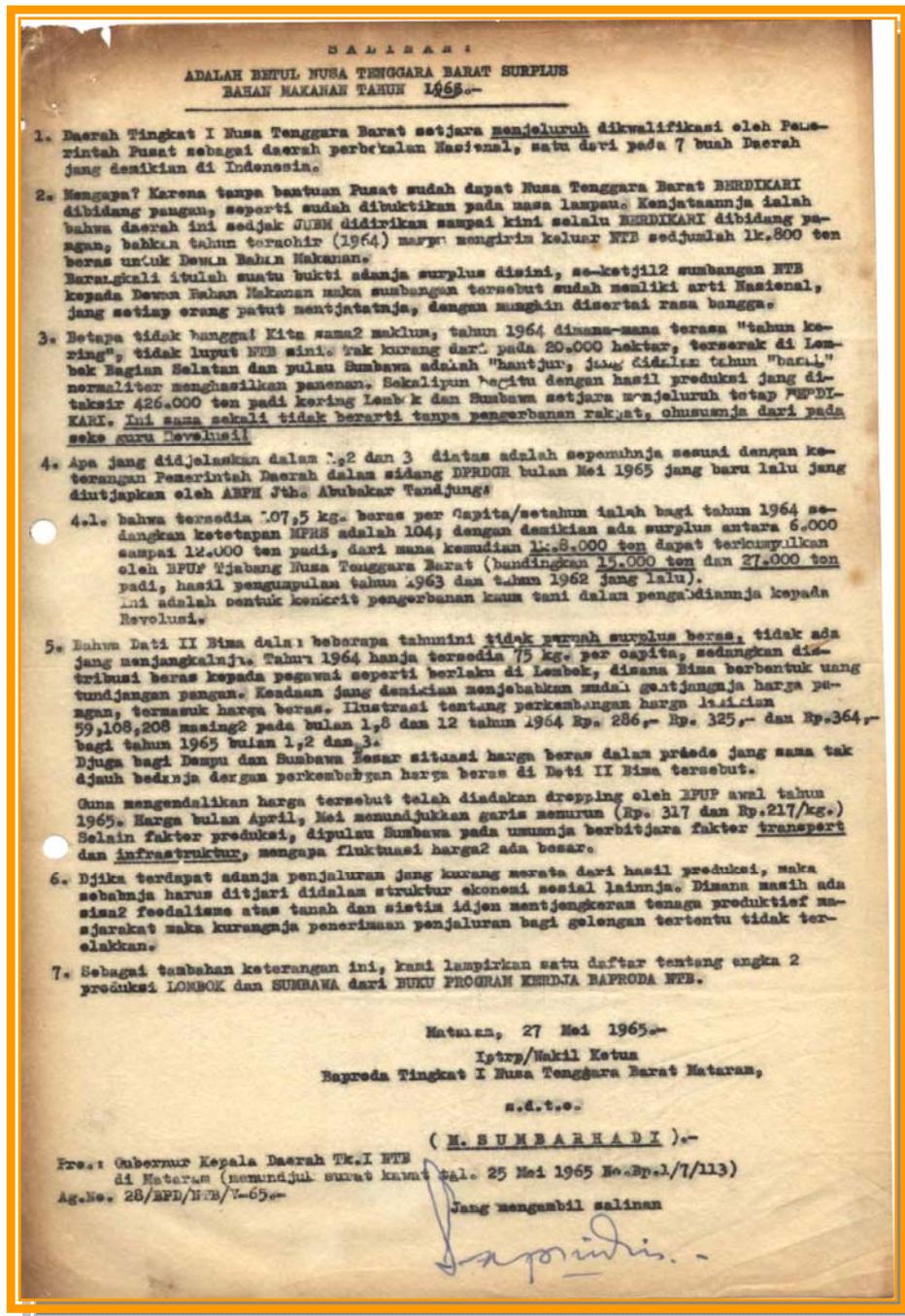
Seorang wanita sedang menunggu tumpukan tembakau di
Lombok yang terkenal dengan nama tembakau Ampenan,
21 September 1951

ANRI : Kempen No. K 510921 MM 35



Dua orang wanita sedang menata bawang merah yang merupakan hasil pertanian rakyat Sumbawa di pelabuhan Sape untuk diangkut dengan perahu keluar daerah, 1 November 1954

ANRI : Kempen No. 541101 NN 11



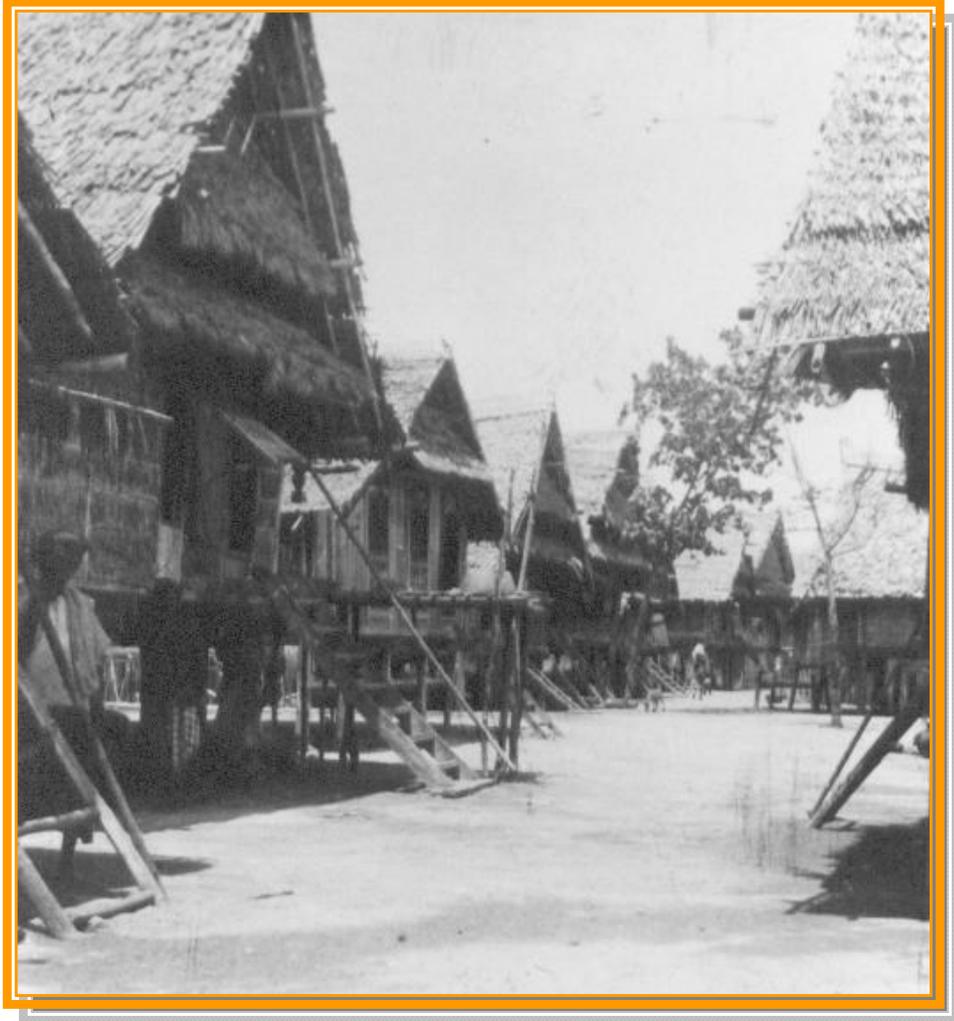
Surat keterangan Wakil Kepala Bapreda Tingkat I Nusa Tenggara Barat, M. Sumbarhadi tentang produksi pangan beras di Nusa Tenggara Barat, 27 Mei 1965
ANRI : Waperdam Ekubang No.642

Bangunan



Rumah Residen Mataram di Lombok,
1920

ANRI : KIT No.775/76

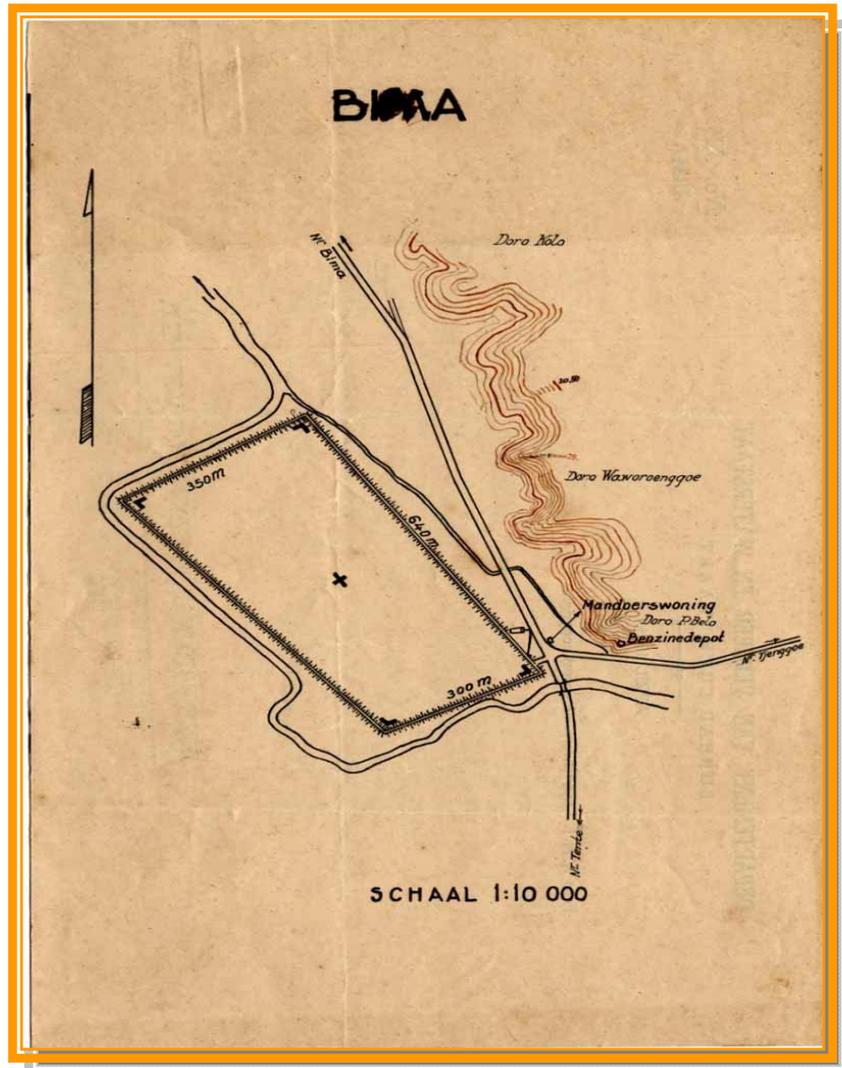


Kampung Sumbawa,
1920
ANRI : KIT No.853/5



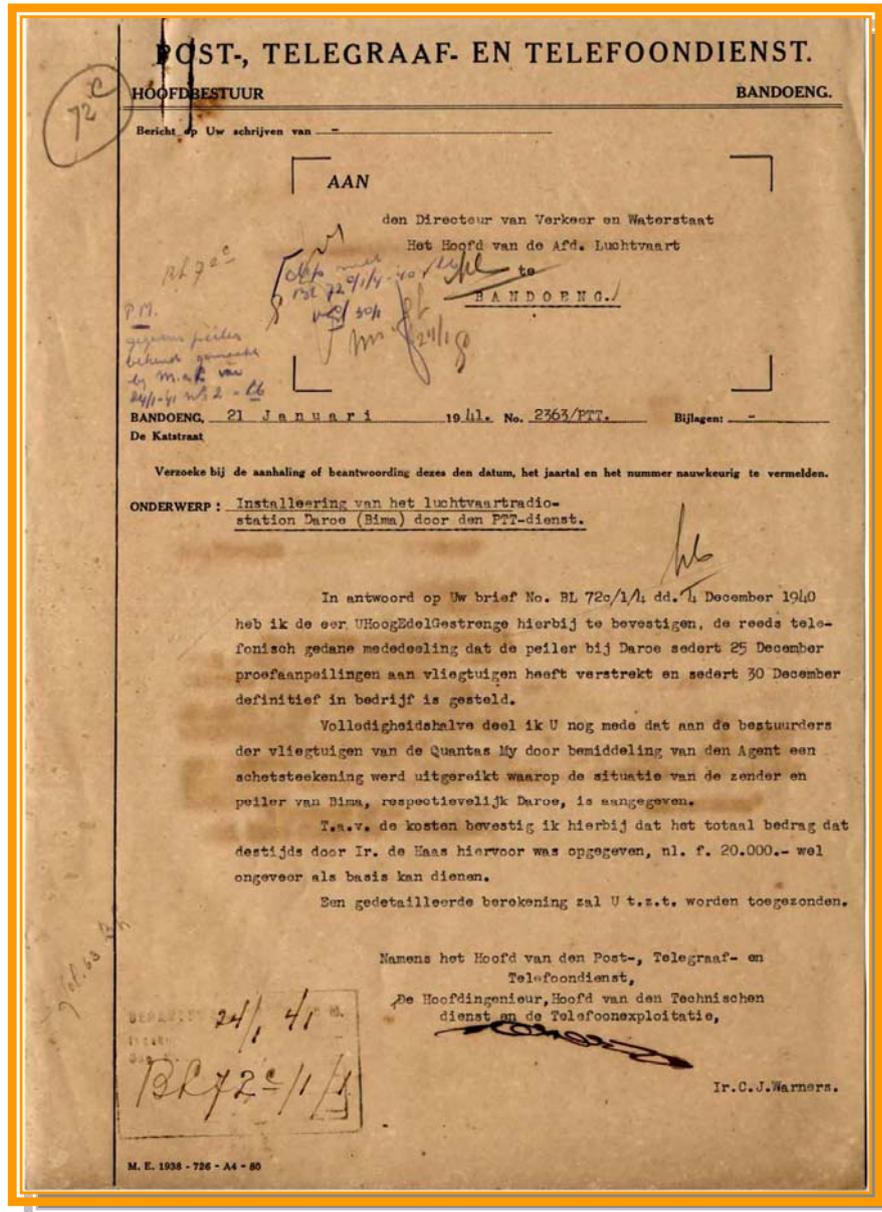
Langsar Candi (Pura Lingsar) di Lombok,
1925

ANRI : KIT No.6/48

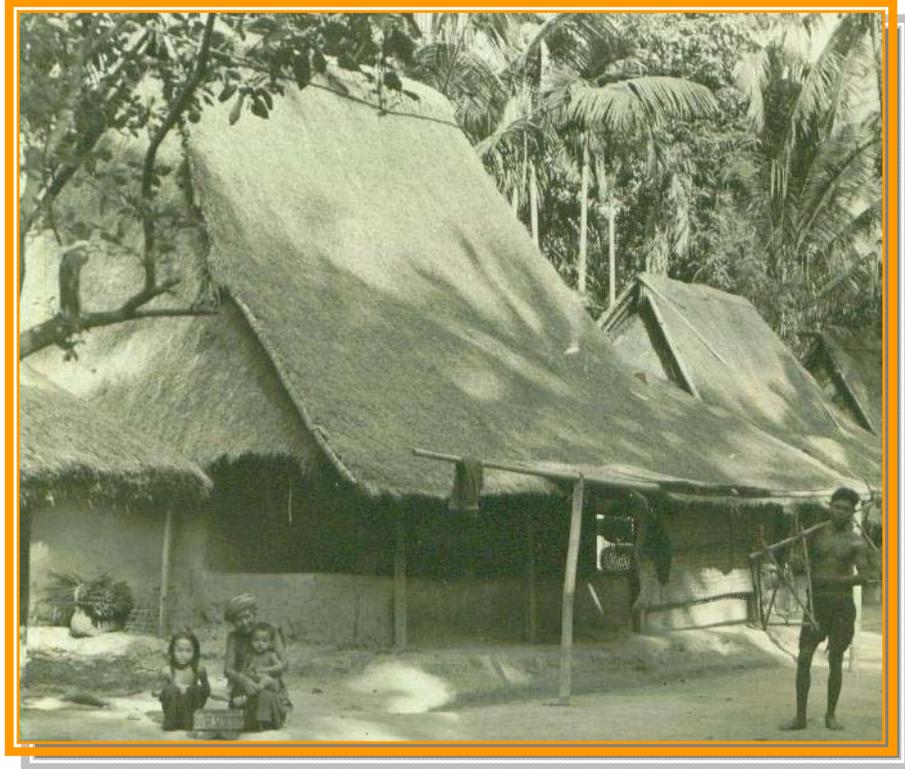


Sket dari pembangunan landasan kapal terbang di Bima,
1938

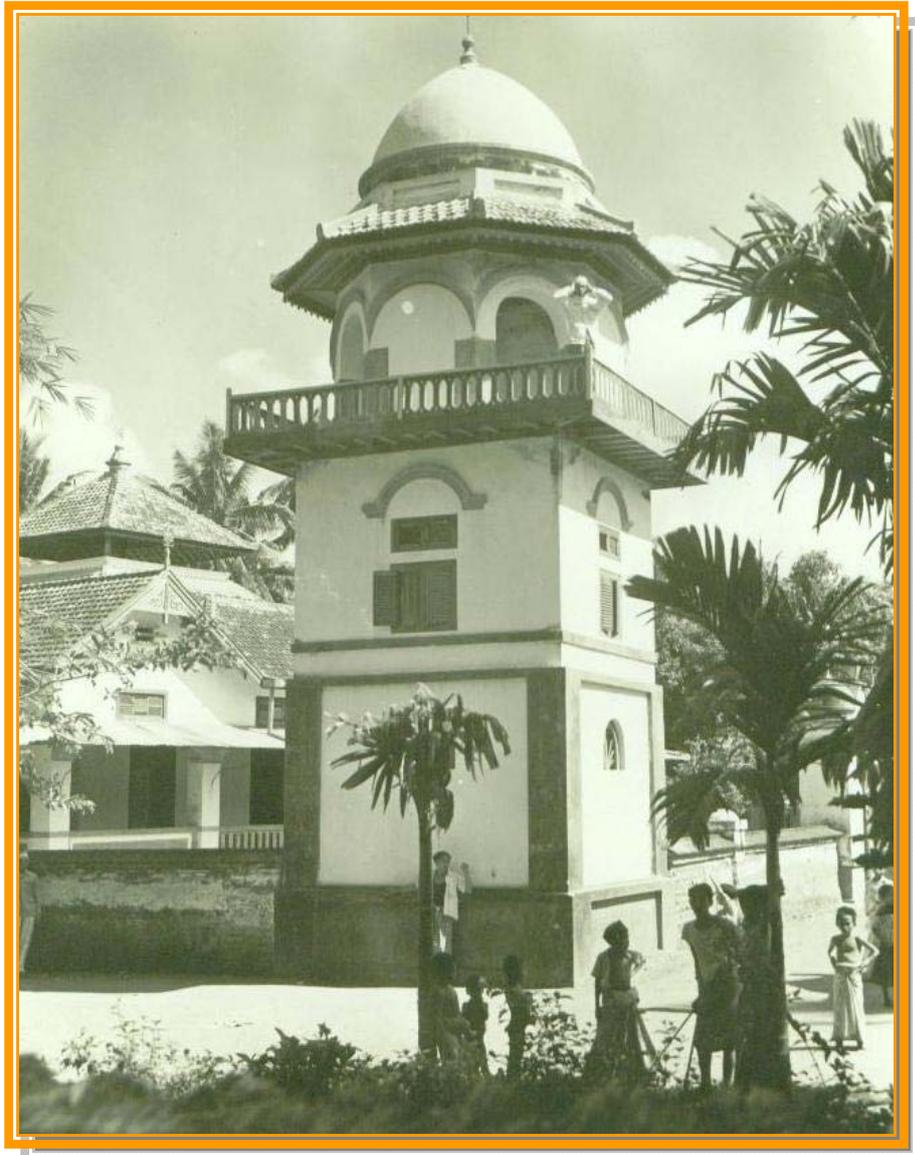
ANRI : BOW No.BL-227



Surat kepada Direktur Verkeer en Waterstaat tentang Pemasangan stasiun radio penerbangan Bima oleh Dinas Post Telegraaf en Telefoondienst, 21 Januari 1941
ANRI : BOW No. BL-492

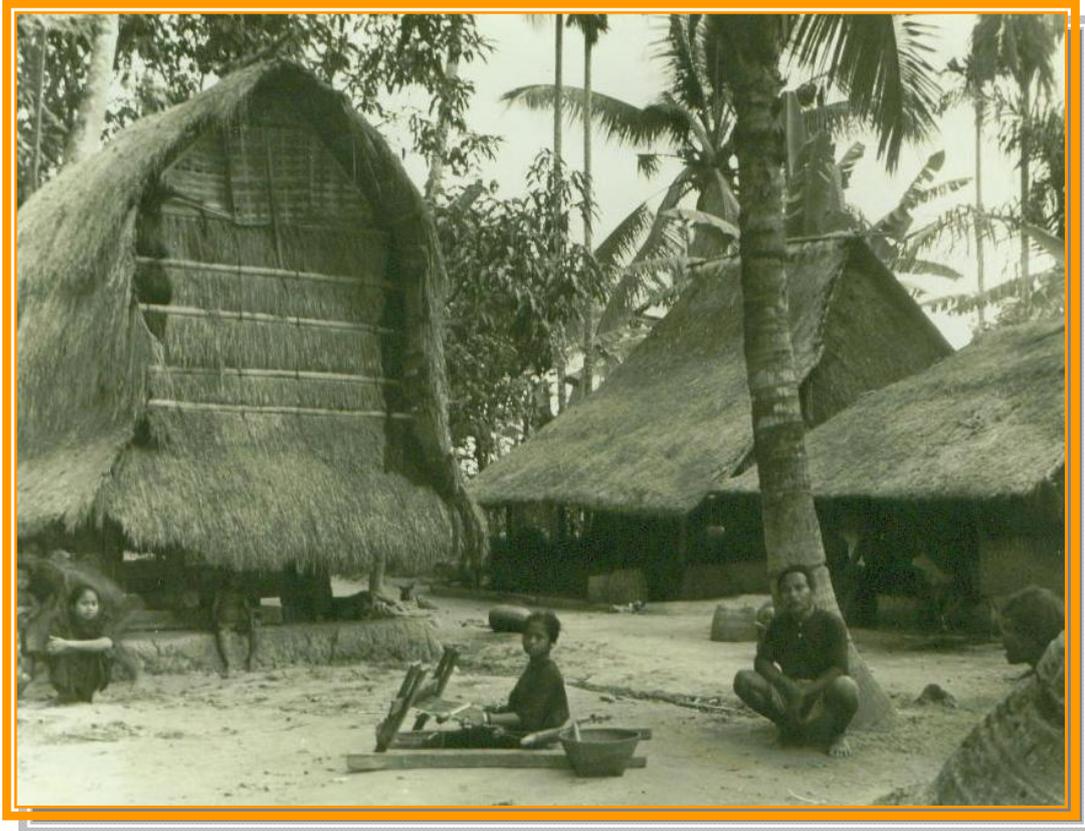


Rumah penduduk di Lombok,
20 September 1951.
ANRI : Kempen No.510920 MM 17



Mesjid Karang Taliwang, Lombok Barat,
20 September 1951

ANRI : Kempen No.510920 MM 24

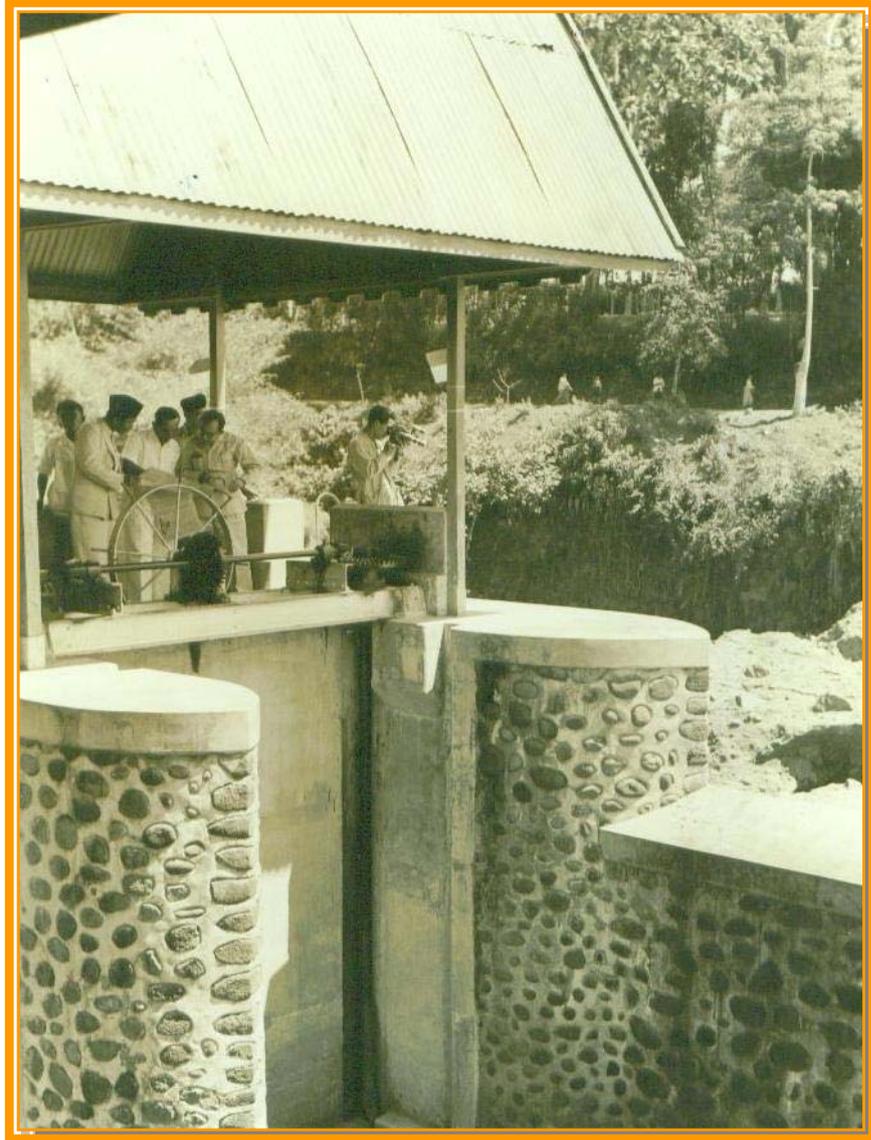


Lumbung untuk menyimpan padi di muka rumah, Lombok,
20 September 1951

ANRI : Kempen No.510920 MM 15



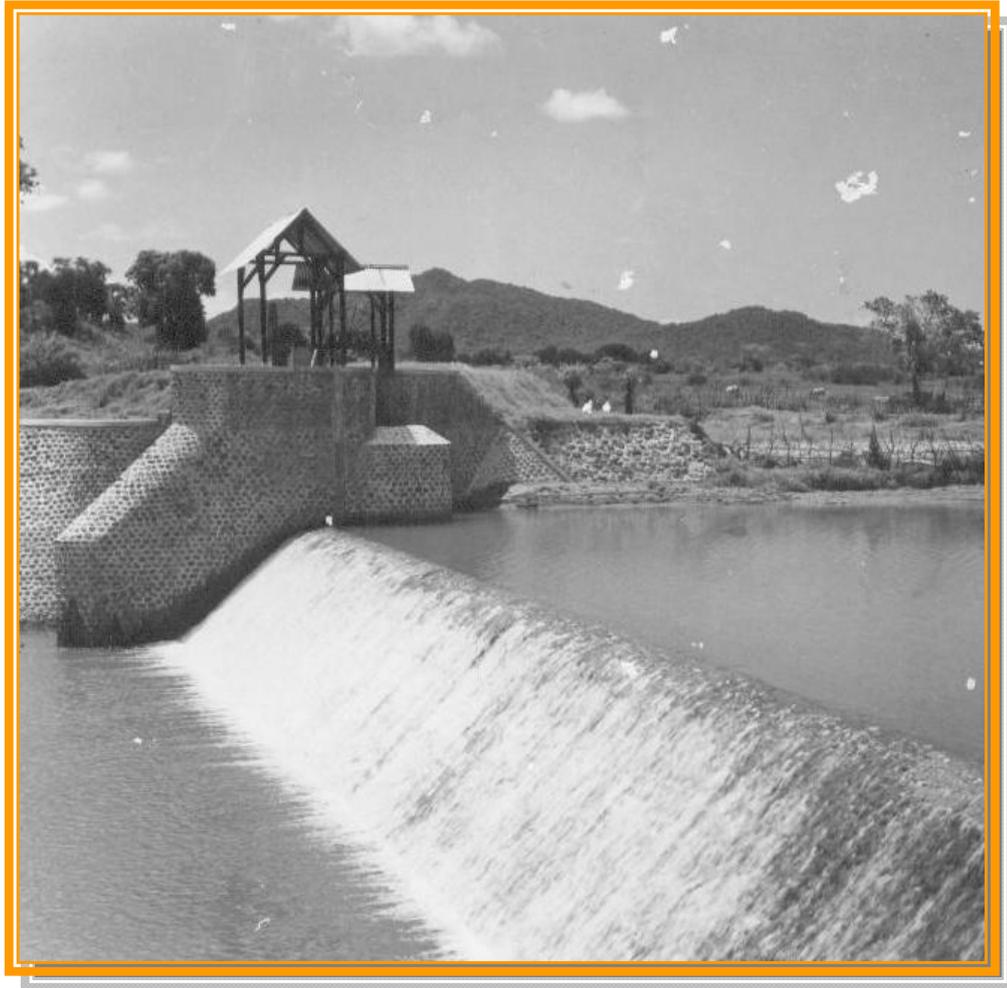
Cyphoon Narmada Lombok Barat,
20 September 1951
ANRI : Kempen No.510920 MM 10



Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang meninjau pintu air di Lombok untuk mengetahui sampai di mana kemajuan di sekitar pengairan yang sangat penting untuk pertanian,

25 April 1952

ANRI : Kempen No.520425 NN 123



Pintu air di Sumbawa,
25 April 1952
ANRI : Kempen No. 520425 NN 155



Dam Jurang Sate di Lombok,
Mei 1952
ANRI : Kempen No.133-36



Jembatan Ampenan di kota Ampenan, Lombok,
April 1953

ANRI : Kempen No. A-5

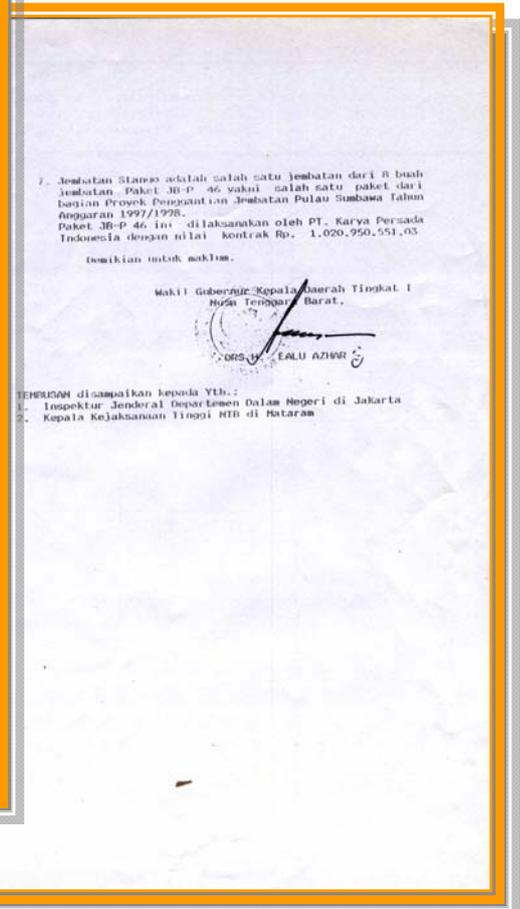
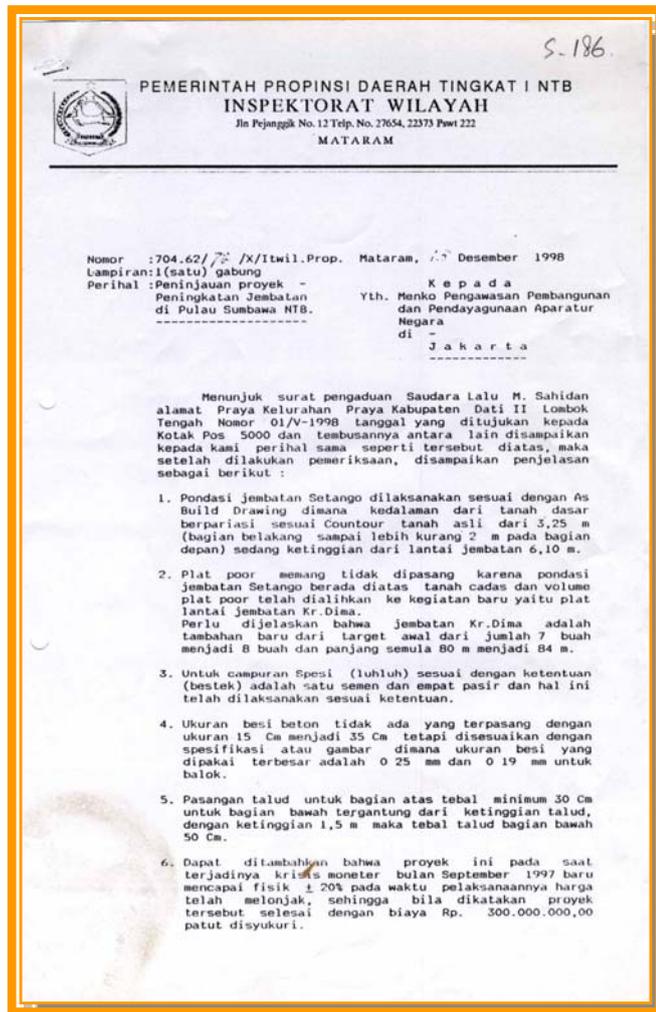


Istana Sultan Bima,
tempat Presiden dan Wakil Presiden menginap,
25 April 1952
ANRI : Kempen No.520425 NN 132



Gedung kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram,
1 Agustus 1960

ANRI : Kempen No.600801 MM 5



Surat Wakil Gubernur KDH Tingkat I Nusa Tenggara Barat
tentang pemeriksaan proyek pembangunan jembatan Setango di
pulau Sumbawa,
26 Desember 1998

ANRI : Menkowsabngan No.315

Bencana Alam

ALAMAT PECAH GUNUNG TAMBORA

Hijrat Nabi Salla'llahi 'alaihi wa sallama seribu dua ratus tiga puluh genap tahun, Tahun Za pada hari Selasa waktu subuh sehari bulan Jumadilawal, tatkala itulah Tanah Bima datanglah takdir Allah melakukan kodrat iradat atas hamba-Nya. Maka gelap berbalik lagi lebih dari pada malam itu, kemudian maka berbunyiilah seperti bunyi meriam orang perang, kemudian maka turunlah kersik batu dan abu seperti dituang, lamanya tiga hari dua malam. Maka heranlah sekalian hamba-Nya akan melihat karunia Rabbi al-alam in yang melakukan fassal li-ma yurid. Setelah itu maka teranglah hari, maka melihat rumah dan tanaman sudah rusak semuanya. Demikianlah adanya itu, yaitu pecah Gunung Tambora menjadi habis mati orang Tambora dan Pekat pada masa raja Tambora

Kutipan dari buku "*Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*" oleh Henri Chambert-Loir, Jakarta: 2004. hal. 335, yang menggambarkan kejadian meletusnya Gunung Tambora pada tanggal 5 April 1815.

Kepustakaan Populer Gramedia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient

ASAL MULA MELETUSNYA GUNUNG TAMBORA

Bahwa ini pada menyatakan ceritera daripada Negeri Tambora yang dimurkai Allah Subhanahu wa Taala, maka jadi binasa Negeri Tambora sekarang ini.

Sebermula ada seorang Said Idrus, asalnya dari Bengkulu, ialah menumpang kepada seorang Bugis, singgah di Negeri Tambora berniaga. Maka ada suatu hari maka Tuan Said Idrus naik ke darat, masuk dalam negeri besar berjalan-jalan pesiar sampai Lohor, maka ia masuk dalam mesjid sembahyang. Maka didapatnya ada di dalam mesjid itu anjing, maka disuruh usir keluar anjing, disuruh pukul. Maka orang yang jaga anjing itu marah, maka berkata orang yang jaga anjing itu, "Raja kami yang empunya anjing itu". Maka Tuan Said itu pun berkata, "Baik siapa punya anjing, karena ini mesjid, Allah Subhanahu wa Taala yang empunya rumah ini. Siapa yang memasukkan anjing di dalam mesjid, orang kafir itu". Maka orang yang jaga anjing itu pergi mengadu ke Raja Tambora, mengatakan "Ada seorang tuan-tuan Arab mengatakan kita ini orang Tambora dikatakan kafir, sebab didapatnya ada anjing dalam mesjid".

Bagian awal Kutipan dari buku "*Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*" oleh Henri Chambert-Loir, Jakarta: 2004. hal. 337, yang menggambarkan kejadian meletusnya Gunung Tambora pada tanggal 5 April 1815.

Kepustakaan Populer Gramedia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient

Syahdan maka bekas negeri-negeri yang satu tanah Negeri Tambora itu pun semuanya kena bala, yang sebelah barat Negeri Tambora itu Negeri Sumbawa, yang sebelah timur Negeri Tambora itu Negeri Sanggara dan Negeri Papekat, dan Dompoo, dan Negeri Bima, yang masih membawa dirinya kepada Gouvernement adanya. Smeua negeri itu ada yang bagi dua, ada yang bagi tiga keluar orangnya dengan sebab kelaparan, ada yang mati. Manusia yang hidup masing-masing pergi dimana-mana mengikut orang dagang, asal boleh dapat makan, ada yang menjual dirinya pada temannya ditukar sama padi.

Syahdan di negeri di Sumbawa sehingga Pinggalang dalam hujan abu segala binatang mati sebab tertunu di abu. Tiga tahun tiada boleh mengerjakan tempat padi. Ada lebih selaksa orang Sumbawa mati dan yang meninggalkan negerinya adanya.

Dan sebagian lagi di Negeri Mengkasar dan di Negeri Bugis, tatkala terbakar Negeri Tambora, sehari semalam gelap hujan abu antero Negeri Bugis Mengkasar, tetapi itu waktu tanah yang kurus menjadi gemuk di Bugis Mengkasar.

Tiada berapa lamanya sudah terbakar Negeri Tambora, maka ada satu hari maka datang air besar dari tiga ombak besar, dari selatan datangnya itu ombak, maka tujuh negeri kecil tenggelam, perahu dagang yang ada berlabuh di situ semuanya dibawa ombak naik di hutan.

Bagian akhir Kutipan dari buku "*Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*" oleh Henri Chambert-Loir, Jakarta: 2004. hal. 338, yang menggambarkan kejadian meletusnya Gunung Tambora pada tanggal 5 April 1815.

Kepustakaan Populer Gramedia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient



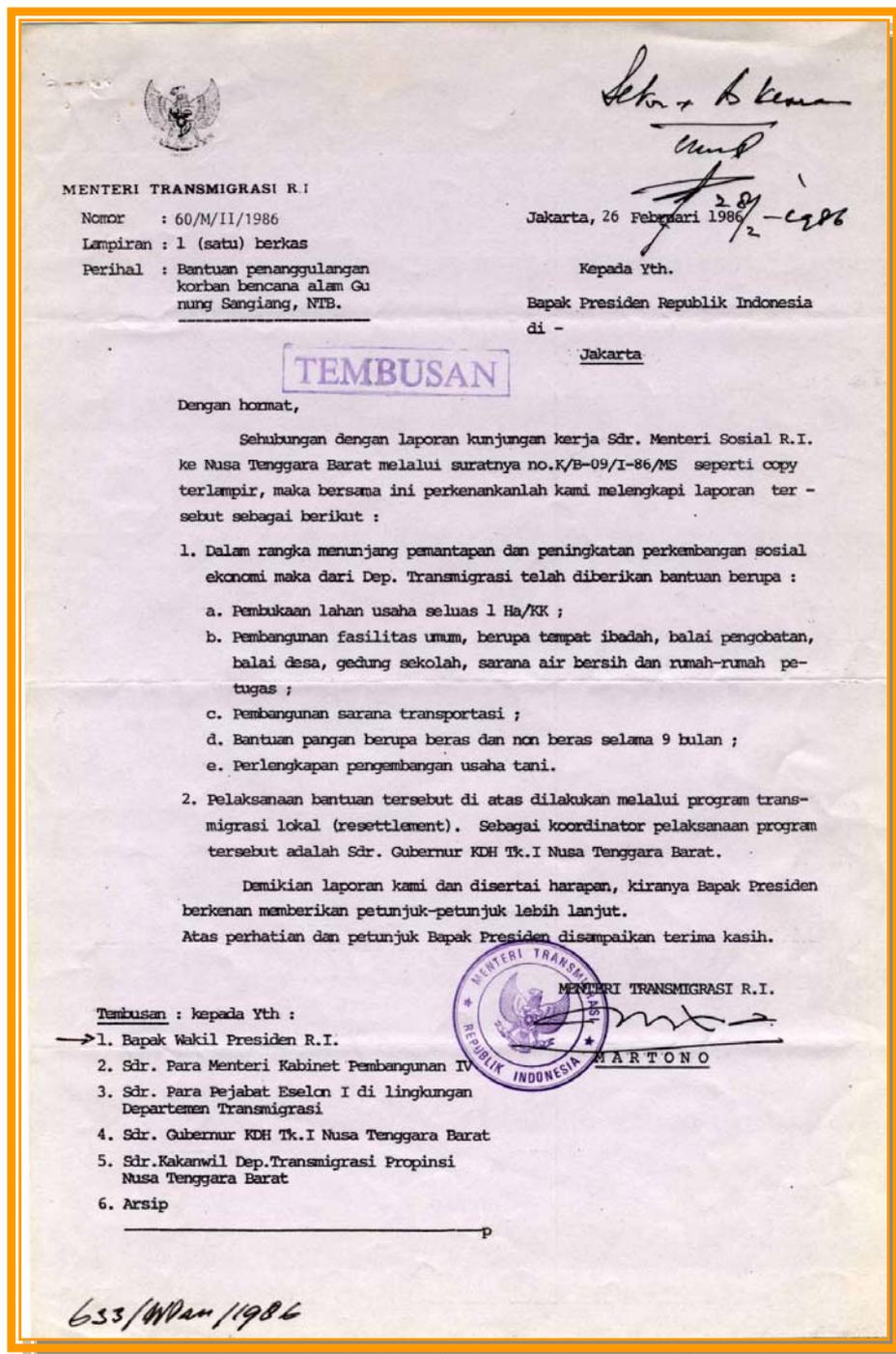
Rumah dan toko yang telah rusak akibat gempa bumi di Bima,
6 November 1954

ANRI : Kempen No.541106 NN 5



Mesjid yang rusak akibat gempa bumi di Bima,
6 November 1954

ANRI : Kempen No.541106 NN 7



Surat Menteri Transmigrasi tentang bantuan penanggulangan korban bencana alam Gunung Sangiang, Nusa Tenggara Barat, 26 Februari 1986

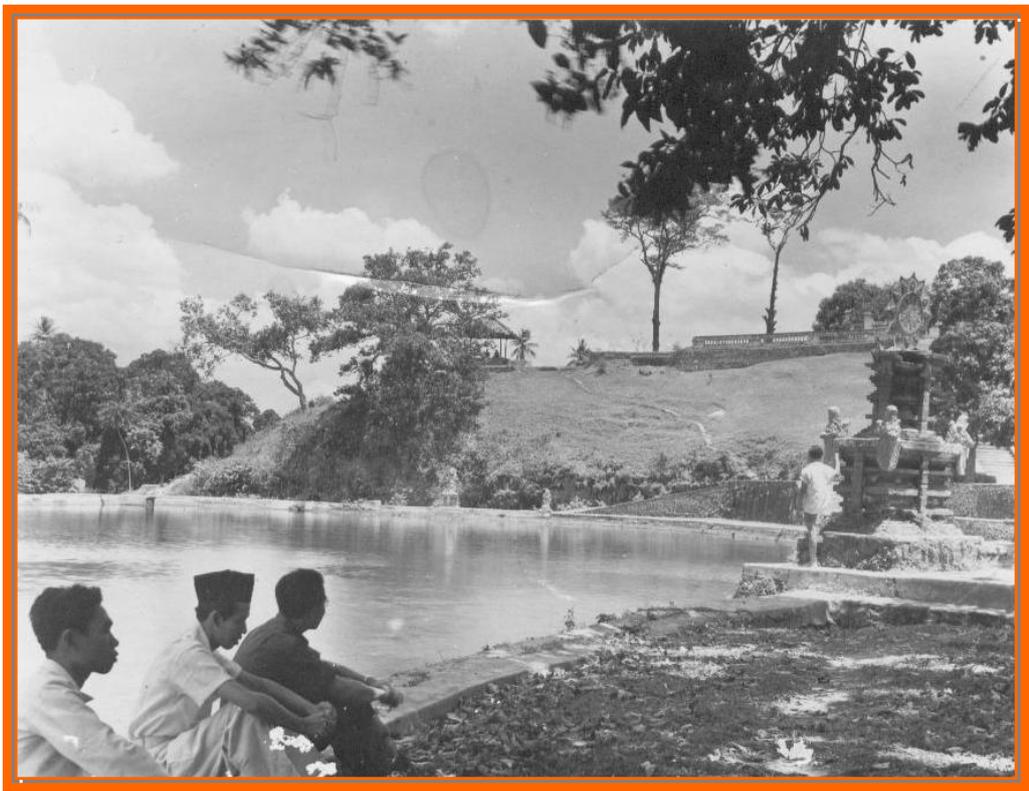
ANRI : Setwapres Umar Wirahadi Kusuma No.270

Panorama Alam



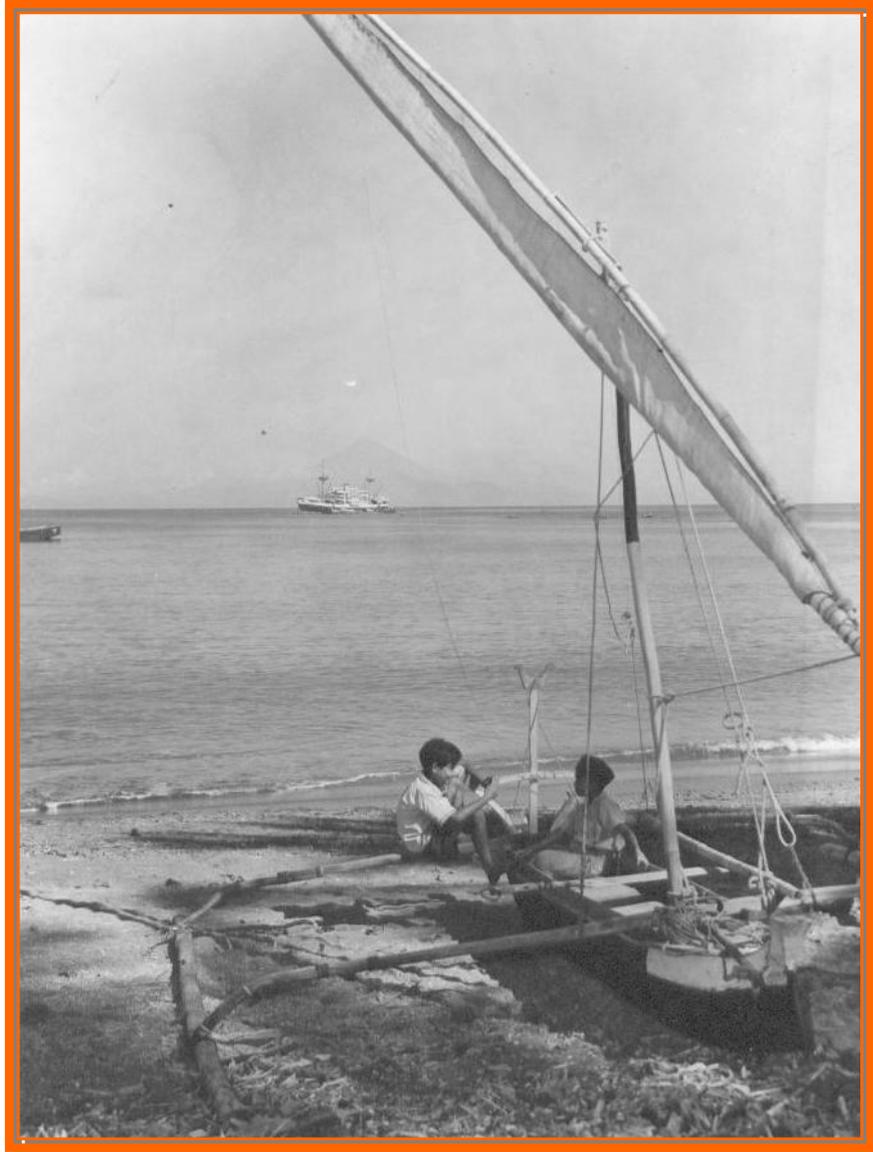
Pemandian Istana Air (*Waterpaleis*) di Narmada,
30 Oktober 1950

ANRI : Kempen No.502290



Pemandangan di istana air Narmada, Lombok,
20 September 1951

ANRI : Kempen No. 510920 MM 6



Keindahan alam di pantai laut Lombok,
tampak dua anak tengah bercengkerama di perahu Kolek,
25 April 1952

ANRI : Kempen No. 520425 NN 125



Pemandangan di daerah pegunungan Sumbawa
dengan jalan raya yang melalui bukit-bukit tandus,
Sumbawa,
29 Oktober 1954
ANRI : Kempen No.541029 NN 5

Daftar Arsip yang Diserahkan

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN "CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP"

I. GEOGRAFIS

1. Ampenan, Mataram (*Kleine Sunda Eilanden*) Lombok, Nusa Tenggara Barat, 1926. 1 lembar.
ANRI: Topografi No.2740
2. Peta ikhtisar Lombok yang termasuk bagian residensi Bali dan Lombok, 1927. 1 lembar.
ANRI: Topografi No.2738
3. Pamonang, Telaga Wareng, Tjoepok, Dasanlontar, Menggala, Gunung Trawangan, Gunung Weno, Gunung Aer (Tjoepok Lombok, Nusa Tenggara Barat), 1928. 1 lembar.
ANRI: Topografi No. 2739
4. Soembawa Pulau Maya, Eastindies (Sumbawa, Nusa Tenggara Barat), 1942. 1 lembar.
ANRI: Topografi No.2746
5. Soembawa, tanpa tanggal. 1 lembar.
ANRI: M. Yamin 1013
6. *Kleine Soenda Eilanden* (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur), tanpa tanggal. 1 lembar.
ANRI: Topografi No.2688

II. PEMERINTAHAN

7. Catatan kejanggalan mengenai suksesi di kerajaan Bima, Sumbawa dan Dompu, 1701-1756. 11 lembar.
ANRI: Kontrak Dompu
8. Terjemahan surat berbahasa Melayu yang ditulis Raja Salenparang, Gusti Made Karangasang kepada Raja Bima mengenai bersatunya Bima, Bali dan Salenparang, 29 Rajab 1776, 6 lembar.
ANRI: Makasar No.404/5
9. Memori serah terima Residensi Bima, Vermarlen kepada Jason, 1801. 28 lembar.
ANRI: Makasar No.376/1
10. Stempel Kerajaan Bima Masa Pemerintahan Sultan Salahudin, Tahun 1800, 1 lembar.
ANRI: BT 4 Mei 1851, No.15
11. Stempel Kerajaan Sumbawa pada masa pemerintahan Sultan Amaroellah, Tahun 1846, 4 Mei 1851, 1 lembar.
ANRI: Besluit 4 Mei 1851, No.15
12. Stempel Kerajaan Bima Masa Pemerintahan Sultan Ismail, Tahun 1817-1850, 4 Mei 1851, 1 lembar.
ANRI: Besluit ,1851, No.15
13. Stempel Kerajaan Sangar Masa Pemerintahan Sultan Yunus Muhammad Tahun 1850, 18 Desember 1850, 1 lembar.
ANRI: BT 28 Desember 1850
14. Besluit Nomor 27 tanggal 2 September 1866 tentang Pembagian Wilayah Tambora dan Papekat menjadi kerajaan Sanggar dan Dompu. 14 lembar.
ANRI: Besluit 1866, Nomor 27

15. Stempel Kerajaan Dompu Tahun 1870, Masa Pemerintahan Sultan Abdullah. 12 Agustus 1871, 1 lembar.
ANRI: BT , 1871, No.22
16. Stempel Kerajaan Dompu Masa Pemerintahan Sultan Moehamad Sirajoedin, Tahun 1882, 28 April 1890, 1 lembar.
ANRI: BT 28 April 1890, No.28
17. Maklumat Sultan Bima M. Salahuddin tentang pemerintahan kerajaan Bima adalah Daerah Istimewa dari negara Republik Indonesia, 22 November 1945, 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M58,
18. Kutipan besluit Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur tentang penyerahan hak Daerah Sumbawa, 18 Desember 1948, 12 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S92,
19. Pernyataan bersama dari Swapraja Bima, Sumbawa dan Dompu untuk menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, April 1950. 3 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden RIS No.168
20. Surat Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Bagus Oka mengenai pembentukan 3 propinsi Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil serta pembubaran Negara Indonesia Timur, 25 Agustus 1950.
ANRI: Kerajaan Bima No.S112
21. Resolusi DPR RS tentang pembubaran Negara Indonesia Timur dan bergabung dengan Republik Indonesia, 1950. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S139

22. Penjelasan Undang-Undang Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, 1958. 4 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S79
23. Rencana Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur, tanpa tanggal. 7 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S32

III. POLITIK

24. Kontrak perjanjian antara pemerintah VOC dengan Raja Tambora tentang bantuan Tambora kepada Makasar dalam perang Makasar, 11 Agustus 1675. 11 lembar.
ANRI: Makassar No.275
25. Kontrak Sumbawa antara lain mengenai sappanhout (sejenis kayu), pedagang serta budak, 25 April 1755, 5 lembar
ANRI: Makasar No. 374
26. *Traktaat* (Perjanjian Persahabatan) antara Kerajaan Bima dan Pemerintah Hindia Belanda 9 November 1857, 26 lembar.
ANRI: Arsip Kontrak
27. Surat kepada Residensi Timor dan wilayah Ta'loeknya tentang perbatasan wilayah Bima, 25 April 1929. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M13
28. Surat rahasia Departement van Binnenland Bestuur tentang terdamparnya tentara Jepang di dekat stasiun radio di wilayah kerajaan Bima, 14 Oktober 1938. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No. M20

29. Keputusan Konferensi Rakyat Indonesia di kota Mataram tentang pendirian Majelis Rakyat Indonesia (MRI), 13 September 1941. 2 lembar.
ANRI: Fritz Laoh No.11
30. Surat Pembesar Balatentara Nippon kepada Sultan Bima tentang himbauan agar Inggris dan Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Bali, 15 April 1942. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S149
31. Ucapan terima kasih Panglima Terbesar Angkatan Laut Jepang Tenno Heika kepada bangsa Indonesia yang telah membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur, 1945. 5 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M75
32. Surat Partai Sarikat Islam tentang pendirian Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) cabang Mataram dengan Ketua Rekso Ramli, 22 Desember 1947. 1 lembar.
ANRI: Kepolisian Negara No.560
33. Pernyataan mengenai pembentukan Negara Indonesia Timur yang oleh Belanda dijadikan alat untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1948. 3 lembar.
ANRI: LN Palar No.79
34. Resolusi Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang merupakan tuntutan rakyat Swapraja Bima (Pulau Sumbawa) antara lain mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Swapraja Bima, 5 Juli 1950. 1 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden RIS No.197

35. Suasana rapat umum di Mataram ketika masyarakat sedang mengibarkan bendera merah putih dan spanduk Persit yang menuntut Irian sebagai bagian dari Indonesia, 30 Oktober 1950. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.502288
36. Sambutan rakyat di sepanjang jalan yang dilalui Wakil Presiden Muhammad Hatta sewaktu tiba di Lombok dalam rangka rapat umum, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.520425 NN 110
37. Wakil Presiden Muhammad Hatta sedang memberikan ceramahnya pada saat rapat umum di Mataram, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.520425 NN 122
38. Komandan Sektor Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat peringatan HUT ke VIII Angkatan Perang Republik Indonesia di Sumbawa Besar, 5 Oktober 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.5
39. Mr. Sartono tiba di lapangan terbang Rembiga Lombok dalam rangka rapat Raksasa, 23 Juni 1959. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 590623 MM 4
40. Mr. Sartono sedang memberikan ceramah kepada rakyat Mataram saat Rapat Raksasa di Mataram, 23 Juni 1959. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.590623 MM 15

IV. PEREKONOMIAN

41. Surat kepada Gubernur di Makasar tentang pengiriman 'Sappanhout' (sejenis kayu) ke Jawa melalui pelabuhan besar Sumbawa, Bima dan Sape, 8 April 1833. 1 lembar.
ANRI: Makasar 362/14

42. Suasana pasar di Mataram, 30 November 1921.
1 lembar.
ANRI: Kempen No.9/90
43. Peraturan tentang hal pengenaan dan memungut pajak penghasilan di atas tanah –tanah kerajaan Bima dan Dompu, afdeling Sumbawa dan Sumba, Keresidenan Timor dan daerah Ta'loeknya, 15 Mei 1941. 7 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S45
44. Peraturan tentang bea pengiriman barang-barang keluar dari pulau Borneo, Celebes, Maluku, Sunda Kecil dan New Guinea Barat, 1942. 4 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M40
45. Surat-surat Sumbawa Ken Karikan Djimusho tentang kewajiban menabung ke kantor pos sebesar 50% dari upah yang dibayar, Juni 1944. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S95
46. Daftar penetapan harga pasar di Bima/Raba dari barang-barang makanan dan lain-lain antara lain sayur mayur dan buah-buahan, 1944. 4 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M40
47. Surat Kepala Kantor Pos tentang batas jumlah uang yang boleh dikirim di dalam dan di luar pulau, 1944. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S95
48. Kuitansi sumbangan uang dari penduduk di kerajaan Dompu dan Sanggar untuk pembelian pesawat tempur "Syo Sunda" beserta sket pesawat, 1944-1945. 4 lembar.
ANRI: Kerajaan Belanda No.M46

49. Pajak kopra per daerah di Negara Indonesia Timur, Bali dan Sumbawa tidak masuk hitungan karena usaha kopra tidak berjalan, 1948. 1 lembar.
ANRI: Algemene Secretarie No.457
50. Surat Sultan Bima tentang penyerahan mata uang kepada Komandan Jepang, 1946. 10 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S.133
51. Kantor Koperasi Perikanan Serba Bangun dengan para anggota pengurusnya di Bungin, Sumbawa, 26 Oktober 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541026 NN 4-1
52. Pemandangan pasar Sumbawa dengan kesibukan penduduk yang sedang berbelanja, 5 Juni 1955. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.550605 NN 3-1

V. PENDIDIKAN

53. Laporan Tahunan Dinas Perguruan antara lain tentang sekolah rakyat di Kesultanan Bima, 21 Mei 1943. 10 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S90
54. Daftar jumlah sekolah beserta murid-murid dan guru-guru di Kesultanan Bima, 5 Mei 1948. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M61
55. Mosi Pengurus Sekolah Menengah Partikelir Sumbawa mengenai pendidikan antara lain agar Negara Indonesia Timur memiliki Sekolah Menengah Partikelir, Juni 1948-Oktober 1950. 1 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S103

56. Sekolah Menengah Pertama Mataram di Lombok, 20 September 1951. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.135-1

57. Murid-murid Sekolah Rakyat sedang menanti kedatangan Gubernur Sunda Kecil beserta rombongan di depan rumah kediaman Sultan Bima, 30 Agustus 1952. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.165-10

VI. KEBUDAYAAN

58. Bejambek, upacara seserahan untuk pengantin wanita di Lombok, 20 September 1951. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.510920 MM 31

59. Pertunjukan tari Gandrung di Mataram, Lombok, 18 Mei 1954. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.540518 MM 1-2

60. Pertunjukan tari Bumbung di Mataram, 18 Mei 1954. 1 lembar.

Arsip Kempen No.540518 MM 1-1

61. Keluarga Petani berpakaian adat di salah satu desa di Sumbawa, 26 Oktober 1954. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.541026 NN 8

62. Nampak empat orang wanita suku Sumbawa berpakaian adat berdiri di depan rumahnya, 26 Oktober 1954. 1 lembar.

ANRI: Kempen No.541026 NN 3

63. Laki-laki suku Sumbawa berpakaian adat di muka rumahnya, Sumbawa, 26 Oktober 1954.

ANRI: Kempen No.541026 NN 2

64. Kuburan raja-raja dahulu kala di Bima, 3 November 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541103 NN 2
65. Suku Sasak sedang membaca daun lontar, Lombok, 1 Agustus 1960.
ANRI: Kempen No.600801 MM 1
66. Peringatan 15 tahun pengangkatan Sultan Sumbawa, tanpa tanggal. 1 lembar.
ANRI: Kempen RVD No.A 1540/47

VII. TRANSPORTASI

67. Surat kepada Cornelis Sinkelaar, gubernur di Makasar mengenai musibah kapal de Hercules di selat Sapie berikut kelasi-kelasi yang menjadi korban. Berita disampaikan oleh pejabat VOC di Bima, 2 Mei 1769. 7 lembar.
ANRI: Timor No.18
68. Kapal yang akan mengangkut barang-barang hasil bumi dari pulau ke pulau di pelabuhan Bima, 16 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.510916 NN 6
69. Sebuah jembatan yang digabung dengan *Aquaduct* di desa Gerung, Lombok Barat, 20 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 510920 NN 6
70. Gerobak kuda sebagai alat untuk mengangkut kacang tanah, Lombok Barat, 21 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.K 510921 MM 31

71. Pedagang naik kuda dan petani membawa padinya pergi ke pasar, 25 April 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.520425 NN 142
72. Kuda tunggang yang terdapat banyak di Sumbawa yang digunakan oleh rakyat sebagai alat pengangkut dari desa ke kota Sumbawa, 29 Oktober 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541029 NN 1-3
73. Pembukaan lapangan terbang Rembiga oleh menteri Perhubungan di Lombok, 13 Januari 1959. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.441/B
74. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Permohonan membeli kapal Karawatu eks Pelni, 26 Februari 1969, 1 lembar.
ANRI: Kementerian Keuangan No.436

VIII. PERTANIAN

75. Surat kepada Residensi Timor tentang produksi hasil pertanian kedelai di wilayah Bima, 30 juli 1935. 3 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.M29
76. Daftar perhitungan hasil padi sawah serta keperluan penduduk dalam kerajaan Bima, 1944. 2 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S99
77. Surat Paduka Tuan Sumbawa Kentyo tentang peraturan penanaman kapas di Bima, Januari-Juni 1945. 4 lembar.
ANRI: Kerajaan Bima No.S93
78. Presiden Soekarno menerima persembahan kuda dari rakyat Sumbawa saat berkunjung ke Sumbawa, 30 Oktober 1950. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.502316

79. Garam sebagai penghasilan rakyat Bima ditimbun di pelabuhan untuk dikirim ke kepulauan lain Bima, 16 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.510916 NN 5
80. Seorang laki-laki sedang menjemur bawang merah yang merupakan hasil pertanian rakyat Sumbawa, agar tidak busuk, 16 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.510916 NN 1
81. Dua orang anak petani dengan hasil tanaman buah semangka di Lombok Barat, 20 September 1951.
ANRI: Kempen No.510916 NN 1
82. Seorang wanita sedang menunggu tumpukan tembakau di Lombok yang terkenal dengan nama tembakau Ampenan, 21 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. K 510921 MM 35
83. Dua orang wanita sedang menata bawang merah yang merupakan hasil pertanian rakyat Sumbawa di pelabuhan Sape untuk diangkut dengan perahu keluar daerah, 1 November 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 541101 NN 12
84. Surat keterangan Wakil Kepala Bapreda Tingkat I Nusa Tenggara Barat, M. Sumbarhadi tentang produksi pangan beras di Nusa Tenggara Barat, 27 Mei 1965. 1 lembar.
ANRI: Waperdam Ekubang No.642

IX. BANGUNAN

85. Rumah Residen Mataram di Lombok, 1920. 1 lembar.
ANRI: KIT No.775/76

86. Kampung Sumbawa, 1920. 1 lembar.
ANRI: KIT No.833/5
87. Langsar Candi (Pura Lingsar) di Lombok, 1925.
1 lembar.
ANRI: KIT No.6/48
88. Laporan mengenai pembangunan landasan kapal terbang di Bima beserta sket, 1938. 2 lembar.
ANRI: BOW No.BL-227
89. Pemasangan stasiun radio penerbangan Bima oleh Dinas Post Telegraaf en Telefoondienst dengan cetak biru, 1939-1941. 3 lembar.
ANRI: BOW No.BL-492
90. Rumah penduduk di Lombok, 20 September 1951.
1 lembar.
ANRI: Kempen No.510920 MM 17
91. Mesjid Karang Taliwang, Lombok Barat, 20 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.510920 MM 20
92. Lumbung untuk menyimpan padi di muka rumah, Lombok, 20 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.510920 MM 15
93. Cyphoon Narmada Lombok Barat, 20 September 1951.
1 lembar.
ANRI: Kempen No.MM 10
94. Wakil Presiden Muhammad Hatta sedang meninjau pintu air di Lombok untuk mengetahui sampai di mana kemajuan di sekitar pengairan yang sangat penting untuk pertanian, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.520425 NN 123

95. Pintu air di Sumbawa, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 520425 NN 155
96. Dam Jurang Sate di Lombok, Mei 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.133-36
97. Jembatan Ampenan di kota Ampenan, Lombok, April 1953. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. A-5
98. Istana Sultan Bima, tempat Presiden dan Wakil Presiden menginap, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.520425 NN 132
99. Gedung kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, 1 Agustus 1960. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.600801 MM 5
100. Surat Wakil Gubernur KDH Tingkat I Nusa Tenggara Barat tentang pemeriksaan proyek pembangunan jembatan Setango di pulau Sumbawa, 1977. 2 lembar.
ANRI: Menkowsabngpan No.315

X. BENCANA ALAM

101. Kutipan dari buku "*Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*" oleh Henri Chambert-Loir, Jakarta: 2004. hal. 335, yang menggambarkan kejadian meletusnya Gunung Tambora pada tanggal 5 April 1815.
Kepustakaan Populer Gramedia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient

102. Rumah dan toko yang telah rusak akibat gempa bumi di Bima, 6 November 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541106 NN 5
103. Masjid yang rusak akibat gempa bumi di Bima, 6 November 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541106 NN 5
104. Surat Menteri Transmigrasi tentang bantuan penanggulangan korban bencana alam Gunung Sangiang, Nusa Tenggara Barat, Januari- Februari 1986. 1 lembar.
ANRI: Setwapres Umar Wirahadi Kusuma No.270

XI. PANORAMA ALAM

103. Pemandian Istana Air (Waterpaleis) di Narmada, 30 Oktober 1950. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.502290
104. Pemandangan di istana air Narmada, Lombok, 20 September 1951. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 510920 MM 6
105. Keindahan alam di pantai laut Lombok, tampak dua anak tengah bercengkerama di perahu Kolek, 25 April 1952. 1 lembar.
ANRI: Kempen No. 520425 NN 125
106. Pemandangan di daerah pegunungan Sumbawa dengan jalan raya yang melalui bukit-bukit tandus, Sumbawa, 29 Oktober 1954. 1 lembar.
ANRI: Kempen No.541029 NN 5

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.